

Laporan Penelitian

Orang Mandailing di Malaysia: Migrasi dan Politik Etnik



Tim Peneliti:

Ketua:

Dr. Faisal Riza, MA (UIN Sumatera Utara)

Anggota:

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ozay (ISTAC-IIUM, Malaysia)

Dr. Aprilinda Martinondang harahap, M.Ag (UIN Sumatera Utara)

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA-MEDAN
2024

Bab I Pendahuluan

Selama berabad-abad, Semenanjung Malaya merupakan salah satu lokasi penting untuk perdagangan maritim antara Asia Barat dan Asia Timur, yang secara geo-strategis terletak di persimpangan rute maritim utama Asia Selatan dan Asia Timur, antara dua sub-benua penting, India dan Cina, dan dua jalur laut utama yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Rute perdagangan internasional antara Cina dan India dan seterusnya ke Asia Barat dan Eropa melalui Selat Malaka dan Kepulauan Riau-Lingga, di sebelah selatan Singapura kontemporer, dianggap sebagai satu-satunya rute aman yang diketahui antara Asia Timur dan Asia Barat. Lokasi vital Selat Malaka menyebabkan terbentuknya pusat-pusat perdagangan di Semenanjung Malaya dan di Sumatra serta jaringan perdagangan yang menjangkau hingga pesisir Afrika, Arab, dan Teluk Persia dan kemudian ke Eropa. Click or tap here to enter text.

Semenanjung Malaya secara historis telah menjadi magnet migrasi bagi orang-orang dari berbagai daerah seperti Cina, India, dan Sumatera karena fundamental geo-ekonominya. Selain potensi sumber daya alam seperti penambangan timah, Malaya merupakan salah satu pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi strategis antara Asia Selatan, Timur, dan Tenggara, khususnya terkenal dengan berbagai jenis rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya. Fenomena ekonomi ini sudah dikenal sejak zaman yang disebut “abad India” bahkan sebelum kunjungan singkat Marco Polo ke Pulau Sumatera.³ Selain itu, situasi politik di negara asal memicu migrasi penduduk ke tanah Melayu. Nama "Semenanjung Melayu" mengingatkan kita pada Malaysia masa kini. Akibatnya, orang, barang, budaya, dan banyak lagi telah melewati tempat ini di antara Samudra Hindia dan Asia Timur selama ribuan tahun. Dalam konteks ini, sementara proses migrasi terjadi, penegasan identitas etnis juga mengumpulkan modal dan jaringan bisnis.

³ “Bengal”, *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser*, 20 November 1862, h.3

Sejarah migrasi dan dinamika etnisitas di Malaysia merupakan sebuah kajian yang terus menarik perhatian para peneliti, terutama dalam melihat bagaimana kelompok-kelompok etnis minoritas berinteraksi dengan etnis mayoritas dan bagaimana mereka menegosiasikan identitas mereka dalam konteks yang beragam. Di antara kelompok etnis minoritas yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah komunitas Mandailing. Mandailing, yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu kelompok etnis dengan sejarah migrasi yang panjang ke Semenanjung Malaysia, terutama pada masa kolonial abad ke-19.

Migrasi Mandailing ke Malaysia pada awalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tekanan politik di tanah asal mereka, kesempatan ekonomi di tanah baru, dan hubungan sejarah dengan kelompok etnis Melayu yang lebih dominan. Di Malaysia, Mandailing umumnya terintegrasi dalam masyarakat Melayu, tetapi dalam proses tersebut mereka harus beradaptasi dengan kebijakan etnis dan sosial yang ketat di Malaysia, yang sering kali mendesak kelompok-kelompok minoritas untuk menyelaraskan diri dengan identitas Melayu sebagai bagian dari kebijakan asimilasi nasional. Namun, integrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Meskipun Mandailing secara historis memiliki kesamaan budaya dan agama dengan Melayu, mereka tetap memiliki identitas etnis yang berbeda, dengan bahasa, adat, dan tradisi tersendiri. Proses etnisasi dan negosiasi identitas mereka, baik dalam upaya mempertahankan warisan budaya Mandailing maupun dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial-politik Malaysia, merupakan suatu bentuk transformasi identitas yang sangat menarik untuk diteliti.

Politik etnik di Malaysia tidak hanya didasarkan pada perbedaan rasial dan budaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur kebijakan negara yang secara historis memprioritaskan kelompok etnis Melayu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks ini, minoritas seperti Mandailing menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas mereka, sambil berusaha menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara dan masyarakat mayoritas.

Penelitian ini berupaya memahami lebih dalam tentang bagaimana migrasi, politik etnik, dan etnisasi mempengaruhi perubahan identitas Mandailing di Malaysia. Apakah komunitas Mandailing terus mempertahankan identitas budaya mereka, atau apakah mereka sepenuhnya menyerap identitas

Melayu sebagai bagian dari strategi bertahan dalam tatanan politik yang ada? Bagaimana proses transformasi identitas ini mempengaruhi peran mereka dalam struktur sosial dan politik Malaysia yang lebih luas?. Dengan memahami sejarah dan dinamika migrasi Mandailing serta hubungan mereka dengan etnis lain di Malaysia, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai perjalanan kelompok etnis ini, tetapi juga berupaya menyelidiki lebih jauh implikasi dari transformasi identitas mereka terhadap kehidupan sosial, politik, dan budaya di Malaysia.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah migrasi orang Mandailing ke Malaysia? Apa saja faktor pendorong yang mempengaruhi proses migrasi tersebut?
2. Bagaimana proses etnisasi yang dialami komunitas Mandailing di Malaysia? Bagaimana mereka membentuk, mempertahankan, dan menegosiasikan identitas etnis mereka dalam konteks politik etnik di Malaysia?
3. Sejauh mana identitas Mandailing mengalami transformasi di tengah dinamika sosial-politik Malaysia? Faktor apa saja yang mendorong perubahan identitas ini?
4. Bagaimana dampak dari proses transformasi identitas ini terhadap posisi sosial, ekonomi, dan politik komunitas Mandailing di Malaysia?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, di antaranya:

1. Mengkaji sejarah migrasi orang Mandailing ke Malaysia, serta faktor-faktor pendorong migrasi tersebut.
2. Menganalisis proses etnisasi yang dialami oleh komunitas Mandailing di Malaysia dan bagaimana mereka membentuk identitas mereka dalam konteks multietnis.
3. Menjelaskan transformasi identitas Mandailing di Malaysia dalam kaitannya dengan dinamika politik etnik yang terjadi di negara tersebut.

4. Memahami dampak perubahan identitas ini terhadap posisi sosial, ekonomi, dan politik komunitas Mandailing di Malaysia.

C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diharapkan, baik dari sisi akademis maupun praktis.
2. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya kajian tentang migrasi, etnisitas, dan politik identitas di Malaysia, terutama dalam konteks kelompok etnis minoritas seperti Mandailing. Kajian ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami proses negosiasi dan transformasi identitas dalam masyarakat multietnis, serta bagaimana kelompok-kelompok etnis minoritas menyesuaikan diri dengan kebijakan negara yang lebih luas.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Malaysia, khususnya dalam merancang kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok etnis, termasuk minoritas seperti Mandailing. Penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam upaya memperkuat hubungan antar etnis di Malaysia, serta mendukung proses integrasi sosial yang lebih harmonis.

D. Metode

Penelitian ini didasarkan pada kerja lapangan dan studi arsip dengan pendekatan diskursif interpretatif, yang menelaah wacana literatur tentang masyarakat Mandailing dan kontribusi sosial mereka di Malaysia. Di Kuala Lumpur, para peneliti terlibat dalam penelitian kepustakaan, dan sebagian besar materi yang relevan diperoleh dari perpustakaan ISTAC-IIUM dan Perpustakaan Fakultas Studi Melayu (Akademi Penjagaan Melayu), Universitas Malaya. Secara khusus, koleksi pribadi Abdul Razak Lubis di Penang tentang subjek tersebut adalah

yang paling menginspirasi. Lubis telah memperoleh materi latar belakang yang substansial tentang sejarah modern Malaysia dan menerbitkan hasil penelitiannya tentang Kuala Lumpur modern dan peran Masyarakat Mandailing di Malaysia.

Dalam konteks kerja lapangan, sebagai bagian dari studi etnografi, para peneliti mengunjungi distrik Jelevu di Negeri Sembilan yang berjarak satu setengah jam perjalanan dari pusat kota Kuala Lumpur. Lapangan ini memungkinkan kami untuk mengamati berbagai permukiman desa yang ditempati oleh berbagai kelompok migran dan berbincang dengan penduduk setempat, termasuk seorang dosen, operator usaha kecil, dan staf museum di wilayah tersebut. Berbincang cukup lama dengan beberapa perwakilan perantau Mandailing di Kerangai Jelevu sangat mencengangkan dalam menemukan data yang relevan.

Dua desa yang dihuni oleh masyarakat Mandailing masih menggunakan bahasa Mandailing sehari-hari. Selain itu, mereka masih menjalankan adat istiadat Mandailing dalam proses sosialisasinya, seperti dalam upacara pernikahan dan kegiatan keagamaan Islam dalam lingkungan sosialnya. Selain melakukan observasi dasar, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa dan beberapa anggota masyarakat Mandailing di sana. Hasil penelusuran arsip dan etnografi kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai migrasi dan etnisitas di Malaysia bukanlah hal baru. Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti peran penting migrasi dalam membentuk demografi dan struktur sosial Malaysia. Namun, penelitian tentang Mandailing sebagai kelompok etnis minoritas masih sangat terbatas. Beberapa studi menunjukkan bahwa proses migrasi dan etnisasi di Malaysia sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara yang mengutamakan identitas Melayu. Meskipun demikian, kelompok-kelompok etnis minoritas, termasuk Mandailing, sering kali harus menavigasi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah kebijakan yang mendorong asimilasi.

Studi yang lebih spesifik tentang Mandailing mencatat bahwa meskipun mereka sering dianggap sebagai bagian dari komunitas Melayu yang lebih luas, Mandailing memiliki identitas budaya yang khas. Mereka memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda, yang menjadi sumber kebanggaan dan identitas komunitas. Namun, proses etnisasi di Malaysia, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bumiputera dan dominasi politik Melayu, memaksa komunitas ini untuk menyesuaikan diri, kadang-kadang dengan mengorbankan beberapa aspek identitas asli mereka.

Selain itu, literatur tentang politik etnik di Malaysia menunjukkan bahwa perbedaan etnis memainkan peran penting dalam struktur politik dan sosial negara. Kebijakan-kebijakan negara, seperti Dasar Ekonomi Baru (NEP), telah lama ditujukan untuk memperkuat posisi ekonomi Melayu, tetapi sering kali menimbulkan ketegangan antara kelompok etnis yang berbeda. Dalam konteks ini, komunitas seperti Mandailing harus menavigasi lanskap politik yang kompleks, di mana mereka harus menegosiasikan identitas mereka untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan politik negara.

Sumber sejarah yang berfokus pada masyarakat Mandailing di Malaya masih sangat terbatas. Ada beragam kelompok migran dari Sumatra hingga Semenanjung Malaya. Suku Mandailing di sini dikatakan sebagai kelompok pendatang terbesar kedua setelah suku Minangkabau. Baru pada tahun-tahun belakangan ini minat terhadap sejarah suku ini mulai tumbuh, terutama karena meningkatnya kesadaran di kalangan generasi muda dan minat untuk mengungkap asal-usul mereka serta rasa bangga terhadap identitas mereka. Sejumlah kecil karya akademis yang secara khusus membahas masyarakat Mandailing di Semenanjung Melayu berkonsentrasi secara khusus pada para pemimpin masyarakat terkemuka, terutama mereka yang memimpin migrasi, perjuangan anti-kolonial melawan Belanda, seperti Raja Asal, Sutan Puasa, Raja Bilah. Selain karya-karya mendasar dan rinci tersebut terdapat beberapa memoar yang diyakini dapat memberikan pencerahan tentang komunitas pendatang termasuk Mandailing dari Sumatera. Click or tap here to enter text.

Ada beberapa karya penting tentang Mandailing yang dihasilkan oleh Abdul Razak Lubis, seorang sarjana independen dari Penang dan keturunan diaspora Mandailing di Malaysia. Dalam menelusuri diaspora Mandailing, Lubis menulis tentang Tarikh Raja Asal, seorang bangsawan Mandailing yang mempelopori dan membawa kelompok migran Mandailing pertama ke semenanjung. Cara inilah yang dilakukan oleh kelompok pendatang termasuk Mandailing seperti yang diungkapkan Sadka. Dan diketahui bahwa umumnya para pendatang asal Sumatera ini menetap di wilayah pesisir Barat Semenanjung Malaya. Click or tap here to enter text. Lubis juga berkolaborasi dengan istrinya, Khoo Salma Nasution, dalam mempelajari perjuangan dan pengembaraan orang Mandailing yang tersebar di berbagai daerah di Malaysia. Konsentrasi orang Mandailing di sana setidaknya ada di beberapa negara bagian, antara lain Perak, Selangor, Pahang, and Kuala Lumpur. Click or tap here to enter text.

Karya penting Razak Lubis lainnya adalah tentang Sutan Puasa. Click or tap here to enter text. Dalam buku ini, Lubis memaparkan temuan-temuan pentingnya tentang peran dan kontribusi signifikan para pedagang Mandailing dalam membangun kota besar Kuala Lumpur. Kajian ini penting bagi upaya-upaya saat ini untuk mempertanyakan stereotip-stereotip tersebut dan merekonstruksi sejarah Malaysia dan dunia Melayu. Sejarah Kuala Lumpur, misalnya, tercatat dalam buku pelajaran sekolah di negara itu sebagai kota yang dirintis dan didirikan oleh Kapten Cina Ketiga Yap Ah Loy. Click or tap here to enter text. dan bukan Raja Abdullah, Click or tap here to enter text. seorang keturunan bangsawan Bugis tetapi oleh bangsawan mandailing abad 19 bernama Sutan Puasa. Peran Sutan Puasa dan orang-orang sezamannya, seperti Raja Dori, memberikan sejarah kewirausahaan yang penting, dan perspektif Mandailing memperumit model Melayu-Mandailing-Eropa dalam membaca sejarah ini yang sebelumnya telah digunakan untuk menceritakannya.

Kajian Abdul Razak Lubis tentang Sutan Puasa, pendiri Kuala Lumpur, menceritakan kisah yang berbeda dari kajian-kajian umum tentang sejarah Asia Tenggara dan Mandailing di

luar negeri. Secara umum, suku Mandailing, sebagai kelompok pendatang, dipandang bekerja sama dengan kesultanan-kesultanan Islam di Malaya dan sibuk bersaing dengan kelompok-kelompok etnis lain untuk bertahan hidup, bukan untuk mendapatkan hak politik atau kemerdekaan selama abad ke-19. Namun, Lubis memberi tahu kita bahwa hal ini tidak terjadi di Kuala Lumpur. Kisah tersebut menggambarkan penduduk asli dan para pendatang Mandailing yang menentang penjajahan di Asia Tenggara.

Seperti diketahui, historiografi wilayah Melayu telah lama dibentuk oleh politik etnis penjajahan dan negara-bangsa pascakolonial. Bersamaan dengan politik ini, terjadi pula reduksi banyak identitas dan komunitas menjadi tipologi Mandailing, Melayu, India, dan lainnya di Malaysia dan Singapura, serta pemingkakan “mosaik” etnisitas dan identitas ke dalam peta kesultanan dan konteks pembangunan nasional di Indonesia, dan berbagai negara lainnya. Stereotip yang menonjolkan perbedaan dan “keunikan” berbagai komunitas. Oleh karena itu, migrasi hampir selalu diidentikkan dengan komunitas Mandailing, Eropa, India, dan lainnya. Sebaliknya, komunitas Muslim dari seluruh wilayah, setidaknya di mata dan klasifikasi negara dan bangsa kolonial di Malaysia dan Singapura, semakin dimasukkan dalam kategori “Melayu.”

Historiografi wilayah Melayu telah lama dibentuk oleh politik etnis pemerintahan kolonial dan negara-bangsa pascakolonial. Politik yang menyertainya mereduksi banyak identitas dan komunitas menjadi tipologi Mandailing, Melayu, India, dan Lainnya di Malaysia dan Singapura, dan pemingkakan “mosaik” etnisitas dan identitas ke dalam peta kekaisaran/nasional di Indonesia dan di tempat lain. Stereotip yang menonjolkan perbedaan dan “keunikan” berbagai komunitas. Migrasi dengan demikian hampir selalu diidentikkan dengan Mandailing, Eropa, India, dan Lainnya, sementara komunitas Muslim berasal dari seluruh wilayah, setidaknya di

mata dan klasifikasi masyarakat kolonial. Negara-negara bangsa Malaysia dan Singapura semakin tergabung dalam "Melayu". Click or tap here to enter text. Dalam skema ini, kewirausahaan dan bisnis dikaitkan dengan kelompok asing, pertanian, dan pedesaan dengan orang Melayu. Pada akhir periode kolonial dan dekade-dekade awal kemerdekaan dan pembangunan bangsa, negara mengklaim peran mediasi, menyoroti dan memperkuat kategorisasi dan politik rasial ini. Meskipun para sejarawan dan antropolog semakin mengkritik kategorisasi dan klasifikasi ini, kategorisasi dan klasifikasi ini tetap menjadi kerangka historiografi yang kuat untuk memahami dunia Melayu. Studi tentang kewirausahaan dan bisnis umumnya dikaitkan dengan kelompok asing seperti Mandailing, Arab, Eropa, dan India. Sebaliknya, jaringan pedesaan pertanian dan agraris selalu diidentikkan dengan kelompok Melayu atau suku lokal lainnya, dalam kasus Indonesia. Oleh karena itu, minat studi ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat studi yang menyoroti kategorisasi konvensional dan politis yang bersifat rasial dengan memperkenalkan jaringan Mandailing sebagai pedagang imigran, pengusaha, guru dan ulama, dan pekerja.

Kajian Lubis di atas memperlihatkan kepada kita berbagai bagian masyarakat Mandailing di Semenanjung Malaya dengan menyorot berbagai studi kasus. Beberapa kisah ini terjadi di kota-kota seperti Penang dan Perak. Memang, kisah-kisah ini menggambarkan migrasi orang Mandailing dari desa ke kota, tetapi mungkin tidak mempertahankan citra orang Mandailing di Asia Tenggara sebagai penduduk desa di lembah-lembah di balik perbukitan. Selain itu, uraian Lubis tidak sepenuhnya menggambarkan masyarakat Mandailing di Semenanjung Malaya; oleh karena itu, kajian ini membahas berbagai peristiwa di desa-desa dan bahkan di hutan-hutan. Dengan kata lain, citra masyarakat Mandailing di Semenanjung Malaya dan masyarakatnya lebih beragam dan kompleks daripada yang umumnya dipikirkan. Melihat sejarah wilayah ini dari mobilitas ini memberikan alternatif terhadap narasi yang berfokus pada ekspansi asing dan perlawanan/kolaborasi Pribumi sambil mengaburkan batas-

batas antara asing dan pribumi dalam historiografi dunia Melayu. Ini menekankan keragaman dan ketidakstabilan identitas dan aliansi di wilayah tersebut, terutama keragaman dan "campuran" kemelayuan. Kisah Lubis tentang sejarah negara-negara Pantai Barat pada abad ke-19 juga menunjukkan bagaimana migrasi orang Tionghoa dan perluasan penambangan dan perdagangan timah ke wilayah tersebut mungkin tidak semata-mata atas undangan para penguasa atau pangeran Melayu yang bersaing di wilayah tersebut, tetapi bisa jadi atas perintah para pemimpin Mandailing di wilayah Kuala Lumpur. Migrasi dan pengerjaan timah ini dapat terjadi hanya atas undangan dan bantuan masyarakat Mandailing yang telah menetap di sana, yang menyoroti kerja sama dan hubungan yang erat antara para pemimpin dan jaringan masyarakat ini.

F. Sistematika Penulisan

Buku ini akan disusun dalam beberapa bab yang saling terkait, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan – Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metodologi yang digunakan.

Bab II: Sejarah Migrasi Mandailing ke Malaysia – Mengkaji sejarah migrasi Mandailing ke Malaysia, serta faktor-faktor pendorong migrasi tersebut.

Bab III: Proses Etnisasi Mandailing di Malaysia – Membahas bagaimana proses etnisasi terjadi di kalangan komunitas Mandailing, serta bagaimana mereka membentuk dan menegosiasikan identitas etnis mereka.

Bab IV: Transformasi Identitas dalam Politik Etnik Malaysia – Mengkaji perubahan identitas Mandailing dalam konteks politik etnik di Malaysia, serta bagaimana hal ini mempengaruhi peran sosial, politik, dan ekonomi mereka.

- Bab V: Penutup– Menyimpulkan temuan utama dari penelitian ini, serta membahas implikasi lebih lanjut dari proses migrasi dan transformasi identitas Mandailing.

BAB II Migrasi Mandailing ke Malaysia

Bagian ini merupakan penjelasan mengenai sejarah migrasi Orang Mandailing ke Malaysia yang merupakan bagian penting dari dinamika migrasi Nusantara pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Orang Mandailing, yang berasal dari Sumatera Utara, memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang kaya, dengan identitas yang kuat sebagai bagian dari kelompok etnis Batak. Migrasi mereka ke Malaysia terjadi dalam beberapa gelombang, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti tekanan politik dan ekonomi, maupun eksternal seperti daya tarik peluang ekonomi di semenanjung Malaya yang saat itu berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Melalui migrasi ini, Orang Mandailing membawa serta adat istiadat, agama, dan nilai-nilai budaya mereka, yang kemudian beradaptasi dengan konteks baru di Malaysia.

Gelombang migrasi besar pertama Orang Mandailing ke Malaysia dimulai pada pertengahan abad ke-19, saat terjadi ketidakstabilan politik di Sumatera. Selain itu, faktor-faktor seperti peperangan antar kerajaan lokal, intervensi kolonial Belanda, serta krisis ekonomi turut mendorong migrasi mereka. Malaysia, yang saat itu menawarkan peluang ekonomi di sektor perkebunan, menjadi destinasi utama bagi orang Mandailing yang ingin mencari kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. Mereka memilih berbagai wilayah di Malaysia, seperti Selangor dan Perak, yang kemudian menjadi pusat utama komunitas Mandailing di perantauan.

Migrasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi sosial-ekonomi para migran, tetapi juga membawa perubahan signifikan pada komunitas Mandailing sendiri. Pada awalnya, mereka menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru dan masyarakat lokal, tetapi seiring waktu mereka mulai mengembangkan jaringan sosial dan ekonomi yang kuat. Dampak awal migrasi terlihat dalam munculnya komunitas-komunitas Mandailing yang memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah tujuan

migrasi. Selain itu, migrasi ini juga membawa dampak dalam hal identitas, di mana Orang Mandailing mulai menavigasi antara mempertahankan tradisi asal mereka dan berasimilasi dengan kebudayaan lokal Malaysia.

A. Konsep Migrasi

Secara teoritis, migrasi dapat dipahami melalui berbagai kerangka kerja yang membahas berbagai aspek tentang mengapa dan bagaimana orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. E. G. Ravenstein: Sering disebut sebagai pelopor model dorong-tarik, Ravenstein adalah ahli geografi abad ke-19 yang "hukum migrasinya" meletakkan dasar untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi migrasi. Karyanya menekankan sifat ganda motivasi migrasi—faktor pendorong dan penarik. Teori Dorong-Tarik menyatakan bahwa migrasi dipengaruhi oleh faktor 'dorongan' yang memaksa individu untuk meninggalkan negara asal mereka (seperti kesulitan ekonomi, konflik, bencana alam, atau penganiayaan) dan faktor 'tarikan' yang menarik individu ke negara baru (seperti peluang kerja, stabilitas politik, dan kondisi kehidupan yang lebih baik). Model ini menyoroti sifat ganda dari motivasi migrasi. [Click or tap here to enter text.](#)

Selain itu, migrasi terutama didasarkan pada faktor ekonomi. Individu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari perpindahan, sering kali berusaha untuk memaksimalkan utilitas atau pendapatan mereka. M. S. Lee seorang pemikir utama yang terkait dengan perspektif neoklasik, karya Lee dibangun di atas teori ekonomi sebelumnya untuk menerapkan penalaran ekonomi pada keputusan migrasi, menekankan kondisi pasar tenaga kerja dan kesenjangan ekonomi. [Click or tap here to enter text.](#) Teori ini menekankan perbedaan pasar tenaga kerja antarwilayah sebagai pendorong migrasi yang signifikan, dengan menyatakan bahwa orang berpindah dari daerah dengan upah dan peluang kerja rendah ke daerah dengan upah lebih tinggi dan prospek pekerjaan yang lebih baik.

Pada tahun 1970-an, Wilbur Zelinsky memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori sistem migrasi melalui karyanya mengenai model transisi migrasi, yang meneliti hubungan

antara migrasi dan pembangunan serta bagaimana pola migrasi dibentuk oleh jaringan sosial dan historis. Di sini dipahami bahwa migrasi juga telah membentuk system atau semacam pola kerja berdasarkan keterhubungan antarnegara dan kawasan, hubungan historis, sosial, dan ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa migrasi bukanlah sesuatu yang acak, tetapi mengikuti pola tertentu berdasarkan jaringan yang sudah mapan, seperti ikatan keluarga, pengalaman migrasi sebelumnya, dan hubungan budaya. Immanuel Wallerstein, teori ini menyatakan bahwa migrasi merupakan produk sampingan dari struktur dan ketidaksetaraan ekonomi global yang lebih luas. Teori ini menyatakan bahwa migrasi mengalir dari negara-negara pinggiran (kurang berkembang) ke negara-negara inti (lebih maju) sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan kekayaan dan kesempatan, yang mencerminkan dinamika kapitalisme global. Analisa Immanuel Wallerstein terhadap sistem ekonomi global dan ketidaksetaraan dipahami sebagai kontribusinya dalam menghubungkan migrasi dengan dinamika kapitalisme dan stratifikasi global yang lebih luas.

Douglas S. Massey menemukan bahwa migran sering kali mengandalkan koneksi yang ada dengan keluarga, teman, atau anggota masyarakat di negara tujuan untuk mengatasi tantangan seperti pekerjaan, perumahan, dan integrasi. Jaringan sosial dapat secara signifikan mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan migrasi. Gary Becker, seorang ekonom yang mengembangkan teori modal manusia. Teori ini berfokus pada keterampilan, pendidikan, dan pengalaman individu yang memengaruhi keputusan migrasi mereka. Menurut perspektif ini, individu berinvestasi dalam modal manusia mereka (pendidikan dan keterampilan) untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar tenaga kerja, yang dapat mendorong mereka untuk bermigrasi guna mencari peluang yang lebih baik yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Transnasionalisme juga berkontribusi dalam memahami migrasi. Konsep ini mengacu pada proses yang digunakan para migran untuk mempertahankan koneksi, identitas, dan praktik

lintas batas. Konsep ini menekankan bahwa migrasi bukan sekadar gerakan satu arah, tetapi melibatkan hubungan yang berkelanjutan antara negara asal dan tujuan, yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di kedua tempat. Teori-teori ini mempertimbangkan peran budaya, identitas, dan norma sosial dalam memengaruhi keputusan migrasi. Teori-teori ini mengeksplorasi bagaimana latar belakang budaya membentuk persepsi individu tentang migrasi, motivasi mereka, dan pengalaman mereka di lingkungan baru.

B. Asal-Usul Mandailing

Dalam literatur, suku Mandailing sering diidentifikasi dan dikategorikan sebagai suku Melayu dari Sumatera atau sebagai sub-etnis Batak.⁴ Klasifikasi ini merupakan produk kolonial yang mengatur lalu lintas perdagangan dan menetapkan batas-batas perdagangan yang memudahkan para regulator. Studi Andaya mengidentifikasi dua prinsip umum yang sangat berharga bagi studi ini: gagasan bahwa identitas etnis merupakan proses yang berkelanjutan dan bahwa batas-batas suatu kelompok terus-menerus, meskipun terkadang tidak kentara, berubah berdasarkan keuntungan yang dirasakan. Selat Malaka selama dua milenium terakhir menawarkan tempat pengujian yang ideal untuk lebih memahami proses pembentukan etnis. Selat tersebut membentuk jalur air penting yang menghubungkan peradaban besar Asia Tenggara Timur dan Barat, dan perdagangan internasional yang mengalir melaluinya merupakan urat nadi wilayah tersebut. Andaya meneliti kelompok etnis di sepanjang selat untuk mendokumentasikan bagaimana mereka menanggapi perubahan di pasar internasional. Yang paling awal dan terpenting adalah orang Melayu, yang dominasinya berkontribusi pada “etnisasi” kelompok lain di seberang selat.

⁴ However, Munshi Abdullah counts Mandailing as a Malay linguistic group among others such as Minangkabau, Kerinci, Kalimantan Barat etc. (Drewes, 1947: vi).

Dengan sengaja mempolitisasi perbedaan dalam komunitas etnis mereka, orang Melayu mendorong munculnya kategori etnis baru, seperti Minangkabau, Aceh, dan, pada tingkat yang lebih rendah, Batak.⁵ Di sisi lain, Orang Laut dan Orang Asli mempertahankan penanda budaya khas mereka karena identitas mereka yang terpisah tetapi saling melengkapi terbukti menguntungkan secara ekonomi dan sosial bagi mereka. Komunitas etnis disajikan sebagai sesuatu yang cair dan berubah, menunjukkan porositas dan fleksibilitas yang konsisten dengan komunitas mandala di Asia Tenggara. Andaya menunjukkan bagaimana mempertanyakan etnisitas dapat menawarkan pandangan yang lebih bernuansa tentang hubungan etnis di suatu wilayah dengan salah satu keragaman bahasa dan budaya terbesar di dunia. Kreatif dan menantang, studi ini memunculkan banyak pertanyaan baru yang seharusnya menyegarkan dan mengubah orientasi historiografi Asia Tenggara.

Selain itu, narasi konseptual yang besar dalam memahami Mandailing adalah tradisi India. Di sini, teori Indianisasi sangat memengaruhi pemahaman konseptual tentang Mandailing karena kata Mandailing tercatat dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14 (1365). Click or tap here to enter text. Dalam buku sejarah dan sastra dari era Majapahit, dalam Pupuh XIII, kata Mandailing ditulis, dan nama-nama berbagai daerah di Sumatera tercantum sebagai bagian dari koloni Kerajaan Majapahit. Nama Mandailing dalam kitab ini mengisahkan tentang suatu bangsa asing dari India yang memeluk agama Hindu, budaya, peradaban, teknologi, sistem pemerintahan yang bercampur dengan penduduk asli setempat kemudian membentuk suatu bangsa, masyarakat, suku, etnis, budaya, dan peradaban baru sesuai dengan budaya masing-masing pada tahun 1030-1365 M.⁶ Namun,

⁵ As observed in various academic activities, the Malay world is represented by distinct but connected sub-groups that are still present and continue their cultural variables such as the ones in Aceh, Riau, Siak, Sarawak, Sambas, Riau, Minangkabau, Mindanao etc. (For the seminar papers see, *Seminar Adat Melayu Serantau*, 9-12 September 1996, Malaka; Hashim, 1989: 80-1).

⁶ Indeed, this cultural diffusion originated from India is argued to have happened in the centuries between 2nd A.D. and 15th A.D. (Niessen, 1985: 5-6; Loeb, 1935: 20, 21). And this Indian characteristic is also observed

Abdul Razak Lubis menganalisis secara kritis Indianisasi Mandailing ini. Ia mengatakan bahwa kebanyakan teori 'Indianisasi' terlalu menekankan Brahmanisme, Buddhisme, dan Sansekerta dalam 'Indianisasi' Asia Tenggara daratan dan kepulauan. Cara ini berakibat pada rendahnya penilaian terhadap budaya dan masyarakat penerima yang diakibatkan oleh posisi sentris nilai tinggi, bias budaya tinggi, dan objektifikasi yang sangat beradab yang diberikan kepada peradaban India vis-à-vis warisan Asia Tenggara, yang mereduksi yang terakhir menjadi penerima pasif dan peniru budaya yang lebih rendah. Jadi, suku Mandailing adalah salah satu suku yang mendiami daerah Tapanuli Selatan, sekarang tepatnya, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Daerah tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Lubis sendiri telah membantah teori ini sebagai bentuk generalisasi keunikan etnis. Konseptualisasi Mandailing berasal dari India dan merupakan bentuk superioritas antara kelompok besar dan kecil. Lubis menegaskan bahwa Mandailing adalah kelompok etnis yang unik dengan karakter dan identitasnya sendiri. Perspektif yang sangat berpusat pada budaya ini menafikan kapasitas transformatif dan asimilasi serta peminjaman atau adaptasi sosial-budaya yang kreatif (*genius loci* atau kejeniusan lokal) melalui seleksi dan modifikasi penduduk asli dalam proses indigenisasi atau lokalisasi pengaruh eksternal dan asing. Dengan demikian, keasyikan ini secara tidak sengaja atau tidak mencakup gagasan tentang difusi dan derivasi budaya serta model transplantasi yang menganalisis Asia Tenggara dari perspektif India secara eksklusif sambil sepenuhnya mengabaikan proses perubahan endogen.

Topografi tanah Mandailing sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh kondisi geologi dan aktivitas tektonik yang kompleks di wilayah ini. Wilayah Mandailing Natal secara umum memiliki karakteristik topografi yang didominasi oleh pegunungan dengan lereng yang relatif

in language aspect of Mandailing. Besides there are some artifacts referring to historical stages pertaining to this issue (Marbun, Rangkuti, 2023: 39, 40).

curam, terutama di bagian tengah dan selatan. Pegunungan Batang Gadis merupakan rangkaian pegunungan utama yang membentang di wilayah ini. Selain pegunungan, terdapat juga daerah perbukitan yang lebih landai. Perbukitan ini sering kali bertindak sebagai batas antara lembah sungai. Aliran sungai besar, seperti Batang Gadis, memiliki tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Di bagian barat, Mandailing Natal memiliki garis pantai yang cukup panjang. Pantai-pantai di wilayah ini umumnya berpasir dan landai.

Topografi yang bervariasi ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Mandailing. Beberapa pengaruh tersebut antara lain pertanian yang mengandalkan sistem terasering. Namun, pertanian padi juga telah sepenuhnya dikembangkan di daerah lembah sungai. Kedua, daerah pemukiman cenderung landai, seperti lembah sungai dan kaki bukit; ketiga, transportasi. Topografi pegunungan membuat pembangunan infrastruktur transportasi menjadi lebih sulit dan mahal; keempat, bencana alam. Daerah dengan topografi yang curam rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pendek kata, topografi tanah Mandailing yang bervariasi memberikan kekayaan alam yang unik dan, pada saat yang sama, tantangan bagi masyarakat.

Konsep yang kontroversial mengenai Mandailing adalah bahwa mereka merupakan hasil dari politik etnis karena pemetaan politik perdagangan kolonial, sehingga mereka dianggap sebagai bagian dari suku Batak. [Click or tap here to enter text.](#) Pelabelan Batak terhadap suku Mandailing pada umumnya tidak diterima oleh sebagian besar dari mereka karena konstruksi identitas mereka yang memiliki ikatan darah, garis keturunan, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda dengan suku Batak. Meskipun sebagian masih mengakui diri mereka sebagai bagian dari suku Batak. Banyak aspek yang mendasari kenyataan bahwa suku Mandailing merupakan bagian dari suku Batak, yaitu adat istiadat mereka, seperti bentuk aturan yang hampir sama, serta logat bahasa dan aksara

yang hampir sama. Bahkan ada marga yang hampir sama atau satu keluarga. [Click or tap here to enter text.](#)

Suku Mandailing mengenal sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem patrilineal tersebut, suku Mandailing menerapkan sistem marga, meliputi Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Rangkuti, dan Matondang yang juga dikenal dengan sebutan marga. Marga diwariskan kepada anak laki-laki. Dalam kedudukan ini, anak laki-laki dianggap lebih penting daripada perempuan dalam meneruskan marga. Suku Mandailing memiliki aksara yang berbeda dengan suku Batak.

Meskipun terdapat argumen mengenai bahasa Mandailing sebagai bagian dari suku Batak (Loeb, 1935: 20) bahasa Mandailing tetap berbeda dengan bahasa Batak, dengan intonasi yang lebih lembut dibandingkan dengan bahasa Angkola. Mayoritas penduduk yang masih menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa sehari-hari tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Selain dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Mandailing digunakan dalam upacara adat, ritual, dan kegiatan lainnya. Bahasa Mandailing mempunyai keunikan dalam hal bentuk, proses pembentukan kata, makna kata, dan ragam pemakaiannya, karena dalam bahasa Mandailing intonasi sangat mempengaruhi makna. Untuk model rumah adatnya salah satu rumah adat Batak Mandailing yang bernama “bagas godang”. Bagas godang artinya rumah besar, dimana bagas artinya rumah dan godang artinya besar. [Click or tap here to enter text.](#) Bagas godang dulunya merupakan tempat tinggal para raja yang memimpin suatu daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, kini bagas godang telah dijadikan sebagai peninggalan sejarah dan objek wisata. Bagas godang berbentuk persegi panjang dengan 25 tiang penyangga. Atapnya berbentuk limas dengan bentuk lancip di sisi kiri dan kanannya. Bahan baku bangunan bagas godang menggunakan kayu berkualitas tinggi, yang telah bertahan hingga ratusan tahun.

Beberapa perkembangan sejarah seperti pengaruh Paderi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Mandailing. Jadi, dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakatnya

memeluk agama Islam dengan menganut mazhab Imam Syafii. Meski begitu, sebagian kecil masyarakat Mandailing juga memeluk agama Kristen. Ajaran agama Kristen di wilayah Mandailing pertama kali berada di daerah Pakantan, yang dibawa oleh para penginjil dari Swiss dan Rusia pada tahun 1821. Oleh karena itu, gereja tertua di Tapanuli terletak di Huta Bargot. Komunitas Kristen Mandailing saat ini hanya sekitar satu persen, dan hampir semua umat Kristen Mandailing bersinode di Gereja Kristen Protestan Angkola, yang sama dengan komunitas Batak Angkola yang beragama Kristen. Click or tap here to enter text. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kesamaan budaya antara Angkola dan Mandailing, sehingga memungkinkan umat Kristen Angkola dan Mandailing berada di bawah sinode Gereja yang sama.

C. Gelombang Migrasi abad 19 di Malaysia

Sejarah migrasi di Malaysia sangat memengaruhi pembentukan identitas etnis di negara ini. Migrasi besar-besaran yang didorong oleh kebijakan kolonial Inggris menciptakan masyarakat yang tersegmentasi berdasarkan etnis, di mana identitas etnis dan agama menjadi elemen penting dalam struktur sosial. Click or tap here to enter text. Orang Melayu, Tionghoa, dan India memiliki peran yang berbeda dalam struktur ekonomi dan sosial, dan ini tercermin dalam hubungan antar kelompok yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, migrasi kontemporer juga mempengaruhi dinamika identitas etnis di Malaysia. Kehadiran tenaga kerja asing menambah kompleksitas hubungan antar kelompok etnis, baik antara warga lokal dengan imigran maupun antara kelompok etnis lokal itu sendiri.

Sejarah migrasi di Malaysia tidak dapat dipisahkan dari pembentukan struktur sosial, ekonomi, dan politik negara. Gelombang migrasi yang dimulai sejak era pra-kolonial hingga masa modern telah menciptakan masyarakat yang multikultural dengan dinamika hubungan etnis yang kompleks. Kebijakan kolonial Inggris menciptakan pembagian kerja berdasarkan etnis, sementara migrasi pasca-kemerdekaan terus memengaruhi struktur demografi dan

ekonomi Malaysia. Click or tap here to enter text. Di masa depan, pengelolaan migrasi tenaga kerja asing serta penciptaan harmoni antar kelompok etnis akan menjadi tantangan utama bagi pemerintah Malaysia.

Pada abad ke-19, Malaysia mengalami gelombang migrasi yang signifikan, terutama terkait dengan perkembangan ekonomi kolonial, yang dipengaruhi oleh kebijakan Inggris. Migrasi ini membawa dampak besar terhadap demografi, ekonomi, dan struktur sosial di Malaysia. Click or tap here to enter text. Pada masa itu, Inggris semakin memperluas pengaruhnya di Semenanjung Malaya (Malaysia). Click or tap here to enter text. Pemerintah kolonial Inggris mengelola wilayah ini, termasuk Singapura dan Penang, sebagai pusat perdagangan. Pembangunan ekonomi di Malaysia berpusat pada pertanian dan ekstraksi sumber daya alam, terutama timah dan karet. Untuk mendukung kegiatan ekonomi ini, Inggris membutuhkan banyak tenaga kerja, yang mendorong migrasi massal ke wilayah tersebut.

Salah satu gelombang besar migrasi tersebut datang dari komunitas Cina. Click or tap here to enter text. Sebagian besar migran Cina datang ke Malaysia karena faktor ekonomi dan sosial di negara asal mereka. Pada saat itu, Cina menghadapi pergolakan politik, kelaparan, dan kemiskinan. Kebanyakan migran berasal dari daerah pesisir seperti Guangdong dan Fujian. Orang Cina bekerja terutama di tambang timah dan sebagai buruh kontrak. Selain itu, mereka juga mendominasi perdagangan kecil dan menengah, serta membuka toko-toko dan bisnis di kota-kota yang berkembang.

Selain mereka, ada pula migrasi bangsa India. Click or tap here to enter text. Mayoritas imigran India berasal dari daerah selatan India, terutama Tamil Nadu. Mereka datang ke Malaysia karena kekurangan lahan dan kemiskinan di India, serta tawaran pekerjaan di perkebunan Inggris di Malaysia. Inggris mengimpor tenaga kerja India untuk bekerja di perkebunan karet dan kopi yang sedang berkembang. Kebanyakan orang India dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, tetapi ada juga yang bekerja sebagai buruh infrastruktur, termasuk

pembangunan jalan dan kereta api. Selain itu, beberapa orang India bekerja sebagai pegawai pemerintah rendah dan petugas administrasi.

Sama seperti buruh Cina, buruh India bekerja dalam kondisi yang keras di bawah sistem kontrak. Mereka terikat pada perusahaan perkebunan untuk masa kerja tertentu, sering kali dengan kondisi upah rendah dan tempat tinggal yang minim.

Orang Melayu juga mengalami migrasi, meskipun sebagian besar bersifat internal dan antar-pulau di Nusantara (wilayah Melayu). Orang Melayu dari Indonesia (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan) dan dari selatan Thailand (Pattani) bermigrasi ke Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan orang Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan, namun perkembangan ekonomi kolonial menyebabkan mereka beralih ke pekerjaan lain, termasuk bekerja di perkebunan atau menjadi pedagang kecil. Sebagai etnis pribumi, mereka juga banyak terlibat dalam administrasi lokal di bawah pemerintahan kolonial.

Gelombang migrasi ini berdampak terhadap Struktur Sosial yaitu terbentuknya masyarakat Multietnis. Orang Cina, India, dan Melayu membentuk tiga kelompok etnis utama yang hidup berdampingan, namun sering kali dengan sedikit interaksi antar-komunitas. Sistem kolonial Inggris juga memperkuat segregasi ini dengan memisahkan etnis-etnis ini dalam aktivitas ekonomi yang berbeda. Orang Melayu cenderung berada di sektor pertanian, orang Cina di pertambangan dan perdagangan, serta orang India di perkebunan.

Sistem ekonomi kolonial Inggris menciptakan perbedaan yang jelas antara kelompok-kelompok etnis. Orang Melayu sering dikaitkan dengan pekerjaan di desa, sementara orang Cina dan India lebih banyak terlibat di sektor perkotaan dan industri, yang pada akhirnya menciptakan jurang ekonomi antar etnis yang masih terasa hingga saat ini. Banyak imigran Cina dan India yang bekerja di sektor industri dan perdagangan mulai membentuk pusat-pusat kota, yang kemudian berkembang menjadi kota-kota besar

seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Ipoh. Orang Melayu, sementara itu, tetap berada di pedesaan dan fokus pada pertanian.

Pemerintah kolonial Inggris secara aktif mendorong migrasi karena mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Malaysia, khususnya timah dan karet. Melalui kebijakan kolonial, Inggris secara sistematis mengimpor tenaga kerja dari Cina dan India, menciptakan pola migrasi yang terorganisir dan terstruktur. Imigrasi massal ini memungkinkan pertumbuhan pesat sektor-sektor ekonomi kunci, seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini membuat Malaysia menjadi salah satu koloni paling kaya di Asia Tenggara, tetapi juga memperdalam jurang kesenjangan sosial dan ekonomi. Click or tap here to enter text.

Dalam memahami migrasi penduduk Sumatera ke Malaya, penting untuk melihat keterkaitan antara Malaya dan Sumatra, di mana secara geografis kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang dipisahkan oleh Selat Malaka yang relatif sempit. Keterkaitan ini memudahkan interaksi dan pertukaran antara kedua wilayah tersebut. Selain itu, kedua wilayah tersebut memiliki ekosistem yang sama dengan hutan hujan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Letak yang strategis menjadikan kedua wilayah tersebut sebagai jalur perdagangan penting antara India, Tiongkok, dan dunia Barat. Rempah-rempah, emas, dan produk lainnya menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit sangat kuat di kedua wilayah tersebut, sehingga membentuk kesamaan dalam budaya dan politik. Kemudian, bahasa dan budaya Melayu, seperti lingua franca di wilayah ini, telah menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat Sumatera dan Semenanjung Malaya. Islam, agama mayoritas di kedua wilayah tersebut, telah memperkuat ikatan budaya dan sosial. Meskipun berbeda-beda, adat istiadat di Sumatera dan Semenanjung Malaya memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal keluarga, perkawinan, dan kematian.

Sejarah migrasi menyoroti perlunya melampaui batas-batas kolonial/nasional dalam menulis sejarah dunia Melayu secara umum. Bangkitnya Kesultanan Malaka pada abad ke-15 - setelah Kesultanan Samudra-Pasai- sebagai kekuatan politik baru dan pusat perdagangan dan Islam di Kepulauan Melayu menandai era baru dalam transmigrasi antara masyarakat Semenanjung Melayu dan Sumatera. Mengingat posisi Malaka sebagai pusat perdagangan penting saat itu, dapat dipahami bahwa pedagang dari berbagai daerah, termasuk Sumatera, bermigrasi ke Malaka dan menyebar ke negara-negara Melayu lainnya. Fakta bahwa Malaka memiliki hegemoni politik atas sebagian Sumatera Tengah setelah Raja Majapahit menyerahkan Indragiri, Jambi, Tungkal, dan Siantan kepada penguasa Malaka, Sultan Mansur Shah (1459-1477) berarti bahwa migrasi orang-orang antara kedua sisi Selat Malaka dapat meningkat lebih banyak lagi karena Semenanjung Melayu dan sebagiannya. Secara teoritis dan klasik, migrasi dapat dipahami melalui berbagai kerangka kerja yang membahas mengapa dan bagaimana orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adanya motivasi migrasi—faktor pendorong dan penarik. Teori Dorong-Tarik menyatakan bahwa migrasi dipengaruhi oleh faktor ‘dorong’ yang memaksa individu meninggalkan negara asal mereka seperti kesulitan ekonomi, konflik, bencana alam, atau penganiayaan dan faktor ‘tarik’ yang menarik individu ke negara baru seperti peluang kerja, stabilitas politik, dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Model ini menyoroti sifat ganda dari motivasi migrasi.

Mobilitas orang Sumatera melintasi Selat Malaka dan Semenanjung Malaya merupakan kelanjutan dari mobilitas sebelumnya di zona maritim/sungai. Namun, hal itu didorong oleh perkembangan di kedua sisi Selat pada akhir abad ke-18 dan awal hingga pertengahan abad ke-19, dari gerakan Padri (1821-1837) dan ekspansinya ke tanah Batak, diikuti oleh ekspansi kolonial Belanda di Sumatera Barat dan Tengah pada tahun 1830-an, serta perang timah di semenanjung dari tahun 1850-an, dan perang di sekitar intervensi Inggris di Perak, Selangor,

dan negara bagian pertambangan timah Sungei Ujong pada tahun 1870-an.⁷ Gerakan Padri merupakan fenomena unik yang terjadi pada dekade awal abad ke-19. Gerakan ini disebabkan oleh ideologi Islam yang diimpor melalui sekelompok haji yang menyebarkan pemikiran Wahabi di Dataran Tinggi Sumatera Barat. Meskipun gagasan Jihad (prang sabil Allah) tidak asing bagi umat Islam di wilayah tersebut, cara mengungkap ideologi impor ini merupakan isu baru.

Penelitian menunjukkan bahwa orang Mandailing dikenal sebagai petani, pedagang, penambang terampil, administrator yang cakap, dan Muslim yang taat. Gelombang pertama migran Mandailing ke Negara-negara Melayu tiba sekitar abad ke-19 atau 1816-1832. Para migran awal, terutama pasukan padri dan beberapa bangsawan anti-kolonial, Tuanku Tambusai, Raja Asal, dan Abdullah Zawawi (Raja Laut), bermigrasi ke Malaka. Mereka melarikan diri dari kekacauan politik, terutama ketika Belanda membantu kelompok Adat melawan kelompok Padri, yang berdampak pada situasi politik, ekonomi, dan budaya. Sesampainya di Malaya, Raja Asal kemudian menetap di Klang untuk menambang timah.

Sementara itu, Raja Laut kembali ke Sumatra untuk membangun pasukan yang lebih besar guna melawan Belanda. Ia berada di sekitar perairan Sumatra, Malaka, untuk menyerang kapal-kapal dagang Belanda, Cina, Inggris, dan India yang melewati Selat Malaka. Sementara itu, Tuanku Tambusai berada di daerah terpencil di Negeri Sembilan.

Selama berada di tanah Melayu, para perantau Mandailing banyak terlibat dalam peperangan di Kerajaan tempat mereka tinggal. Dari peperangan tersebut, dimulailah episode gelombang Migrasi Mandailing dan penempatan mereka di berbagai negara di Malaysia. Pada

⁷ *Padri*, which is known as “religious community” developed under the influence of the religious ideology of Muhammad Wahhab had significant influence in West Sumatra including Mandailing communities rather than the other parts of Sumatra in the early 19th century. The followers of this imported religious ideology attempted to change significantly the established communal and traditional life in the region and left an undeniable psycho-religio impact upon the whole region (Radjab, 1950: 203).

tahun 1850, Raja Asal meninggalkan Klang dan bermigrasi ke Pahang bersama para pengikutnya. Ia juga seorang penambang timah dan menikah dengan salah satu anggota keluarga Bendahara Pahang. Keuntungan dari perdagangan timah tersebut digunakan untuk membiayai keluarganya dan para pengikutnya yang merupakan pasukan perang Padri.

Pada tahun 1857-1863, terjadi perang Pahang. Raja Asal, sebagai bagian dari keluarga Bendahara Pahang, terlibat di dalamnya. Perang saudara antara Raja Abdullah dan Raja Mahdi dalam Perang Klang menyebabkan migrasi baru bagi orang Mandailing. Ketika Raja Asal mendukung Raja Mahdi, ia meminta saudara Raja Laut untuk memasok sekitar 1000 pasukan Padri dari Mandailing sebagai pasukan bantuan—perang timah tahun 1871 antara kubu Raja Asal dan Sutan Naposo melawan Kapitan Yap Ah Loy. Penguasa asli menyerang Kuala Lumpur. Penguasa asli juga membawa pasukan bersamanya, orang Rao, Kerinci, dan Minang, yang merupakan pasukan Padri. Raja Asal membangun pemukiman Mandailing di Changkat Piatu, Air Kuning, dan Banir. Raja Asal dan para pengikutnya dari Orang Mandailing juga terlibat dalam perang melawan intervensi Inggris di kesultanan Perak, Selangor, negara bagian penambangan timah Sungei Ujong pada tahun 1870-an. Pola migrasi daerah pemukiman Mandailing pada masa penjajahan dan industri timah juga dimaksudkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan suaka politik dari kesultanan setempat. Mengingat adat Mandailing mirip dengan Minangkabau, maka sudah sejak lama dipahami bahwa kaum muda bermigrasi untuk menentukan nasibnya, merantau ke tempat-tempat yang jauh, dan memperoleh pengalaman baru. Oleh karena itu, masuk akal jika migrasi Mandailing akan terus berlanjut pada abad-abad berikutnya. Selain itu, penyebaran bangsa Mandailing ke Malaysia dapat dianggap

sebagai bagian dari globalisasi. Masyarakat Mandailing telah berhasil beradaptasi, melakukan hibridisasi, dan kreolisasi selama berabad-abad.⁸

Hal ini mengikuti beberapa perkembangan sosial ekonomi dan politik. Mengenai alasan sosial ekonomi, seperti pada abad-abad sebelumnya, tradisi migrasi orang Mandailing dan keterlibatan dalam kegiatan perdagangan dan pertambangan, terutama timah, merupakan faktor penyumbang yang signifikan terhadap migrasi besar-besaran Mandailing pada abad ke-19. Hanya sedikit orang seperti “Syaikh Jalid di Jalan Acheen” dan Pak Ma’som Mendeleng (Mandailing) di antara para migran Mandailing yang berinvestasi dalam bisnis haji sebagai broker sebelum bisnis tersebut dikuasai komunitas Arab di Penang pada abad ke-19. Dan pada periode ini juga terdapat beberapa pendatang Rawa dari Sumatera. Click or tap here to enter text. Para pendatang di Rawa dan Mandailing menggantikan para pedagang Aceh yang berkuasa yang beroperasi di Jalan Acheen setelah Perang Belanda terjadi pada tahun 1873. Teramati bahwa pada periode ini kelompok pendatang dari Sumatera dan beberapa wilayah lain di nusantara ikut serta dalam perkembangan politik di Malaya. Misalnya, “Rawas, Mandeling dan Bugis membantu Inggris dalam operasi militer mereka di Utara”. Click or tap here to enter text. Sementara orang-orang Rawa sibuk melakukan aktivitas intelektual seperti “penjual buku dan percetakan”, kelompok Mandailing tampaknya lebih banyak terlibat dalam perdagangan. Tradisi ini dikenal dengan istilah merantau, yakni keluar dari desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik, hal ini terkait dengan kodrat umum laki-laki Mandailing agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik pula. Tradisi ini masih dipraktikkan hingga kini. Sebagian dari mereka akhirnya kembali ke provinsi asal mereka di Tapanuli Selatan, membawa

⁸ Funston, “The Politics of Ethnicity in Malaysia.”

banyak pengalaman dan terkadang kekayaan. Namun, banyak pula yang tidak kembali, karena sudah membangun keluarga mereka di Semenanjung.

Industri pertambangan dan perdagangan timah berkembang pesat selama abad ke-19 seiring dengan dibukanya lebih banyak wilayah untuk kegiatan pertambangan, perbaikan sistem transportasi, dan jaringan perdagangan Inggris dan Belanda yang memfasilitasi penjualan ke pasar dunia. Hal ini memastikan banyaknya tenaga kerja penambang timah, sebuah profesi yang banyak diisi oleh para migran Mandailing. Di Kuala Lumpur, misalnya, seorang bangsawan, Sutan Naposo (Sutan Puasa), adalah seorang penambang timah yang sukses yang mempekerjakan banyak pengikutnya, yaitu orang Mandailing, termasuk Rao dan Kerinci, untuk bekerja di tambangnya. Raja Laut membuka desa Air Kuning dan tambang emas di Sungai Air Kuning. Sementara sebagian lainnya tinggal di desa Banir, mereka bertani dan menanam padi sebagai sumber pendapatan.

Alasan politik mungkin menjadi ciri paling menonjol migrasi Mandailing abad ke-19 dibandingkan dengan faktor sosial ekonomi karena alasan tersebut bukanlah alasan utama eksodus Mandailing pada periode sebelumnya. Perkembangan politik di Sumatera saat itu, yang ditandai dengan meluasnya pengaruh kolonial Belanda, memberikan dampak yang bertahan lama bagi masyarakat Mandailing. Peristiwa politik yang paling penting adalah Perang Padri (1821-1837), yang melibatkan tokoh-tokoh agama Mandailing dan banyak pendukung Mandailing yang melawan Belanda. Kekalahan mereka menyebabkan banyak orang Mandailing mengungsi ke negeri Melayu untuk menghindari penganiayaan dari Belanda.

Suku Mandailing yang tinggal di daerah Air Tawar, Changkat Kruing, Sitiawan, Manjung bermukim di Negara Bagian Perak pada masa penjajahan Inggris. Mereka bukan bagian dari pasukan Padri. Sebaliknya, migrasi mereka karena mencari suaka politik akibat tekanan kerja paksa Belanda di Sumatera. Gelombang migrasi ini datang melalui Pelabuhan

Labuan Bilik di daerah Labuhan Batu; mereka dikenal sebagai suku Pane. [Click or tap here to enter text.](#)

D. Mandailing di Kerangai-Tambahtin

Masyarakat Mandailing memiliki konsep dasar dalam memilih tempat untuk bermukim di Semenanjung. Konsep ini mengacu pada topografi wilayah tempat tinggal mereka. Pertama, lokasi wilayah tersebut secara fisik terisolasi tetapi memiliki akses air untuk kegiatan bercocok tanam padi dan pertambangan sesuai dengan prinsip adat tano rura (tanah dan air). Kedua, para pionir, perantau, dan pendatang Mandailing berusaha untuk menjadikan sebagian dari basis 'misi budaya' mereka untuk mendirikan harajoan (kerajaan). Ketiga, ketika hutah telah mencapai kapasitas manusia dan/atau ambang batas ekologisnya, ketegangan internal yang dinamis secara alami berkembang, yang mengakibatkan 'pemisahan' atau pembentukan desa baru. Konsep ini dapat ditemukan di salah satu kantong konsentrasi pendatang Mandailing di Negeri Sembilan, tepatnya di Kampung Kerangai, Kwala Klang, Jelebu Negeri Sembilan. Lokasi desa ini cukup jauh di bagian terpencil Negeri Sembilan, di Lembah Pertang, di antara perbukitan Sungai Pertang. Meskipun berada di dataran tinggi, namun cuacanya tidak dingin melainkan panas, dan kecukupan airnya juga relatif rendah. Dibandingkan dengan daerah asalnya, Kerangai seperti Padang Lawas, dengan perbukitan dan suhu udara yang panas. Sebagian besar penduduknya adalah suku Mandailing dengan marga Nasution, Hasibuan, Siregar, Lubis, Pulungan, Batubara, dan Daulay. Di Kerangai, terdapat sekitar 70 keluarga, dan di Tambahtin, terdapat sekitar 130 keluarga.

Abu Bakar bermarga Harahap, usia 51 tahun, sebagai kepala kampung Kerangai, mantan politisi UMNO, menceritakan kepada kami bahwa orang tua mereka datang dan membuka kampung Kerangai ini sekitar tahun 1920an. Sebelumnya, alur migrasi mereka bergerak dari Sumatera ke Tanjung Muallem-Sungai Bil sekitar tahun 1895, lalu, ke Langkap Kuala Bilah tahun 1911. Dari sini kemudian mereka menuju Kerangai membuka

perkampungan. Cerita pak Harahap, sebagai generasi ketiga, berdasarkan ingatan cerita dari orang tuanya, catatan silsilah, dan hasil kunjungan ke tanah Mandailing. Kampung leluhur pak Harahap berasal dari Pijor Koling Padang Bolak Gunung Tua (sekarang termasuk dalam wilayah kabupaten Padang lawas Utara, Sumatera Utara).

Istrinya yang bermarga Nasution ini masih trampil memasak ikan mas arsik dan ikan asap, kuliner khas Mandailing. Pak Harahap juga masih menerima pesanan kuliner khas Mandailing apabila ada masyarakat Mandailing di Kuala Lumpur yang mengadakan acara pernikahan atau acara sejenisnya. Di desa ini masyarakat masih membudayakan gotong royong, gotong royong, untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat seperti pembangunan masjid dan kegiatan keagamaan. Sebagai kepala desa, Pak Harahap selalu memimpin acara adat Mandailing seperti Upa-upa, dan kegiatan kenduri. Upa-upa, atau Mangupa merupakan upacara adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing yang lahir dari penghayatan leluhur masyarakat terhadap adanya sosok mahluk gaib, yang memiliki kekuatan, yang mengatur alam semesta, termasuk kehidupan manusia agar keselamatan dan kesuksesan mudah diraih. Biasanya, upacara Mangupa dilaksanakan pada acara pernikahan, kelahiran bayi, penyambutan tamu penting, memasuki rumah baru dan bagi masyarakat yang baru saja tertimpa musibah. Kepercayaan yang berkembang di masyarakat adalah upacara upa-upa dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, seperti bebek, ayam, domba, yang melibatkan banyak anggota keluarga bahkan seluruh masyarakat desa. Tidak ada kewajiban bagi mereka yang baru saja selamat dari musibah untuk menyediakan makanan adat pada upacara ini, kecuali menyediakan tempat dan waktu untuk menerima kedatangan keluarga. Mereka yang baru saja selamat dari musibah akan disuapi nasi kunyit, ayam panggang, dan telur ayam rebus oleh keluarga. Selanjutnya, tuan rumah akan mengundang salah satu kakek (ompung) atau paman yang sedang melaksanakan upacara untuk menyampaikan pesan atau wejangan. Pertama-tama, Ompung/Mamak laksana akan menaburkan nasi dan kunyit pada korban dan mengangkat nasi

kunyit kira-kira sejengkal di atas kepala. Ia akan memanggil nama korban dan kemudian memberikan kata-kata nasihat. Nasi kunyit dan ayam panggang, meskipun harganya tidak mahal, memiliki makna yang sangat berharga. Nasi kunyit dan ayam panggang dipercaya mampu menghilangkan segala perasaan buruk dan aura negatif, dengan harapan orang tersebut akan kembali sehat dan dijauhkan dari rasa takut yang selama ini menyimpannya.

Pada puncak acara, para peserta upacara dipersilakan menikmati hidangan yang telah disiapkan sebelumnya. Acara ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh imam atau khatib di desa tersebut. Setelah makan bersama dan berdoa untuk keselamatan semua, para tamu dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing setelah terlebih dahulu berjabat tangan dengan tuan rumah.

Masyarakat Mandailing Kerangai masih menyambung tali persaudaraan Mandailing dengan desa asal mereka. Salah satu caranya adalah dengan selalu menghadiri upacara adat perkawinan atau bentuk kenduri lainnya yang diselenggarakan oleh keluarga mereka di Sumatera. Masalah pembiayaan keberangkatan para utusan tersebut dihimpun melalui sumbangan dari warga masyarakat. Bagi mereka, menghadiri undangan tersebut wajib dilakukan guna menjaga hubungan baik dengan desa asal mereka. Selain itu, untuk menyambung tali persaudaraan Mandailing, sebagian dari mereka sengaja mencari pasangan hidup dari tanah leluhur mereka.

Bapak Harahap menuturkan bahwa masyarakat Mandailing di Kerangai masih menggunakan bahasa asli Mandailing dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan keluarga maupun warga masyarakat desa. Beliau mengatakan, bahasa dan kegiatan adat di sini mudah diwariskan karena letak desa yang cukup terpencil sehingga lambat menerima pengaruh dari luar, padahal teknologi media sosial dan internet sudah berkembang pesat. Namun, ada beberapa adat yang sudah tidak mereka lakukan lagi seperti manortor dan gordang sambilan. Manortor merupakan tarian yang mengiringi alunan gordang sambilan. Adat ini

sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat Mandailing di Kerangai karena adanya larangan dari guru agama mereka. Adat ini dianggap mengandung unsur mistis dan syirik yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid dalam Islam.

Sudah ada beberapa sponsor budaya seperti dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menghibahkan Gordang Sambilan kepada mereka namun mereka tetap tidak menerima dan menggunakannya dalam upacara adat. Di Malaysia, Gordang Sambilan biasanya dipamerkan dalam pameran budaya tingkat nasional di pusat kota.

Sebagai pengganti tradisi manortor dan gordang sambilan dalam upacara adat, masyarakat membaca Nazam. Nazam merupakan syair yang berisi ajaran tauhid, kisah hidup Nabi Muhammad, dan nasihat hidup, yang ditulis dalam aksara Arab Melayu, kemudian dinyanyikan dengan irama Mandailing. Nazam ini juga dibacakan oleh kepala desa dalam acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj.

Selain Kerangai, nama lain desa yang didiami masyarakat Mandailing adalah Desa Tambahtin. Jaraknya kurang lebih 5 kilometer dari Kerangai. Di sana, kami bertemu dengan kepala desa, Bahri Nasution, generasi ketiga, berusia 54 tahun dan seorang guru SMA. Ia menuturkan, leluhurnya merupakan orang Mandailing yang tinggal di Janji Raja, Napitu Huta, Rokan Hulu, Riau. Menurutnya, kehadiran mereka di sana untuk membantu masyarakat setempat dari perambahan hutan yang dilakukan oleh orang Minang. Atas peran mereka, raja setempat memberikan hadiah dan itulah sebabnya tanah tempat tinggal mereka disebut Janji Raja.

Dalam dinamika kehidupan selanjutnya, seorang guru agama bernama Syekh Abu Qasim, membawa sekelompok orang Mandailing dari Rokan Hulu ke Desa Tambahtin. Syekh Abu Qasim merupakan pakar tarekat yang mengembara dan belajar di beberapa tempat seperti Jazirah, Patani, Singapura, dan Aceh. Konon, ia merupakan salah satu murid Syekh Abdurr-

rauf Assingkili. Prinsip-prinsip ajaran hidup yang diajarkan Syekh Abu Qasim sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Mandailing di Tambahtin. Bahri Nasution memaparkan ajaran tersebut berupa tiga hukum Al-Quran-Hadits, hukum akal, dan hukum adat. Setiap hukum harus mendapatkan porsinya dalam kehidupan, terutama dikontekstualisasikan dan direlevansikan sesuai kebutuhan agar kehidupan aman dan bebas dari konflik.

Mereka bukan bagian dari pasukan Padri, melainkan pengikut seorang guru agama Islam yang merupakan pengikut tarekat tersebut. Sebagian besar lahan pertanian penduduk memiliki kebun yang meliputi durian, rambutan, jagung, karet, dan kelapa sawit (Durand, Curtis, 2013: 66). Pertanian padi telah dilakukan di sini sejak mereka membuka desa dan berakhir pada tahun 1970-an karena defisit air.

Nama mereka tidak lagi menggunakan nama-nama khas Mandailing seperti panusunan dan mara, tetapi mereka telah menggunakan nama-nama Arab seperti kebanyakan orang Melayu. Pencantuman nama keluarga juga tidak dicantumkan dalam dokumen administrasi kewarganegaraan.

Bab III

Politik Etnik, Menjadi Melayu dan Budaya Hibrid

Bagian ini menjelaskan bagaimana politik etnik secara konseptual dan di level praktis, kemudian bagaimana proses orang Mandailing menjadi Melayu di Malaysia, dan pada akhirnya mengalami hibridasi budaya. Dalam konteks masyarakat multietnis di Malaysia, politik etnik memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan struktur sosial. Identitas etnik tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai alat politik yang menentukan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan status sosial.⁹ Proses "menjadi Melayu," misalnya, melibatkan dinamika politik etnik di mana individu atau kelompok etnis minoritas beradaptasi

⁹ J Funston, "The Politics of Ethnicity in Malaysia," *Pacific Affairs* 53, no. 3 (1980): 376–77.

dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan etnis Melayu, sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kesatuan nasional. Kebijakan negara seperti Dasar Ekonomi Baru (NEP) telah memperkuat peran dominan Melayu, memengaruhi kelompok-kelompok etnis minoritas untuk menyesuaikan identitas mereka, baik secara formal maupun informal, guna memperoleh manfaat sosial, politik, dan ekonomi.

Namun, proses "menjadi Melayu" tidak selalu berlangsung secara linear atau total. Sebaliknya, dalam konteks interaksi antarbudaya, muncul fenomena budaya hibrid, di mana elemen-elemen dari berbagai identitas etnis, seperti Tionghoa, India, dan etnis minoritas lainnya, bercampur dan menciptakan identitas baru yang dinamis.¹⁰ Budaya hibrid ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial di Malaysia, di mana masyarakat tidak hanya mengasimilasi norma-norma dominan, tetapi juga mempertahankan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya asli mereka.¹¹ Dalam proses ini, lahirlah bentuk-bentuk identitas baru yang melintasi batas-batas etnis tradisional, sekaligus mencerminkan keragaman dan fleksibilitas identitas dalam tatanan sosial-politik yang sangat dipengaruhi oleh politik etnik.¹²

A. Konsep Etnisasi

Etnisasi merupakan konsep sosiologi untuk menjelaskan realitas social bagaimana identitas etnis diciptakan, dipertahankan, dan diubah dari waktu ke waktu.¹³ Teori ini menyatakan bahwa etnisitas bukanlah karakteristik tetap atau esensial dari suatu kelompok,

¹⁰ L. Y Andaya, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka* (University of Hawaii Press., 2017).

¹¹ Erkan Toğuşlu and Johan Leman, "Translocality and Hybridization in Current Modern Islamic Activism," *Modern Islamic Thinking and Activism* (Universitaire Pers Leuven, 2014), <https://doi.org/10.2307/j.ctt13x0mrn.13>; Nederveen Jan Pieterse, "Globalization as Hybridization," in *Sociology of Globalization*, ed. Keri E. Iyall Smith (Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9780429493089>.

¹² Francesco L Sinatora, "Hybridity, Secular Identities and Radical Islamic Discourse," *Language, Identity, and Syrian Political Activism on Social Media* (Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429443527-6>; Toğuşlu and Leman, "Translocality and Hybridization in Current Modern Islamic Activism."

¹³ Joel S. Kahn, "Explaining Ethnicity: A Review Article," *Critique of Anthropology* 4, no. 16 (January 24, 1981): 43–52, <https://doi.org/10.1177/0308275X8100401603>; Christian Karner, *Ethnicity and Everyday Life, Ethnicity and Everyday Life*, 2007, <https://doi.org/10.4324/9780203030479>.

melainkan konstruksi sosial yang muncul melalui berbagai proses dan interaksi. **Fredrik Barth**, salah satu tokoh penting dalam studi etnisitas, mengeksplorasi bagaimana kelompok etnis terbentuk dan dipertahankan, dan bagaimana perbedaan budaya menciptakan batasan social. Cara-cara di mana etnisitas memengaruhi identitas sosial, interaksi, dan struktur masyarakat dan dampak perbedaan budaya pada kohesi dan konflik sosial.¹⁴ Secara keseluruhan, Barth menekankan pentingnya memahami batasan etnis dalam konteks organisasi sosial dan keragaman budaya. Barth menekankan bahwa etnisitas bukanlah tentang isi budaya atau atribut tetap dari kelompok, melainkan tentang proses sosial yang membedakan kelompok-kelompok etnis melalui interaksi dan batas-batas yang mereka ciptakan.

Etnisisasi adalah proses di mana identitas etnis sebuah kelompok menjadi lebih jelas atau terfokus, sering kali sebagai hasil dari interaksi sosial, politik, atau ekonomi dengan kelompok lain.¹⁵ Dalam konteks Malaysia, etnisisasi telah dipengaruhi oleh kebijakan negara, kolonialisme, serta perubahan sosial dan politik pasca-kemerdekaan.¹⁶ Studi etnisitas, menekankan bahwa etnisitas bukanlah kategori biologis atau kultural yang tetap, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk dan dikelola melalui interaksi antar kelompok. Batas-batas etnis lebih penting daripada konten kultural di dalamnya, yang berarti bahwa identitas etnis dapat berubah tergantung pada konteks politik dan sosial. Hal ini relevan dalam kasus Mandailing di Malaysia, di mana proses pemelayuan (Melayunisasi) menjadi salah satu bentuk etnisisasi yang terjadi di bawah pengaruh negara dan kebijakan afirmatif untuk bumiputera.¹⁷

¹⁴ Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Waveland Pres, 1998).

¹⁵ Rogers Brubaker, "Ethnicity without Groups," *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie* 43, no. 2 (2002): 163–89; Karner, *Ethnicity and Everyday Life*.

¹⁶ Funston, "The Politics of Ethnicity in Malaysia"; Frederik Holst, *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia* (Routledge, 2012), <https://doi.org/10.4324/9780203121955>.

¹⁷ Nicholas Tarling and Edmund Terence Gomez, *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation, The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation*, 2008, <https://doi.org/10.4324/9780203932162>; Anthony D. Smith,

Perbedaan etnisitas tidak semata-mata didasarkan pada faktor-faktor kultural yang mendasar seperti bahasa, agama, atau adat istiadat, tetapi pada batas-batas sosial yang memisahkan kelompok satu dari kelompok lainnya.¹⁸ Batas-batas ini bersifat cair dan terus dinegosiasikan dalam konteks interaksi antar kelompok. Misalnya, dalam konteks Malaysia, kelompok Mandailing, meskipun memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dari Melayu, seperti penggunaan bahasa Mandailing dan adat Gordang Sambilan, memilih untuk berintegrasi ke dalam identitas Melayu demi mendapatkan akses ke hak-hak istimewa bumiputera. Proses pemelayuan ini adalah bentuk penegosiasian batas etnis, di mana Mandailing beradaptasi dengan nilai-nilai dominan Melayu-Islam yang diakui oleh negara. Dengan kata lain, batas-batas etnisitas Mandailing menjadi lebih cair karena insentif politik dan ekonomi yang ditawarkan oleh negara kepada bumiputera.

Dalam proses etnisisasi, ada perubahan dalam identitas kultural yang terjadi ketika kelompok-kelompok seperti Mandailing berinteraksi dengan kelompok etnis lain. Pada satu sisi, integrasi ke dalam identitas Melayu melalui pemelayuan memungkinkan mereka mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya sebagian dari identitas kultural Mandailing yang unik. Misalnya, penggunaan bahasa Mandailing semakin berkurang di kalangan generasi muda Mandailing di Malaysia, dan praktik-praktik adat tertentu mulai memudar di luar konteks perayaan resmi. Dalam hal ini, proses etnisisasi juga mencakup aspek-aspek asimilasi di mana budaya yang lebih lemah secara bertahap diadopsi oleh kelompok dominan,¹⁹ dalam hal ini budaya Melayu yang dipromosikan oleh negara.

“Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism,” *International Affairs* 72, no. 3 (July 1996): 445–58, <https://doi.org/10.2307/2625550>.

¹⁸ Barth, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*.

¹⁹ Tarling and Gomez, *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation*; Kahn, “Explaining Ethnicity: A Review Article.”

Namun, etnisasi tidak selalu menghasilkan asimilasi penuh. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada komunitas Mandailing di Malaysia, identitas etnis tetap dipertahankan pada tingkat tertentu meskipun ada proses integrasi ke dalam identitas Melayu. Misalnya, banyak orang Mandailing masih merayakan upacara-upacara adat tertentu dan menjaga hubungan dengan komunitas Mandailing di Sumatra. Teori Barth menekankan bahwa identitas etnis adalah proses yang dinamis, dan kelompok-kelompok etnis sering kali terlibat dalam penciptaan ulang identitas mereka melalui interaksi dengan kelompok lain dan pengaruh eksternal. Dalam konteks ini, identitas Mandailing mungkin tetap ada meskipun sebagian besar elemen budaya mereka diintegrasikan ke dalam identitas Melayu.

Di sisi lain, etnisitas dapat menjadi alat politik dalam konteks negara yang memiliki kebijakan berbasis etnis. Di Malaysia, kebijakan afirmatif yang memberikan hak-hak istimewa kepada bumiputera telah menciptakan insentif bagi kelompok-kelompok seperti Mandailing untuk mengadopsi identitas Melayu.²⁰ Hal ini mengubah dinamika batas etnis, di mana perbedaan kultural antara Mandailing dan Melayu semakin kabur karena keuntungan politik dan ekonomi yang terkait dengan pengidentifikasian diri sebagai bumiputera. Di sini, dapat dipahami bahwa konstruksi sosial etnisitas sangat relevan untuk memahami bagaimana perbedaan budaya antara kelompok Mandailing dan kelompok etnis lain di Malaysia dipertahankan, dinegosiasikan, atau diintegrasikan dalam konteks sosial-politik modern Malaysia.

Etnisasi menolak pandangan esensialis tentang etnisitas, yang mengasumsikan bahwa kelompok etnis memiliki karakteristik yang melekat dan tidak berubah. Sebaliknya, teori ini menekankan perspektif konstruksionis, yang melihat etnisitas sebagai konsep yang cair dan dinamis yang dibentuk oleh faktor sosial, politik, dan historis. Etnisasi melibatkan penciptaan

²⁰ Holst, *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia*.

dan pemeliharaan batas-batas antara kelompok etnis. Batas-batas ini dapat didasarkan pada bahasa, agama, budaya, atau karakteristik bersama lainnya. Batas-batas ini dapat diperkuat melalui ritual, simbol, dan narasi. **Benedict Anderson** dalam karyanya "imagined communities" (komunitas terbayang),²¹ berpendapat bahwa etnisitas dan nasionalisme adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui media, sejarah, dan narasi bersama yang menghubungkan individu dengan komunitas yang lebih besar.

Dalam proses pembentukan identitas etnis tersebut penting menggunakan simbol, mitos, ingatan kolektif, dan nilai-nilai budaya. Etnisitas sebagai sesuatu yang memiliki akar sejarah yang mendalam dan terus mempengaruhi politik dan identitas masa kini.²² Identitas etnis dibentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari, termasuk dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial yang lebih besar **dan** etnisitas digunakan dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari. etnisitas sebagai sebuah proses dinamis yang tidak selalu bergantung pada kelompok-kelompok yang didefinisikan dengan jelas. Di sini, pentingnya mempertimbangkan konteks dan interaksi sosial yang membentuk identitas etnis, yang menunjukkan bahwa etnisitas lebih banyak tentang praktik dan hubungan daripada tentang kategori-kategori yang stabil.

Studi terkait etnisitas memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana etnisitas dibentuk, dipelihara, dan digunakan dalam masyarakat, baik sebagai alat identifikasi maupun sebagai instrumen politik dan sosial. Etnisasi sering kali melibatkan pengembangan rasa solidaritas "dalam kelompok" dan persepsi perbedaan "luar kelompok".²³ Hal ini dapat menimbulkan perasaan memiliki dan dikucilkan, serta persaingan dan konflik. Etnisasi sering

²¹ Benedict Anderson, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism," in *The New Social Theory Reader* (Routledge, 2020), 282–88.

²² Benedict Anderson, "Under Three Flags Anarchism and the Anti Colonial Imagination.Pdf," n.d.; Benedict Anderson, "Imagined Communities," *Nationalism*, 1991, <https://doi.org/10.1080/1382557042000294701>.

²³ Anderson, "Under Three Flags Anarchism and the Anti Colonial Imagination.Pdf."

kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan ketimpangan. Kelompok dominan dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mendefinisikan dan mengendalikan identitas etnis, sementara kelompok terpinggirkan dapat menolak definisi ini dan menciptakan narasi etnis mereka sendiri.

Pembentukan dan evolusi identitas etnis dibentuk oleh peristiwa dan proses sejarah, seperti migrasi, kolonisasi, dan konflik.²⁴ Faktor-faktor ini dapat memengaruhi cara batas-batas etnis ditetapkan dan dipertahankan. Etnisasi berarti proses mereduksi perbedaan antara orang atau kelompok menjadi ciri atau penampilan yang dianggap “etnik”. Meskipun orang dapat mengidentifikasi dirinya dengan identitas kelompok, orang sering kali dijadikan etnik oleh orang lain yang menganggap karakteristik atau perilaku tertentu berasal dari mereka karena asumsi identitas etnis mereka.

Kesenjangan teoritis mengenai etnisitas mengacu pada area dan kompleksitas yang belum dieksplorasi dalam cara identitas etnis dibentuk, diekspresikan, dan dialami dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Etnisasi adalah proses di mana atribut, perilaku, atau praktik tertentu dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu, yang sering kali menyederhanakan atau menggeneralisasi pengalaman individu berdasarkan etnisitas mereka. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kesenjangan teoritis ini. Sering kali terjadi kebingungan mengenai apa yang dimaksud dengan 'etnisitas' dibandingkan dengan identitas lain, seperti ras, kebangsaan, atau budaya. Para akademisi dapat menggunakan definisi atau kerangka kerja yang berbeda, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian dan aplikasi teoritis.

²⁴ Mary Turnbull, “Malaysia: The Nineteenth Century,” in *South East Asia Colonial History V2* (Routledge, 2021), 242–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003101673>; J. P. Abbott and S. Gregorios-Pippas, “Islamization in Malaysia: Processes and Dynamics,” *Contemporary Politics* 16, no. 2 (2010): 135–51; Lian Kwen. Fee, “The Construction of Malay Identity across Nations: Malaysia, Singapore, and Indonesia,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 157, no. 4 (2001): 861–79.

Kajian-kajian tersebut mungkin tidak sepenuhnya menangkap sifat identitas etnis yang cair dan kontroversial, terutama dalam konteks multikultural atau diaspora. Persinggungan etnisitas dengan kategori sosial lain (seperti kelas, gender, dan agama) perlu dieksplorasi lebih lanjut.²⁵ Teori-teori terkini mungkin tidak secara memadai membahas bagaimana persimpangan ini membentuk pengalaman dan identitas individu. Dalam konteks Politik, etnisasi sering terjadi dalam konteks politik tertentu yang dapat memengaruhi pembentukan identitas dan dinamika kelompok. Ada kebutuhan untuk kerangka kerja teoritis yang sepenuhnya memperhitungkan pengaruh struktur politik, konflik, dan hubungan kekuasaan pada identitas etnis.

Ketika masyarakat menjadi lebih saling terhubung, dampak globalisasi pada identitas etnis dan ekspresinya menimbulkan tantangan teoritis.²⁶ Bagaimana kekuatan global memengaruhi identitas etnis lokal? Bentuk-bentuk identitas etnis baru apa yang muncul di dunia yang mengglobal? Terdapat kesenjangan penelitian empiris dengan nuansa etnisasi dalam konteks yang beragam. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana etnisasi memengaruhi hubungan sosial, pembangunan komunitas, dan agensi individu. Bagaimana etnisasi berkontribusi pada stereotip, prasangka, dan praktik diskriminatif, dan bagaimana hal-hal ini dapat ditentang atau diubah. Dengan mengatasi kesenjangan ini, para akademisi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang etnisitas dan cara kompleks di mana etnisitas membentuk perilaku manusia dan struktur sosial.

B. Proses Etnisasi di Malaysia

²⁵ "Malaysia: Women, Labour Activism and Unions," *Women and Labour Organizing in Asia* (Routledge, 2007), <https://doi.org/10.4324/9780203938225-12>; JULIE CHERNOV HWANG, *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis Di Indonesia, Malaysia, Dan Turki*, 2011.

²⁶ Ulrich Beck, *What Is Globalization?* (Jhon Wiley & Sons, 2018); Pieterse, "Globalization as Hybridization."

Proses etnisasi di Malaysia memiliki akar historis yang dalam, terutama terkait dengan kebijakan kolonial Inggris dan dinamika politik pasca-kemerdekaan. Etnisitas di Malaysia bukan hanya sekedar fenomena kebudayaan, melainkan juga menjadi alat politik yang kuat. Kebijakan kolonial yang memisahkan kelompok etnis berdasarkan peran ekonomi dan sosial, dikombinasikan dengan politik identitas yang dilanggengkan setelah kemerdekaan, telah mengukuhkan garis-garis etnis dalam masyarakat Malaysia.²⁷

Pada abad ke-19, kebijakan kolonial Inggris di Malaya secara eksplisit mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan etnisitas. Migrasi orang Tionghoa dan India ke Malaya sebagai tenaga kerja di sektor-sektor perkebunan dan tambang menciptakan stratifikasi sosial yang berdasarkan pada etnis.²⁸ Orang Melayu ditempatkan di sektor pertanian tradisional, sementara orang Tionghoa mendominasi sektor perdagangan, dan orang India menjadi buruh di perkebunan. Kebijakan ini memisahkan kelompok-kelompok etnis berdasarkan sektor ekonomi, sehingga memperkuat identitas etnis sebagai ciri utama kehidupan sosial di Malaya.²⁹ Kebijakan ini dikenal sebagai bentuk "pembagian kerja etnis",³⁰ di mana etnisitas digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengontrol masyarakat. Pembagian ini tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga memperkuat identitas etnis masing-masing kelompok, memperkuat proses etnisasi di Malaysia.

Masyarakat Mandailing adalah para migran dan penduduk di setiap tempat di Semenanjung Malaya. Selain itu, kehadiran mereka tidak hanya untuk interaksi dan integrasi, tetapi juga untuk konflik dan perlawanan. Topik-topik pembahasan di sini diantisipasi lebih jauh untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang masyarakat Mandailing di

²⁷ Turnbull, "Malaysia: The Nineteenth Century"; Sharmani Patricia. Gabriel, "Translating Bangsa Malaysia: Toward a New Cultural Politics of Malaysian-Ness," *Critical Asian Studies* 43, no. 3 (2011): 349–72; Barbara Watson Andaya and Leonard Y Andaya, *A History of Malaysia* (London: MacMillan Press Ltd., 1982).

²⁸ Amri Baharuddin. Shamsul, "Nations-of-Intent in Malaysia," in *In Asian Forms of the Nation* (Routledge, 2013), 323–47; Funston, "The Politics of Ethnicity in Malaysia."

²⁹ Chin Yee Mun et al., "From Individual Choice to Collective Actions: Ethnic Consciousness in Malaysia Reconsidered," *Ethnic and Racial Studies* 38, no. 2 (January 26, 2015): 259–74, <https://doi.org/10.1080/01419870.2013.863958>; Ang Siew Mun, Phaik Fern Chiok, and Choo Chin Low, "Between Ethnicization and Globalisation: Mediating Contesting Cultural Identities of Malaysian Youths 11, No. 3 (2015): 73-82.," *Geografia-Malaysian Journal of Society and Space* 11, no. 3 (2015): 73–82.

³⁰ Amri Baharuddin Shamsul, "A History of an Identity, an Identity of a History: The Idea and Practice of 'Malayness' in Malaysia Reconsidered," *Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 3 (2001): 355–66.

Semenanjung Malaya, khususnya, dan masyarakat Mandailing di Luar Negeri dan Asia Tenggara secara umum. Oleh karena itu, bagian kedua dari uraian ini mengeksplorasi proses migrasi orang Mandailing ke Malaysia. Lalu, di bagian ketiga penjelasan lebih dalam mengenai etnisasi atau politik etnik yang dijalankan pemerintah colonial Inggris dihadapi oleh orang mandailing, bagaimana mereka beradaptasi dalam naungan negara bangsa baru pasca-kolonial, dan bagaimana mereka berperan dalam globalisasi yang mengandaikan terjadinya hibridisasi dan kreolisasi di tanah Malaya. Bagian akhir dari pembahasan ini merupakan penjelasan mengenai aktivisme Islam orang Mandailing di Malaysia, bagaimana kegiatan keagamaan yang mereka selenggarakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, merawat tradisi keagamaan dalam proses kompleksitas globalisasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami kompleksitas sejarah dan dinamika sosial di Semenanjung Melayu, terutama dalam kaitannya dengan migrasi, perdagangan, dan interaksi budaya. Pendekatan yang digunakan sangat komprehensif, dengan referensi yang kaya dari berbagai sumber sejarah dan kajian sebelumnya, menjadikannya sebagai pendahuluan yang informatif dan relevan untuk studi tentang orang Mandailing di Malaysia.

Bagian ini merupakan penjelasan bagaimana proses etnisasi Mandailing menjadi Melayu sejak masa colonial Inggris dan sampai sekarang masih berlaku di Malaysia. Proses etnisasi di Malaysia telah berkembang seiring dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang dialami oleh wilayah ini sejak era kolonial hingga masa pasca-kemerdekaan. Etnisitas di Malaysia tidak hanya menjadi faktor identitas budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik negara. Proses ini telah didorong oleh dinamika yang kompleks, melibatkan interaksi antara kekuatan eksternal seperti kolonialisme Inggris, serta faktor internal seperti migrasi dan kebijakan negara.

Pada abad ke-19, dengan masuknya Inggris ke wilayah Malaya, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Melayu, Tionghoa, dan India mulai dikategorikan berdasarkan etnisitas.³¹ Inggris memperkenalkan kebijakan pemisahan ekonomi berdasarkan etnis yang memposisikan orang Melayu di sektor pertanian, orang Tionghoa di sektor perdagangan dan tambang, serta orang India di perkebunan karet. Pemisahan ini memperkuat identitas etnis sebagai komponen utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Malaya, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya stratifikasi sosial berdasarkan etnisitas.

Etnisisasi ini diperkuat melalui kebijakan-kebijakan negara pasca-kemerdekaan yang terus menekankan pentingnya identitas etnis dalam struktur sosial dan politik Malaysia.³² Perjanjian Sosial yang mengakui hak istimewa orang Melayu sebagai bumiputera setelah kemerdekaan pada tahun 1957, serta kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1971, merupakan contoh kebijakan yang memperkuat pembagian berdasarkan etnisitas dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap eksklusivitas kelompok etnis tertentu, khususnya orang Melayu, dalam bidang ekonomi dan politik.

Di sisi lain, agama juga memainkan peran penting dalam proses etnisisasi di Malaysia.³³ Identitas etnis Melayu secara konstitusional dihubungkan dengan agama Islam, yang menjadikannya elemen sentral dalam membentuk identitas politik dan sosial orang Melayu. Hal ini menambahkan dimensi baru dalam proses etnisisasi, di mana tidak hanya etnisitas,

³¹ Andaya and Andaya, *A History of Malaysia*; Andaya, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*.

³² Gabriel, "Translating Bangsa Malaysia: Toward a New Cultural Politics of Malaysian-Ness"; Abbott and Gregorios-Pippas, "Islamization in Malaysia: Processes and Dynamics"; Holst, *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia*; Shamsul, "Nations-of-Intent in Malaysia."

³³ "Conclusion ISLAM, DEMOCRACY, AND ACTIVISM IN MALAYSIA," *Islamization and Activism in Malaysia* (ISEAS Publishing, 2010), <https://doi.org/10.1355/9789814279031-012>; "3 MALAYSIA AS AN ISLAMIC STATE," *Islamization and Activism in Malaysia* (ISEAS Publishing, 2010), <https://doi.org/10.1355/9789814279031-006>; HWANG, *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis Di Indonesia, Malaysia, Dan Turki*.

tetapi juga agama menjadi pendorong penting dalam membentuk dinamika hubungan antar kelompok etnis di Malaysia .

Dalam konteks politik modern, etnisisasi terus menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kebijakan negara. Sistem politik yang didominasi oleh partai-partai berbasis etnis seperti UMNO (United Malays National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress), menegaskan bahwa etnisitas tetap menjadi komponen utama dalam pengambilan keputusan politik³⁴. Meskipun ada upaya untuk membangun kohesi nasional, politik etnis tetap mendominasi struktur kekuasaan di Malaysia.

Proses etnisisasi ini telah menghasilkan dinamika sosial-politik yang rumit, di mana etnisitas sering menjadi sumber ketegangan sosial dan politik. Meskipun Malaysia dikenal sebagai negara yang multikultural, identitas etnis yang kuat dan kebijakan berbasis etnis telah menimbulkan tantangan dalam upaya membangun persatuan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses etnisisasi ini berkembang dan dampaknya terhadap hubungan antar kelompok etnis serta stabilitas politik di Malaysia.

Proses etnisisasi selama masa kolonial Inggris di Malaysia pada abad ke-19 merujuk pada pembentukan identitas etnis yang dikelola, dikotakkan, dan diperkuat oleh kebijakan kolonial yang membagi peran sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan garis etnis. Proses ini secara signifikan membentuk struktur masyarakat Malaysia modern, di mana setiap kelompok etnis diberikan peran tertentu yang akhirnya memperkuat stereotip dan segregasi etnis.

Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, orang Melayu secara umum dianggap sebagai petani tradisional yang hidup di pedesaan. Mereka tetap terlibat dalam sektor agrikultur tradisional, terutama dalam pertanian padi di daerah-daerah pedesaan.³⁵ Orang Melayu jarang

³⁴ Shamsul, "Nations-of-Intent in Malaysia."

³⁵ Abdur-Razzaq Lubis, "Janus-Faced Politics: The State and Academe Collusion in the Perpetuation of Racial Ideologies in West Malaysia.," in *In Asia-Pacific Sociological Association (APSA) Conference: "Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific"*, 2014, 7–35; Steven Drakeley, "Drawing or Waving? Citizenship, Multiculturalism, and Islam in Malaysia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 46, no. 2 (2008): 325–51.

terlibat dalam sektor industri atau perdagangan, sehingga ekonomi mereka relatif tertinggal dibandingkan dengan etnis lain. Sementara itu, Orang Cina dikategorikan sebagai Penambang dan Pedagang. Migrasi besar-besaran orang Cina ke Malaysia dimulai pada abad ke-19,³⁶ terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan timah yang sedang berkembang pesat. Orang Cina juga berkembang di sektor perdagangan dan menjadi kelas pedagang yang dominan di wilayah-wilayah perkotaan. Mereka membawa keahlian dan jaringan dagang yang luas, yang kemudian mengokohkan posisi mereka dalam ekonomi kolonial. Terakhir, Orang India yang diposisikan sebagai Pekerja Perkebunan. Pada akhir abad ke-19, Inggris mulai mendatangkan tenaga kerja dari India,³⁷ khususnya dari bagian selatan India, untuk bekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit. Orang India ditempatkan di perkebunan di daerah pedesaan, jauh dari pusat-pusat perkotaan. Sistem kontrak *kangani* digunakan untuk merekrut dan mengelola tenaga kerja ini, yang sebagian besar hidup dalam kondisi sulit di perkebunan.

Inggris sengaja menciptakan sistem pemisahan geografis untuk setiap kelompok etnis. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung di pedesaan dan berfokus pada pertanian subsisten. Orang Cina cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Penang, Kuala Lumpur, dan Ipoh, di mana mereka terlibat dalam pertambangan dan perdagangan. Orang India terutama ditempatkan di perkebunan di daerah-daerah pedalaman.³⁸ Pemisahan ini menciptakan perkampungan-perkampungan etnis yang terpisah secara fisik dan sosial. Setiap etnis memiliki kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dan jarang ada interaksi

³⁶ Stanley Musgrave Middlebrook, John Michael Gullick, and C.A Gibson-Hill, "Yap Ah Loy (1837-1885)," *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 24, no. 2 (1951): 1-127.

³⁷ Abdul Razak Lubis, "The Indian Diaspora, Absences, Silences and the Margin: Restructuring Indian Diaspora Studies" (Kanyakumari Tamil Nadu-India, 2016); Carl Vadivella Belle, "The Malay Peninsula: Early History, Melaka and the Colonial Setting," in *Tragic Orphans: Indians in Malaysia*. (Books and Monographs ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2014), 1-15.

³⁸ Belle, "The Malay Peninsula: Early History, Melaka and the Colonial Setting."

sosial antar kelompok, yang memperkuat jarak sosial dan memperdalam pemahaman etnis yang terkotak-kotak.³⁹

Selain itu, colonial juga menciptakan kebijakan Pendidikan yang Berbasis Etnis. Inggris mendirikan sistem pendidikan yang juga didasarkan pada garis etnis. Sekolah Melayu lebih berfokus pada pendidikan dasar yang diarahkan untuk mempertahankan keterampilan agrikultur, dengan sedikit perhatian pada pendidikan lanjutan. Sekolah Cina dan sekolah India memberikan pendidikan yang lebih berorientasi pada perdagangan dan pekerjaan di sektor industri. Sekolah-sekolah Cina menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah-sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Ini memperkuat identitas etnis dan menciptakan pemisahan lebih lanjut antar kelompok etnis, karena pendidikan yang mereka terima berbeda dalam hal konten dan kurikulum.

Kemudian, kekuasaan politik dikendalikan oleh Inggris melalui sistem Residen, di mana setiap sultan Melayu di Semenanjung Malaya diberi penasihat Inggris yang sebenarnya memiliki kontrol politik. Orang Melayu tetap memegang kekuasaan simbolis dalam urusan adat dan agama, tetapi kekuasaan ekonomi dan politik utama dikuasai oleh Inggris dan orang-orang Eropa. Pembatasan Partisipasi Politik untuk Etnis Lain seperti orang Cina dan India, tidak diberikan hak politik yang signifikan.⁴⁰ Meskipun mereka memainkan peran penting dalam ekonomi, mereka tetap dijauhkan dari pengambilan keputusan politik, yang dikhususkan untuk orang Inggris dan elit Melayu. Ini memperkuat ketegangan etnis, karena ada kesenjangan antara dominasi ekonomi oleh orang Cina dan India dengan kurangnya representasi politik mereka.

³⁹ Frederic Durand and Richard Curtis, *Maps of Malaya and Borneo: Discovery, Statehood and Progress, The Collections of H.R.H. Sultan Sharafuddin Idris Shah and Dato' Richard Curtis* Kuala Lumpur Jugra Publications. (Kuala Lumpur: Jugra Publications, 2013); Emily Sadka, *The Protected Malay States: 1874-1895* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press., 1968).

⁴⁰ Sadka, *The Protected Malay States: 1874-1895*; A. B Shamsul, "A History of an Identity, an Identity of a History: The Idea and Practice of 'Malayness' in Malaysia Reconsidered," *Journal of Southeast Asian Studies*, 2, no. 3 (2001): 355-366.

Kebijakan Inggris memperkuat kesenjangan ekonomi berdasarkan etnis. Orang Cina, yang menguasai sektor perdagangan dan industri, cenderung lebih makmur daripada orang Melayu yang terkonsentrasi di sektor pertanian subsisten.⁴¹ Orang India yang bekerja di perkebunan juga sering kali hidup dalam kondisi yang sulit, dengan sedikit akses ke layanan sosial dan pendidikan yang baik. Ekonomi kolonial Malaysia sangat tergantung pada kerja keras dan keterampilan orang Cina dan India di sektor-sektor strategis seperti pertambangan timah dan perkebunan karet. Namun, orang-orang ini tetap dianggap sebagai "pendatang" dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem sosial-politik Malaysia, memperdalam perasaan marginalisasi.

Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, proses etnisasi yang dikembangkan oleh Inggris terus berlanjut. Warisan pemisahan etnis dalam hal ekonomi, pendidikan, dan sosial masih bertahan. Meskipun pemerintah Malaysia modern berusaha untuk menciptakan persatuan nasional, ketegangan etnis yang ditinggalkan oleh sistem kolonial masih memengaruhi politik dan hubungan antar-etnis di negara tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan yang dihasilkan oleh kebijakan kolonial, pemerintah Malaysia pasca-kolonial memperkenalkan kebijakan afirmatif untuk membantu Bumiputera (terutama orang Melayu) dalam mengakses peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga memperdalam perasaan tidak puas di kalangan etnis Cina dan India yang merasa terpinggirkan oleh sistem tersebut. Proses etnisasi ini terus berdampak pada masyarakat Malaysia hingga hari ini, dengan isu-isu ketidaksetaraan antar-etnis yang masih menjadi tantangan dalam politik dan ekonomi negara tersebut.⁴²

C. Menjadi Melayu: Pembentukan identitas etnis

⁴¹ Middlebrook, Gullick, and Gibson-Hill, "Yap Ah Loy (1837-1885)"; Henry Ren Jie Chong, "Introduction: The Chinese in the Malay Peninsula," *Translocal Chinese: East Asian Perspectives* 16, no. 2 (October 21, 2022): 123–25, <https://doi.org/10.1163/24522015-16020001>.

⁴² Michael Silk, "Bangsa Malaysia': Global Sport, the City and the Mediated Refurbishment of Local Identities," *Media, Culture & Society* 24, no. 6 (2002): 775–94; Azman et al., eds., *Malaysian Youth in the Global World: Issues and Challenges*. (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011); Shamsul, "Nations-of-Intent in Malaysia."

Suku Mandailing, yang berasal dari kawasan Mandailing di Sumatera Utara, Indonesia, sering diidentifikasi sebagai Melayu dari Sumatera, Melayu-Mandailing Malaysia.⁴³ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor historis, sosial, dan kultural yang membentuk identitas mereka di Malaysia, antara lain; pertama, banyak suku Mandailing yang menetap di daerah-daerah seperti Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan.⁴⁴ Mereka datang sebagai pedagang, pekerja, dan petani, berbaur dengan masyarakat lokal yang sudah ada, termasuk komunitas Melayu.⁴⁵

Kedua, budaya serumpun. Suku Mandailing berbagi banyak elemen budaya dan tradisi dengan masyarakat Melayu, karena mereka juga berasal dari wilayah yang memiliki akar budaya Melayu.⁴⁶ Misalnya, bahasa Mandailing memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu, terutama dalam hal kosakata dan struktur. Selain itu, mereka mempraktikkan Islam, yang juga merupakan agama mayoritas di kalangan orang Melayu. Di Malaysia, suku Mandailing secara bertahap mengadopsi aspek-aspek budaya Melayu, termasuk bahasa dan adat istiadat. Perbedaan antara Mandailing dan Melayu menjadi kabur, terutama karena mereka beragama Islam dan mengikuti banyak norma budaya Melayu, seperti sistem kekerabatan patrilineal, penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, dan penerimaan adat Melayu.

Di Malaysia, identitas etnis sering kali terkait erat dengan agama dan bahasa. Oleh karena itu, banyak Mandailing yang diidentifikasi sebagai Melayu karena mereka berbagi agama Islam dan menggunakan bahasa Melayu.⁴⁷ Identifikasi ini diperkuat oleh kebijakan

⁴³ Abdur-Razzaq Lubis, *Tarikh Raja Asal: Derap Perantauan Kaum Mandailing Dari Sumatra Ke Tanah Semenanjung* (Areca Books, 2021); Abdur-Razzaq Lubis, "Mainstreaming the Minorities: The Case of the Mandailings in Malaysia and Indonesia," in *Promoting Culture of Peace, SIGNIS Asia*, (Kuala Lumpur: Cahayasuara Communications Centre, 2005), 42–48.

⁴⁴ Abdur-Razzaq Lubis, "Mandailing Islam across Borders," *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 2 (2005): 55–98; Hafizah binti Mokhtaruddin Arifah, "Masyarakat Mandailing Di Mukim Papan, Perak, 1873-1909" (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2018).

⁴⁵ Donald Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia* (Queensland: University of Queensland Press, 1977).

⁴⁶ Andaya, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*.

⁴⁷ Lubis, "Janus-Faced Politics: The State and Academe Collusion in the Perpetuation of Racial Ideologies in West Malaysia."; Abdur-Razzaq Lubis, "The Politics of Identity Construction: The Case of the

pemerintah Malaysia yang mendefinisikan orang Melayu sebagai mereka yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu, dan mempraktikkan adat Melayu. Karena Mandailing memenuhi kriteria ini, mereka sering diakui sebagai bagian dari kelompok etnis Melayu.

Merujuk Konstitusi Malaysia Pasal 160 mendefinisikan orang Melayu sebagai seseorang yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu, dan mempraktikkan adat Melayu. Banyak suku Mandailing yang telah lama menetap di Malaysia memenuhi ketiga kriteria ini, sehingga mereka sering diklasifikasikan sebagai Melayu. Di Malaysia, status sebagai Melayu memberikan keuntungan dalam hal hak istimewa Bumiputera, yang memberikan akses lebih besar ke pendidikan, pekerjaan di sektor publik, serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, banyak komunitas Mandailing yang secara sukarela mengidentifikasi diri mereka sebagai Melayu untuk memperoleh manfaat dari kebijakan afirmatif yang ditujukan kepada Bumiputera.⁴⁸ Suku Mandailing juga diakui secara resmi sebagai Melayu oleh otoritas Malaysia, baik dalam konteks politik maupun administratif, sebagai bagian dari proses asimilasi dan integrasi mereka ke dalam masyarakat Malaysia yang lebih luas.

Identitas etnis bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Bagi suku Mandailing di Malaysia, identitas sebagai Melayu telah berkembang secara bertahap melalui asimilasi budaya dan adopsi bahasa serta norma-norma Melayu. Dengan begitu, banyak generasi muda Mandailing di Malaysia yang mungkin tidak lagi melihat diri mereka berbeda secara signifikan dari etnis Melayu. Suku Mandailing di Malaysia telah mengalami proses perubahan identitas yang bersifat dinamis, di mana mereka terus mempertahankan beberapa elemen budaya Mandailing sambil secara

Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources*, 2004.

⁴⁸ Sharmani Patricia Gabriel, "Nation and Contestation in Malaysia: Diaspora and Myths of Belonging in the Narratives of K. S. Maniam," *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 2 (June 18, 2005): 235–48, <https://doi.org/10.1017/S0022463405000159>.

bersamaan diakui sebagai Melayu. Hal ini menunjukkan bagaimana etnisitas bisa bersifat cair dan berubah sesuai dengan konteks sosial di mana suatu kelompok berada.

Di Malaysia, ada keuntungan politik dan sosial tertentu yang terkait dengan menjadi bagian dari identitas Melayu.⁴⁹ Dalam konteks kebijakan afirmatif dan status Bumiputera, orang yang diidentifikasi sebagai Melayu sering kali menerima lebih banyak keuntungan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, proses identifikasi sebagai Melayu mungkin juga dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis, di mana suku Mandailing lebih memilih untuk diakui sebagai Melayu. Pemerintah Malaysia sejak kemerdekaan juga mendorong narasi nasionalis Melayu, di mana kelompok-kelompok Muslim serumpun, seperti Mandailing, dilihat sebagai bagian dari kebesaran dan kesatuan Melayu. Ini membantu memperkuat identifikasi suku Mandailing dengan Melayu.

Proses asimilasi ini telah menciptakan kondisi di mana identitas etnis Mandailing sering kali dilihat sebagai bagian dari kelompok Melayu yang lebih luas. Identifikasi ini memperkuat integrasi sosial dan budaya mereka di Malaysia, meskipun beberapa elemen budaya Mandailing masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Mandailing Hibrid

Identitas Mandailing berubah melalui proses panjang yang melibatkan migrasi, asimilasi dengan budaya Melayu, pengaruh kebijakan kolonial dan pasca-kolonial, serta faktor sosial ekonomi. Meskipun suku Mandailing masih mempertahankan beberapa elemen budaya mereka, terutama dalam konteks keluarga dan komunitas, di ranah publik dan administratif, mereka sering diidentifikasi sebagai Melayu. Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas etnis dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi.

⁴⁹ Mah Hui Lim, "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*," *Ethnic and Racial Studies* 8, no. 2 (April 13, 1985): 250–76, <https://doi.org/10.1080/01419870.1985.9993485>; Mah Hui Lim, "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*," *Ethnic and Racial Studies* 8, no. 2 (April 13, 1985): 250–76, <https://doi.org/10.1080/01419870.1985.9993485>.

Islam memainkan peran sentral dalam menyatukan suku Mandailing dengan komunitas Melayu.⁵⁰ Karena Islam juga merupakan agama yang dianut oleh orang Mandailing dan Melayu, agama ini menjadi dasar utama integrasi budaya. Praktik keagamaan yang serupa mempercepat proses asimilasi, sehingga Mandailing secara bertahap diterima sebagai bagian dari komunitas Muslim Melayu. Seiring waktu, suku Mandailing mulai menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari dan mengadopsi adat-istiadat Melayu. Meskipun mereka masih mempertahankan beberapa tradisi lokal, seperti upacara adat Mandailing, banyak dari mereka yang telah menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial Melayu. Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas Mandailing semakin terintegrasi ke dalam budaya Melayu. Pernikahan antara orang Mandailing dan orang Melayu juga mempercepat proses asimilasi. Generasi yang lahir dari pernikahan campuran ini sering kali lebih cenderung mengidentifikasi diri sebagai Melayu, terutama karena bahasa dan lingkungan budaya mereka lebih dekat dengan budaya Melayu.

Generasi muda Mandailing yang lahir di Malaysia sering kali lebih mengenal bahasa dan budaya Melayu dibandingkan dengan budaya Mandailing tradisional. Meskipun beberapa keluarga masih mempertahankan tradisi Mandailing seperti adat perkawinan dan upacara adat lainnya, generasi muda umumnya mengidentifikasi diri mereka sebagai Melayu karena mereka tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma Melayu. Di banyak kasus, orang Mandailing di Malaysia memiliki identitas hibrida yang mencampurkan elemen-elemen budaya Mandailing dan Melayu. Mereka mungkin masih mempertahankan beberapa tradisi Mandailing dalam konteks keluarga atau komunitas kecil,

⁵⁰ HWANG, *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis Di Indonesia, Malaysia, Dan Turki*; Andaya and Andaya, *A History of Malaysia*; Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*.

tetapi dalam ranah publik, mereka lebih sering diidentifikasi sebagai Melayu karena lebih dekat dengan budaya dominan.

Proses di mana suku Mandailing di Malaysia diidentifikasi atau diintegrasikan sebagai Melayu memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dampak ini mencerminkan bagaimana perubahan identitas etnis mempengaruhi posisi mereka dalam masyarakat serta hubungan mereka dengan komunitas lain; pertama, Peningkatan Integrasi Sosial. Dengan diidentifikasi sebagai Melayu, orang Mandailing lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Malaysia yang mayoritas Melayu. Mereka lebih diterima dalam struktur sosial yang berbasis pada identitas Melayu-Muslim. Hal ini memperkuat hubungan mereka dengan komunitas Melayu lainnya dan mengurangi potensi marginalisasi sebagai kelompok etnis minoritas.

Kedua, penghapusan perbedaan Etnis Internal. Karena proses asimilasi budaya, perbedaan yang dulunya menandai identitas Mandailing sebagai entitas terpisah dari Melayu mulai kabur. Generasi Mandailing di Malaysia cenderung melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas Melayu yang lebih besar, sehingga perbedaan etnis dalam identitas internal berkurang. Namun, ini juga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran akan identitas Mandailing yang lebih spesifik di kalangan generasi muda.

Ketiga, erosi Identitas Budaya Mandailing. Sebagai bagian dari proses asimilasi, banyak aspek budaya Mandailing yang khas, seperti bahasa Mandailing, adat istiadat, dan tradisi kekerabatan, mengalami penurunan atau penghilangan. Bahasa Mandailing jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena generasi muda lebih banyak berbicara bahasa Melayu. Beberapa tradisi dan ritual adat Mandailing mungkin masih dipraktikkan dalam konteks komunitas kecil, tetapi semakin jarang terlihat dalam konteks yang lebih luas.

Keempat, pelestarian Tradisi Tertentu. Meskipun ada erosi budaya, beberapa tradisi Mandailing masih dipertahankan oleh komunitas-komunitas kecil yang memiliki kesadaran

akan warisan budaya mereka. Upacara adat seperti Gordang Sambilan (musik tradisional Mandailing) atau Markaroan (ritual sosial) mungkin masih dipraktikkan di komunitas tertentu. Namun, pelestarian ini biasanya terbatas pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan upacara tradisional yang dilakukan di kalangan komunitas Mandailing sendiri.

Kelima, mobilitas sosial yang Lebih Baik. Dengan hak-hak istimewa yang diperoleh sebagai Bumiputera, orang Mandailing di Malaysia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan mobilitas sosial. Ini mencakup akses yang lebih luas ke pekerjaan di sektor publik, pendidikan tinggi, dan perumahan yang disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya, mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan status ekonomi mereka secara keseluruhan. Keenam, partisipasi dalam Politik Melayu. Dengan diidentifikasi sebagai Melayu, orang Mandailing juga memiliki akses lebih besar ke politik Malaysia, yang didominasi oleh kelompok Melayu. Mereka dapat berpartisipasi dalam politik partai, terutama dalam partai yang memperjuangkan kepentingan Melayu, seperti UMNO (United Malays National Organisation). Ini memberi mereka kesempatan untuk memengaruhi kebijakan yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan komunitas Melayu. Dalam konteks politik, identifikasi sebagai Melayu memperkuat identitas kolektif mereka sebagai bagian dari kelompok etnis mayoritas yang berpengaruh di Malaysia. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dengan kelompok Melayu yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk menavigasi lanskap politik dengan lebih baik.

Namun, Seiring waktu, banyak orang Mandailing di Malaysia yang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai Mandailing, melainkan sepenuhnya sebagai Melayu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya kesadaran akan identitas Mandailing sebagai entitas etnis yang terpisah. Di kalangan generasi muda, identitas Mandailing mungkin tidak lagi dianggap relevan, karena mereka lebih dekat dengan budaya Melayu yang dominan. Beberapa individu atau komunitas Mandailing mungkin mengembangkan identitas hibrida, di

mana mereka merasa terhubung dengan budaya Melayu, namun tetap mempertahankan beberapa elemen warisan Mandailing. Ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dalam dua dunia budaya, meskipun hal ini sering kali sulit dijaga di lingkungan perkotaan yang lebih terintegrasi.

Dapat dilihat dari aspek integrative bahwa Proses pengidentifikasian Mandailing sebagai Melayu juga memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok etnis Melayu-Muslim di Malaysia.⁵¹ Ini memperkuat konsep Melayu-Islam sebagai identitas dominan di negara tersebut, yang sering kali menjadi landasan bagi hubungan sosial antar kelompok etnis Muslim. Perubahan identitas Mandailing menjadi Melayu membawa berbagai dampak yang signifikan. Di satu sisi, mereka mendapat manfaat dari integrasi sosial, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari kelompok mayoritas Melayu. Akses ke hak istimewa Bumiputera dan partisipasi dalam politik Melayu memperkuat status mereka di masyarakat. Namun, di sisi lain, proses ini juga menyebabkan erosi budaya Mandailing, dengan banyak aspek identitas etnis mereka yang terpinggirkan atau hilang. Di masa depan, tantangan utama bagi komunitas Mandailing mungkin adalah bagaimana mereka menyeimbangkan warisan budaya mereka dengan identitas Melayu yang lebih luas.

Secara Bahasa, banyak orang Mandailing di Malaysia berbicara dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, terutama dalam konteks publik. Namun, di beberapa komunitas, terutama yang lebih tua, bahasa Mandailing masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, ada penggunaan bilingual antara bahasa Mandailing dan Melayu, yang menunjukkan hibriditas dalam cara komunikasi. Selain itu, beberapa adat dan tradisi Mandailing masih dipraktikkan, meskipun sering kali dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan konteks Melayu. Misalnya, upacara pernikahan atau kematian mungkin mengikuti adat Mandailing tetapi juga mengintegrasikan elemen adat

⁵¹ Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*.

Melayu. Upacara musik tradisional Mandailing, seperti Gordang Sambilan, masih dimainkan dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak lagi menjadi bagian sentral dalam kehidupan sehari-hari, lebih cenderung sebagai simbol identitas kultural.

Suku Mandailing di Malaysia, seperti halnya orang Melayu, mayoritas beragama Islam. Agama Islam menjadi elemen penting dalam proses asimilasi dan hibriditas identitas. Meskipun beberapa aspek adat Mandailing mungkin masih dipertahankan, terutama dalam ritual tradisional, semua praktik tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang umum di kalangan Melayu. Dengan kata lain, elemen Islam dalam budaya Melayu memperkuat kesamaan antara kedua kelompok, sehingga identitas Mandailing yang hibrid juga memiliki dasar yang kuat dalam agama yang sama. Mandailing di Malaysia sering kali aktif dalam institusi keagamaan yang lebih luas di Malaysia, seperti masjid atau organisasi Islam. Mereka berbagi platform yang sama dengan komunitas Melayu-Muslim, yang memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari kelompok Islam yang lebih besar, meskipun mereka tetap mempertahankan akar etnisitas mereka sebagai Mandailing.

Dalam banyak kasus, orang Mandailing mungkin memiliki nama depan yang mencerminkan identitas Melayu, tetapi marga Mandailing tetap dipertahankan. Nama-nama marga seperti Nasution, Lubis, Harahap, dan Batubara masih menjadi identitas yang membedakan orang Mandailing dari kelompok Melayu lainnya. Penggunaan nama ini menunjukkan keberlanjutan elemen identitas Mandailing, meskipun mereka secara sosial dan politik diakui sebagai Melayu. Beberapa simbol budaya Mandailing masih dipertahankan dalam bentuk-bentuk yang lebih simbolis. Misalnya, desain pakaian tradisional Mandailing mungkin diintegrasikan ke dalam pakaian adat Melayu di beberapa kesempatan, atau lambang-lambang keluarga Mandailing dipajang di rumah atau komunitas mereka sebagai tanda identitas etnis yang lebih dalam.

Hibriditas identitas Mandailing di Malaysia ditandai oleh penggabungan elemen-elemen budaya asli Mandailing dengan elemen-elemen budaya Melayu yang dominan, serta pengaruh dari identitas nasional Malaysia. Proses ini menciptakan identitas ganda yang memungkinkan orang Mandailing untuk mempertahankan warisan etnis mereka sambil beradaptasi dengan konteks sosial yang lebih luas. Identitas hibrid ini juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti bahasa, adat istiadat, praktik agama, seni, dan partisipasi politik, yang menunjukkan bagaimana identitas Mandailing terus berkembang seiring dengan waktu dan perubahan lingkungan sosial. Mempertahankan identitas, terutama dalam konteks komunitas yang menghadapi asimilasi budaya, globalisasi, atau tekanan sosial, memerlukan upaya yang berkelanjutan. Identitas, baik individu maupun kelompok, dapat mencakup aspek budaya, bahasa, agama, sejarah, dan nilai-nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi.

D. Proses Etnisisasi Mandailing dalam Konteks Kebijakan Bumiputera

Salah satu aspek penting yang belum dibahas dalam artikel adalah bagaimana kebijakan Bumiputera di Malaysia berperan dalam proses etnisisasi Mandailing. Setelah kemerdekaan, pemerintah Malaysia memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971, dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi antara bumiputera dan non-bumiputera.⁵² Orang Melayu diakui sebagai bumiputera, dan mereka mendapatkan hak-hak istimewa dalam pendidikan, ekonomi, dan akses ke posisi di sektor publik. Namun, ada diskusi yang lebih luas mengenai apakah orang Mandailing di Malaysia, yang sebagian besar beragama Islam dan telah berasimilasi dengan budaya Melayu, juga dianggap sebagai bumiputera secara resmi .

⁵² Lim, "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*," April 13, 1985; Kautsar Ramli and Nick Williams, "The Interplay of Affirmative Action and Entrepreneurial Culture: Understanding Institutional Privilege and Exclusion in Malaysia," *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, February 11, 2024, <https://doi.org/10.1177/14657503241229689>.

Bagi sebagian orang Mandailing, mengadopsi identitas Melayu menawarkan akses ke hak-hak istimewa yang ditawarkan oleh kebijakan bumiputera. Ini termasuk kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, akses ke perumahan bersubsidi, serta keuntungan dalam tender bisnis pemerintah. Proses "pemelayuan" atau Melayunisasi terjadi di kalangan Mandailing, yang secara bertahap mengadopsi bahasa, budaya, dan praktik Islam yang lebih dekat dengan identitas Melayu untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat Malaysia yang didominasi oleh orang Melayu. Oleh karena itu, etnisasi Mandailing berhubungan erat dengan kebijakan negara yang mendorong integrasi etnis tertentu melalui insentif ekonomi dan sosial.

Meskipun begitu, proses etnisasi ini tidak berjalan mulus untuk semua anggota komunitas Mandailing. Beberapa di antara mereka masih mempertahankan identitas Mandailing mereka dengan kuat, terutama dalam konteks keluarga dan upacara adat. Ada juga kekhawatiran bahwa proses Melayunisasi ini dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya dan bahasa Mandailing di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Mandailing di kalangan generasi yang lebih muda terus menurun, dan tradisi seperti Gordang Sambilan mulai jarang dipraktikkan di luar konteks perayaan budaya formal.

Kebijakan bumiputera juga menciptakan garis batas yang lebih tegas antara kelompok bumiputera dan non-bumiputera, yang mencerminkan stratifikasi sosial berbasis etnis.⁵³ Meskipun kelompok Mandailing diuntungkan dari pengakuan sebagai bumiputera, ketegangan antar kelompok etnis seperti Tionghoa dan India yang tidak memiliki akses ke hak-hak ini terus berlanjut. Dalam hal ini, proses etnisasi bukan hanya sekedar adopsi budaya Melayu, tetapi juga berhubungan dengan dinamika politik ekonomi di Malaysia yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan rasial.

⁵³ Lim, "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*," April 13, 1985; Hwok-Aun Lee, "Affirmative Action in Malaysia: Education and Employment Outcomes since the 1990s," *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 2 (May 2012): 230–54, <https://doi.org/10.1080/09500782.2012.668350>.

Dengan demikian, kebijakan bumiputera memainkan peran penting dalam mempercepat proses etnisasi Mandailing menjadi Melayu, tetapi juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan identitas kultural Mandailing yang lebih spesifik. Proses ini menunjukkan kompleksitas etnisitas di Malaysia, di mana identitas etnis tidak hanya dibentuk oleh warisan budaya, tetapi juga oleh kebijakan negara yang mendorong asimilasi melalui manfaat ekonomi .

E. Hubungan Antara Migrasi Mandailing dan Politik Identitas di Malaysia

Meskipun artikel membahas sejarah migrasi Mandailing dari Sumatra ke Malaysia, pembahasan mengenai politik identitas dan bagaimana migrasi tersebut mempengaruhi pembentukan identitas Mandailing di Malaysia perlu lebih didalami. Migrasi Mandailing pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terutama dipicu oleh faktor ekonomi dan sosial, termasuk pekerjaan di sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan. Namun, setelah mereka menetap di Malaysia, identitas Mandailing mengalami perubahan signifikan di bawah pengaruh politik identitas etnis di Malaysia yang sangat tersegmentasi.⁵⁴

Di Malaysia, politik identitas etnis didominasi oleh garis-garis etnis yang jelas, terutama setelah kemerdekaan. Partai-partai politik utama seperti UMNO (United Malays National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) dibentuk berdasarkan kelompok etnis tertentu. Dalam konteks ini, migrasi Mandailing ke Malaysia tidak hanya membawa mereka ke lingkungan baru secara geografis, tetapi juga membawa mereka ke dalam arena politik yang terstruktur berdasarkan etnisitas . Sebagai minoritas yang berasal dari Sumatra, Mandailing harus memutuskan bagaimana mereka akan menavigasi sistem politik berbasis etnis yang ada.

⁵⁴ Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*; Abdur-Razzaq. Lubis, "Transformation of Mandailing Cultural Identity and Leadership," *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 76, no. 1 (284) (2003): 55–79, <http://www.jstor.org/stable/41493487>.

Proses Melayunisasi yang dialami oleh Mandailing juga terkait erat dengan politik identitas ini. Orang Mandailing yang memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai Melayu, dengan demikian, masuk ke dalam kerangka politik yang memberikan mereka keuntungan sosial dan ekonomi. Namun, hal ini juga mengorbankan beberapa aspek dari identitas Mandailing mereka. Seiring dengan generasi baru yang lahir di Malaysia, semakin banyak orang Mandailing yang lebih memilih identitas Melayu untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem sosial-politik yang didominasi oleh bumiputera. Proses ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politis .

Namun, tidak semua orang Mandailing sepenuhnya melebur ke dalam identitas Melayu. Ada kelompok-kelompok Mandailing di Malaysia yang tetap mempertahankan identitas mereka dan menolak asimilasi penuh. Politik identitas di Malaysia menawarkan sedikit ruang bagi kelompok-kelompok minoritas seperti Mandailing untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka tanpa harus beradaptasi dengan identitas yang lebih besar. Konflik antara keinginan untuk mempertahankan identitas etnis yang spesifik dan tuntutan untuk berasimilasi dalam politik nasional Malaysia terus menjadi isu yang relevan dalam pembahasan mengenai migrasi dan identitas .

Oleh karena itu, migrasi Mandailing ke Malaysia membawa dampak signifikan terhadap politik identitas mereka, di mana mereka dipaksa untuk menavigasi sistem politik berbasis etnis yang mengharuskan adaptasi dan kadang-kadang pengorbanan identitas kultural. Proses ini memperlihatkan bagaimana migrasi tidak hanya mempengaruhi mobilitas fisik, tetapi juga mobilitas identitas dalam konteks sosial-politik yang lebih luas .

Pengaruh Globalisasi dan Urbanisasi terhadap Komunitas Mandailing

Selain dari faktor-faktor lokal, pengaruh globalisasi dan urbanisasi juga mempengaruhi dinamika identitas Mandailing di Malaysia. Globalisasi telah mempercepat proses pertukaran budaya, ide, dan informasi lintas batas negara, yang membawa dampak signifikan bagi

komunitas-komunitas minoritas seperti Mandailing. Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah bagaimana komunitas-komunitas ini mulai berinteraksi dengan dunia luar dan mengadopsi nilai-nilai baru yang mungkin berbeda dari nilai-nilai tradisional yang selama ini mereka pegang .

Di Malaysia, globalisasi membawa perubahan besar dalam cara komunitas-komunitas seperti Mandailing mengelola identitas mereka. Dalam masyarakat yang semakin urban dan terhubung secara global, generasi muda Mandailing lebih banyak terpapar pada budaya global melalui media, pendidikan, dan teknologi.⁵⁵ Hal ini sering kali mengakibatkan mereka mengalami "krisis identitas", di mana mereka harus menyeimbangkan antara mempertahankan warisan budaya Mandailing dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam dunia modern yang lebih luas. Misalnya, banyak generasi muda Mandailing yang lebih memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai Melayu, karena identitas ini lebih relevan dalam konteks sosial-politik dan ekonomi modern Malaysia.

Selain itu, proses urbanisasi di Malaysia, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang, telah mendorong perubahan dalam struktur komunitas Mandailing. Di desa-desa, identitas Mandailing sering kali dipertahankan melalui praktik-praktik adat dan hubungan sosial yang lebih dekat. Namun, ketika orang Mandailing pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, mereka mulai kehilangan ikatan dengan tradisi-tradisi tersebut. Urbanisasi juga mempercepat proses asimilasi, karena orang Mandailing yang tinggal di kota-kota besar sering kali berinteraksi lebih intens dengan kelompok etnis lain, terutama Melayu .

Globalisasi juga memfasilitasi migrasi balik (reverse migration),⁵⁶ di mana orang Mandailing yang tinggal di Malaysia mulai kembali menjalin hubungan dengan kerabat mereka

⁵⁵ Lubis, "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources.*"

⁵⁶ Pieterse, "Globalization as Hybridization."

di Sumatra melalui teknologi seperti internet dan media sosial. Hal ini menciptakan dinamika identitas yang lebih kompleks, di mana orang Mandailing di Malaysia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan budaya Melayu, tetapi juga harus menavigasi identitas mereka dalam konteks hubungan transnasional dengan komunitas Mandailing di Indonesia . Dengan demikian, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran identitas lintas batas, yang menambah lapisan kompleksitas dalam pembentukan identitas Mandailing di Malaysia.

Secara keseluruhan, globalisasi dan urbanisasi memberikan tantangan baru bagi komunitas Mandailing di Malaysia dalam hal bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat. Generasi muda Mandailing, khususnya, harus beradaptasi dengan nilai-nilai modern sambil tetap mempertahankan akar kultural mereka, yang sering kali menjadi sumber ketegangan identitas .

G. Mobilitas Sosial diaspora Mandailing Malaysia

Pembahasan tentang mobilitas sosial dalam konteks migrasi Mandailing ke Malaysia sangat penting untuk memahami bagaimana kelompok etnis ini berinteraksi dengan struktur sosial dan ekonomi di negara tujuan migrasi. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang dapat bersifat vertikal (naik atau turun kelas sosial) atau horizontal (berpindah posisi dalam kelas sosial yang sama). Dalam kasus Mandailing, mobilitas sosial dapat dianalisis melalui berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan akses ke jaringan sosial yang lebih luas. Berikut adalah uraian mengenai mobilitas sosial Mandailing di Malaysia, khususnya terkait dengan peluang mereka untuk naik kelas sosial.

Migrasi orang Mandailing ke Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Sumatra, serta peluang ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaya. Orang Mandailing, seperti kelompok migran lainnya, tiba di Malaysia untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor tertentu, terutama dalam

pertambangan dan perkebunan. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran yang memulai dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan modal .

Pekerjaan dalam sektor pertambangan dan perkebunan, meskipun memberikan penghidupan, tidak memberikan banyak kesempatan untuk mobilitas sosial vertikal.⁵⁷ Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya diupah rendah, berisiko tinggi, dan tidak menawarkan kesempatan signifikan untuk naik kelas. Oleh karena itu, pada tahap awal migrasi, sebagian besar orang Mandailing berada dalam kelas sosial bawah di Malaysia, mirip dengan posisi etnis India yang dipekerjakan di perkebunan karet dan Tionghoa di tambang timah.

1. Pendidikan sebagai Faktor Mobilitas

Salah satu cara penting untuk memahami mobilitas sosial Mandailing di Malaysia adalah melalui akses mereka terhadap pendidikan. Setelah Malaysia merdeka dan sistem pendidikan nasional dikembangkan, pendidikan menjadi faktor utama yang dapat mendorong migran dan keturunan mereka untuk naik kelas sosial. Melalui kebijakan negara seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), orang-orang Melayu, termasuk orang Mandailing yang mulai diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok bumiputera, mendapatkan akses lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik .

Bagi generasi Mandailing berikutnya, pendidikan formal di Malaysia membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik di sektor-sektor pemerintahan, pendidikan, dan profesional. Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak dari pekerjaan manual atau buruh ke pekerjaan dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan afirmatif yang mendukung bumiputera dalam hal pendidikan dan ekonomi juga memfasilitasi mobilitas sosial vertikal bagi orang Mandailing yang berintegrasi ke dalam identitas Melayu.

⁵⁷ Lubis, *Tarikh Raja Asal: Derap Perantauan Kaum Mandailing Dari Sumatra Ke Tanah Semenanjung*.

Namun, akses pendidikan ini tidak merata. Bagi sebagian besar orang Mandailing di daerah pedesaan, akses ke pendidikan berkualitas tetap menjadi tantangan. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau memiliki koneksi sosial yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, sedangkan mereka yang tinggal di pedesaan sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan dan sulit untuk mencapai mobilitas sosial vertikal.

2. Pekerjaan dan Ekonomi

Setelah mendapatkan akses ke pendidikan, orang Mandailing yang telah mengadopsi identitas Melayu memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik, yang sering kali disubsidi oleh negara. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan afirmatif Malaysia, di mana posisi-posisi dalam birokrasi pemerintahan lebih banyak diperuntukkan bagi bumiputera, termasuk orang Melayu dan mereka yang diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok ini, seperti Mandailing.

Dalam konteks ini, mobilitas sosial bagi orang Mandailing di Malaysia dapat dikaitkan dengan keberhasilan mereka dalam bertransisi dari kelas buruh ke kelas menengah, terutama melalui pekerjaan di sektor pemerintahan dan sektor swasta yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan afirmatif.⁵⁸ UMNO (United Malays National Organisation), sebagai partai politik dominan yang mewakili kepentingan orang Melayu, juga memberikan dukungan politik bagi kelompok bumiputera, sehingga orang Mandailing yang mengidentifikasi diri sebagai bumiputera dapat meraih kesempatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok non-bumiputera.

⁵⁸ Lim, "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*," April 13, 1985; Lee, "Affirmative Action in Malaysia: Education and Employment Outcomes since the 1990s"; Tarling and Gomez, *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation*; Kahn, "Explaining Ethnicity: A Review Article"; Brubaker, "Ethnicity without Groups."

Namun, tidak semua orang Mandailing berhasil mencapai mobilitas sosial yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti keterbatasan modal sosial dan ekonomi tetap menjadi hambatan bagi beberapa komunitas Mandailing untuk mencapai status ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun ada sebagian dari mereka yang berhasil naik kelas sosial melalui pekerjaan di sektor pemerintahan atau pendidikan, ada pula yang tetap berada di kelas bawah karena keterbatasan akses terhadap peluang-peluang tersebut.

3. Peran Jaringan Sosial

Jaringan sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial. Bagi komunitas Mandailing, jaringan sosial di antara sesama migran, serta hubungan mereka dengan komunitas Melayu yang lebih besar, memberikan mereka akses ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, orang Mandailing yang memiliki koneksi baik dengan elit politik atau bisnis di Malaysia berhasil mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai mobilitas sosial vertikal.

Dalam komunitas Mandailing, solidaritas etnis sering kali menjadi modal sosial yang berharga, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan. Di beberapa sektor, seperti usaha kecil menengah, komunitas Mandailing membangun jaringan bisnis yang didukung oleh modal sosial ini. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu mereka mendapatkan akses ke kredit, informasi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memulai usaha, yang kemudian memungkinkan mereka untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

Namun, hubungan dengan komunitas Melayu yang lebih besar juga menjadi penentu dalam mobilitas sosial orang Mandailing. Identifikasi mereka sebagai Melayu memberikan akses kepada peluang yang ditawarkan kepada bumiputera, tetapi ini sering kali berarti mereka harus melebur ke dalam identitas Melayu yang lebih luas, meninggalkan identitas Mandailing yang lebih spesifik. Jaringan sosial yang dibentuk di luar komunitas Mandailing tradisional

dapat mempercepat mobilitas sosial, tetapi juga mengurangi keterikatan dengan budaya asli mereka.

H. Peran Keluarga, Komunitas, dan Organisasi

Keluarga sebagai unit sosial dasar memiliki peran fundamental dalam proses pembentukan identitas etnis. Dalam keluarga Mandailing, pengajaran bahasa lokal menjadi salah satu cara utama untuk memastikan kesinambungan identitas budaya. Bahasa adalah alat utama komunikasi yang menghubungkan generasi muda dengan sejarah, nilai-nilai, dan warisan leluhur. Penggunaan bahasa Mandailing dalam komunikasi sehari-hari di dalam rumah memperkuat keterikatan emosional dengan identitas etnis, karena bahasa adalah cerminan dari cara pandang dan tradisi lokal. Lebih dari itu, dalam keluarga juga diajarkan tentang asal-usul genealogis, yang mencakup pengetahuan mengenai marga dan silsilah, serta peran penting leluhur dalam komunitas.

Selain bahasa, keluarga juga berfungsi sebagai wadah untuk mempelajari adat-istiadat, norma, dan etika yang terkait dengan etnisitas. Misalnya, di dalam budaya Mandailing, pengenalan terhadap sistem kekerabatan, aturan pernikahan, serta ritual-ritual adat seperti "Horja Godang" atau upacara-upacara besar lainnya, sering kali dipelajari sejak kecil. Pemahaman ini memberikan anggota keluarga, khususnya generasi muda, landasan untuk menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai etnis. Keluarga dengan demikian menjadi sarana pendidikan sosial yang pertama, tempat di mana etnisitas dihayati bukan hanya sebagai identitas abstrak, tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari.

Keluarga juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas etnis di tengah masyarakat modern yang sering kali homogen secara budaya. Ketika anggota keluarga, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan atau di luar daerah asal (seperti diaspora Mandailing di Malaysia), berhadapan dengan tekanan untuk berasimilasi, keluarga berfungsi sebagai "benteng" pelindung dari pengaruh luar. Melalui perayaan hari besar keagamaan,

kegiatan keluarga yang melibatkan adat Mandailing, serta upaya mempertahankan pola pengasuhan tradisional, keluarga menjadi aktor utama dalam memitigasi proses asimilasi yang dapat mengikis identitas etnis.

Kedua, Komunitas, sebagai agregasi dari beberapa keluarga, memperkuat identitas etnis dengan menciptakan ruang sosial di mana interaksi antaranggota etnis lebih intensif. Di kalangan Mandailing, ikatan komunitas berbasis marga atau "punguan" sangat kuat. Ini adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan garis keturunan yang berperan dalam menjaga solidaritas sosial, ekonomi, dan budaya. Punguan menjadi tempat di mana norma-norma budaya ditransmisikan melalui interaksi sosial antaranggota. Dalam komunitas ini, nilai-nilai seperti gotong royong (marsialap ari) dan dukungan kolektif menjadi manifestasi konkret dari identitas etnis yang terjaga.

Selain berfungsi sebagai wadah interaksi sosial, komunitas juga berperan dalam melestarikan adat-istiadat melalui pelaksanaan ritual-ritual kolektif. Upacara adat, seperti pernikahan (marbagas) dan kematian (marpangir), yang melibatkan banyak anggota komunitas, menjadi momen penting dalam penguatan identitas etnis. Acara-acara ini tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga bersifat simbolis, karena melibatkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui partisipasi dalam kegiatan komunitas, setiap individu memperdalam keterikatan mereka dengan etnisitas mereka dan memperkuat rasa memiliki terhadap identitas Mandailing.

Di era modern, komunitas Mandailing juga telah berkembang menjadi jaringan yang lebih kompleks dengan adanya diaspora di perkotaan besar atau di luar negeri. Komunitas-komunitas Mandailing di daerah perantauan tetap menjaga hubungan erat dengan komunitas asal melalui berbagai bentuk komunikasi dan pertemuan reguler. Mereka mengadakan kegiatan bersama seperti pertemuan adat, perayaan keagamaan, dan diskusi budaya yang membantu menjaga ikatan dan memperkuat etnisitas di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian,

komunitas tidak hanya bertindak sebagai ruang sosial tetapi juga sebagai alat strategis untuk mempertahankan etnisitas dalam konteks migrasi dan perubahan sosial yang cepat.

Ketiga, Organisasi formal dan informal yang berbasis etnisitas memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan etnisasi, terutama di luar lingkungan lokal atau keluarga.⁵⁹ Dalam konteks Mandailing, organisasi-organisasi berbasis marga atau daerah asal, seperti "Punguan Mandailing" atau "Persatuan Mandailing," berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan mempromosikan identitas budaya. Organisasi ini sering kali mengadakan acara budaya, seperti festival, seminar, atau pelatihan yang terkait dengan seni, musik, dan tari Mandailing. Dengan cara ini, organisasi etnis bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya individu-individu dengan latar belakang yang sama, tetapi juga menjadi agen aktif dalam pelestarian budaya.⁶⁰

Organisasi etnis juga memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok etnis tertentu. Di banyak tempat, organisasi Mandailing terlibat dalam advokasi kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat Mandailing di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, mereka dapat berperan dalam memperjuangkan pengakuan formal terhadap adat Mandailing atau dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat di daerah asal. Selain itu, organisasi-organisasi ini sering berperan dalam menyalurkan bantuan sosial atau ekonomi kepada anggotanya, baik melalui pemberian beasiswa, pelatihan kerja, atau bentuk dukungan lainnya yang membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas Mandailing.

Dalam konteks diaspora, organisasi Mandailing juga berfungsi sebagai penghubung antara komunitas di perantauan dan kampung halaman. Mereka mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sosial dan budaya, tetapi juga ekonomi, seperti program-

⁵⁹ Karner, *Ethnicity and Everyday Life*; Milton J. Esman, *Ethnic Politics* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1994).

⁶⁰ Holst, *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia*.

program pengembangan kampung halaman (community development). Dengan memobilisasi sumber daya dari anggota diaspora, organisasi ini mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan ekonomi di daerah asal. Hal ini memperkuat keterikatan etnis antaranggota komunitas, sekaligus menunjukkan bahwa etnisitas dapat menjadi basis solidaritas yang produktif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.⁶¹

Keempat, pendidikan formal sering menjadi medium penting dalam proses etnisasi, terutama ketika kurikulum mencakup pengetahuan tentang sejarah lokal dan identitas etnis. Di kalangan Mandailing, meskipun sistem pendidikan modern tidak selalu memasukkan pelajaran khusus tentang budaya lokal, banyak sekolah atau institusi pendidikan berbasis komunitas yang memasukkan unsur-unsur budaya Mandailing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti seni tari, musik gondang, dan bahasa Mandailing sering kali diajarkan di luar kurikulum formal, membantu generasi muda memahami dan merangkul identitas etnis mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga budaya.

Agama juga memiliki peran sentral dalam proses etnisasi, terutama di kalangan masyarakat yang sangat religius seperti Mandailing, yang mayoritas beragama Islam. Masjid dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi komunitas, di mana identitas etnis dan keagamaan sering kali saling terkait. Dalam banyak upacara adat, unsur-unsur Islam turut hadir, menunjukkan bagaimana etnisitas dan agama terjalin erat. Pendidikan agama juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai yang relevan

⁶¹ Linda Sunarti, Raisye Soleh Haghia, and Noor Fatia Lastika Sari, "The Bugis Diaspora in Malaysia: A Quest for Cultural Identity on Collective Memories through Social Media," *Cogent Arts & Humanities* 9, no. 1 (December 31, 2022), <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2066765>; Lubis, "The Indian Diaspora, Absences, Silences and the Margin: Restructuring Indian Diaspora Studies"; Peter Mandaville, "Reimagining Islam in Diaspora: The Politics of Mediated Community," *Gazette* 63, no. 2–3 (2001): 169–86, <https://doi.org/10.1177/0016549201063002005>; "Diaspora Activism and the Dynamics of Voice," *The Arab Spring Abroad* (Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/10.1017/9781108980036.002>; Gabriel, "Nation and Contestation in Malaysia: Diaspora and Myths of Belonging in the Narratives of K. S. Maniam."

dengan adat Mandailing, seperti rasa hormat terhadap leluhur, pentingnya keluarga, dan gotong royong.

Selain itu, lembaga agama sering kali menjadi tempat di mana masyarakat Mandailing berinteraksi dan memperkuat solidaritas mereka. Misalnya, dalam konteks diaspora, masjid-masjid atau komunitas Muslim Mandailing di luar negeri sering kali mengadakan pengajian atau pertemuan yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mencakup diskusi budaya. Ini memungkinkan anggota komunitas mempertahankan identitas etnis mereka sambil menavigasi identitas religius dalam lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, agama dan pendidikan menjadi dua institusi yang saling melengkapi dalam memperkuat proses etnisasi di tengah perubahan sosial yang cepat.

Bab IV Transformasi Identitas: Tantangan dan Peluang Diaspora Mandailing

Bagian ini merupakan uraian seputar Transformasi identitas yang telah menjadi isu sentral bagi diaspora Mandailing di era modern, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Diaspora Mandailing di Malaysia, yang awalnya berakar kuat pada tradisi dan adat istiadat Sumatera Utara, kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan budaya mereka dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat modern. Dalam konteks ini, proses transformasi identitas tidak hanya melibatkan aspek kultural semata, tetapi juga mencakup negosiasi identitas di ranah sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global.⁶²

Tantangan utama yang dihadapi oleh diaspora Mandailing adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan identitas etnis dan budaya mereka di tengah tekanan asimilasi dan modernisasi.⁶³ Generasi muda Mandailing sering kali dihadapkan pada dilema antara mengadopsi identitas Melayu yang dominan di Malaysia atau terus mempertahankan tradisi Mandailing yang khas. Selain itu, globalisasi dan urbanisasi mempercepat perubahan dalam cara komunitas Mandailing memandang diri mereka sendiri, di mana nilai-nilai tradisional dan ikatan komunitas menghadapi tantangan dari gaya hidup modern dan teknologi yang semakin mendunia.

Di sisi lain, era modern juga membawa peluang bagi diaspora Mandailing untuk memperkaya identitas mereka. Penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan komunitas Mandailing untuk terhubung dengan jaringan diaspora global, berbagi pengetahuan tentang warisan budaya, dan memperkuat solidaritas etnis. Selain itu, transformasi identitas ini juga membuka ruang bagi kreativitas dalam menavigasi antara tradisi dan modernitas,

⁶² Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*; Lubis, "Mainstreaming the Minorities: The Case of the Mandailings in Malaysia and Indonesia"; Lubis, "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources.*"

⁶³ Lubis, "Janus-Faced Politics: The State and Academe Collusion in the Perpetuation of Racial Ideologies in West Malaysia."

menciptakan bentuk-bentuk baru identitas hibrid yang tetap menghormati akar budaya Mandailing sambil merespons tuntutan dunia yang semakin kosmopolitan.

A. Tantangan Mobilitas Sosial di Era Modern

Meski terdapat peluang untuk mobilitas sosial, orang Mandailing di Malaysia masih menghadapi tantangan dalam mencapai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, terutama dalam era modern di mana kompetisi ekonomi semakin ketat. Sektor-sektor pekerjaan yang dulu didominasi oleh bumiputera kini semakin terbuka bagi non-bumiputera, dan globalisasi menambah dimensi baru dalam persaingan pekerjaan di pasar kerja . Di sisi lain, orang Mandailing yang tinggal di daerah perkotaan lebih cenderung menghadapi tantangan yang terkait dengan urbanisasi dan perubahan sosial, yang dapat menghalangi mereka dari mobilitas sosial vertikal.

Generasi muda Mandailing juga dihadapkan pada pilihan identitas yang kompleks, di mana mereka harus menavigasi antara tuntutan untuk mengadopsi identitas Melayu yang lebih dominan atau mempertahankan warisan budaya Mandailing mereka. Proses ini berdampak langsung pada kesempatan mereka untuk bergerak dalam struktur sosial ekonomi Malaysia. Mereka yang memilih untuk berintegrasi ke dalam komunitas Melayu yang lebih besar mungkin memiliki akses yang lebih baik ke peluang ekonomi, tetapi ini bisa mengorbankan warisan budaya mereka .

Dengan demikian, mobilitas sosial orang Mandailing di Malaysia adalah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, jaringan sosial, serta kebijakan afirmatif negara. Meski ada peluang untuk naik kelas sosial, tantangan tetap ada, terutama bagi mereka yang masih terperangkap dalam keterbatasan ekonomi atau kurang terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis tentang mobilitas sosial Mandailing harus

mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik identitas, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik .

B. Identitas Hibrida: Perubahan Identitas Mandailing di Malaysia

Konsep transformasi identitas mengacu pada proses di mana identitas individu atau kelompok berubah seiring waktu akibat interaksi dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Menurut Stuart Hall, identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sebuah proses yang selalu dibentuk dan diubah melalui diskursus dan praktik sosial.⁶⁴ Dalam pandangan Hall, identitas adalah hasil dari representasi sosial yang terus menerus, di mana individu atau kelompok berinteraksi dengan kekuatan sosial-politik yang ada, seperti migrasi, kolonialisme, dan globalisasi. Oleh karena itu, identitas bersifat dinamis dan berubah seiring dengan perubahan konteks sejarah dan sosial yang mengitarinya.

Sementara itu, Anthony Giddens melihat transformasi identitas sebagai bagian dari modernitas dan globalisasi.⁶⁵ Menurut Giddens, individu di era modern memiliki lebih banyak pilihan dan fleksibilitas dalam membentuk identitas mereka karena peningkatan interaksi lintas budaya dan arus informasi. Dalam situasi seperti ini, identitas bukan lagi ditentukan oleh tradisi atau kelompok asal semata, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman baru dan eksposur terhadap dunia yang lebih luas. Giddens menekankan bahwa identitas di era modern bersifat refleksif, di mana individu secara terus-menerus menyesuaikan dan meredefinisi diri mereka sesuai dengan kondisi lingkungan dan interaksi yang mereka alami.⁶⁶

Edward Said, melalui konsep "Orientalism," juga memberikan pandangan mengenai transformasi identitas, terutama dalam konteks kekuasaan dan representasi. Said menyoroti bagaimana identitas kelompok, khususnya identitas kolonial dan pascakolonial, sering kali

⁶⁴ Stuart. Hall, "The West and the Rest: Discourse and Power," *Race and Racialization, 2E: Essential Readings*, 1992, 85–95.

⁶⁵ Ignacio Rubio Carriquiriborde, "The Sociology of Anthony Giddens," *Revista Mexicana de Sociología* 67, no. 1 (2003): 207–10, <https://doi.org/1>.

⁶⁶ Carriquiriborde; Roger Allen, Edward W. Said, and David Barsamian, "Culture and Resistance: Conversations with Edward W. Said," *World Literature Today*, 2005, <https://doi.org/10.2307/40158854>.

dibentuk oleh pandangan atau stereotip yang diberikan oleh kelompok dominan. Identitas, menurut Said, tidak terbentuk dalam ruang kosong tetapi dalam relasi kekuasaan, di mana kelompok minoritas atau terpinggirkan sering kali mengalami perubahan identitas sebagai respons terhadap narasi yang diciptakan oleh kelompok mayoritas atau penjajah.⁶⁷ Dalam konteks ini, transformasi identitas bisa menjadi cara bagi kelompok terpinggirkan untuk melawan atau menegosiasikan ulang posisi mereka dalam masyarakat yang lebih luas.

Identitas hibrid adalah konsep yang merujuk pada perpaduan atau campuran elemen-elemen budaya yang berbeda, menghasilkan identitas baru yang dinamis dan fleksibel.⁶⁸ Dalam masyarakat multietnis seperti Malaysia, identitas hibrid muncul dari interaksi yang terus-menerus antara berbagai kelompok etnis, terutama dalam konteks di mana identitas etnis menjadi bagian dari negosiasi politik dan sosial. Alih-alih mempertahankan identitas tunggal atau statis, individu atau kelompok sering kali memadukan elemen dari identitas budaya yang berbeda untuk membentuk identitas baru yang lebih kompleks. Misalnya, seseorang bisa mengadopsi nilai-nilai Melayu dalam kehidupan publik dan sosial untuk memperoleh akses politik dan ekonomi, sementara tetap mempertahankan aspek-aspek budaya asli seperti bahasa, adat, atau agama dalam kehidupan pribadi mereka.

Proses pembentukan identitas hibrid juga sering kali merupakan respons terhadap tekanan eksternal, seperti kebijakan asimilasi atau marginalisasi kelompok etnis minoritas.⁶⁹ Namun, hibriditas tidak selalu merupakan hasil dari paksaan, tetapi juga bisa menjadi cara kreatif bagi individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, identitas hibrid mencerminkan kenyataan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang seiring dengan interaksi lintas budaya.

⁶⁷ Allen, Said, and Barsamian, "Culture and Resistance: Conversations with Edward W. Said."

⁶⁸ Pieterse, "Globalization as Hybridization."

⁶⁹ Ernest Gellner, "Culture, Identity and Politics," *Cambridge: Cambridge University Press*, 1995; Smith, "Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism."

Hasilnya, identitas hibrid tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya, tetapi juga memperkaya dinamika sosial dengan menciptakan ruang bagi ekspresi identitas yang lebih beragam dan cair.

Konsep Identitas Hibrida Identitas hibrida merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok mengintegrasikan elemen-elemen dari dua atau lebih identitas kultural yang berbeda, menghasilkan bentuk identitas yang baru. Dalam konteks Mandailing di Malaysia, hibriditas identitas terjadi sebagai respons terhadap interaksi dengan budaya Melayu, dan sering kali melibatkan adopsi elemen-elemen budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari orang Mandailing. Proses ini bukanlah hal yang sederhana; melainkan, ia mencakup penyesuaian, negosiasi, dan kadang-kadang konflik antara identitas Mandailing yang lebih tradisional dan identitas Melayu yang lebih dominan .

Identitas Mandailing awalnya kuat dan terikat erat dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan bahasa yang unik. Sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia, orang Mandailing memiliki kebudayaan yang kaya, termasuk bahasa Mandailing dan adat istiadat yang khas, seperti upacara pernikahan, perayaan panen, dan tradisi Gordang Sambilan . Ketika orang Mandailing bermigrasi ke Malaysia, mereka membawa serta warisan budaya ini, yang menjadi bagian penting dari identitas mereka di negara baru. Namun, ketika mereka berinteraksi dengan kelompok etnis lain, terutama Melayu, proses hibridisasi mulai terjadi.

Proses Melayunisasi Proses Melayunisasi adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap hibriditas identitas Mandailing. Melayunisasi mengacu pada adopsi unsur-unsur budaya Melayu, baik dalam aspek bahasa, perilaku, dan praktik keagamaan. Sebagai contoh, banyak orang Mandailing yang mulai menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari, mengadopsi tradisi keagamaan dan kultural Melayu, serta terlibat dalam praktik sosial yang berkaitan dengan komunitas Melayu . Proses ini sering kali dipicu

oleh kebijakan negara yang mendorong integrasi dan harmoni antar etnis, terutama di kalangan bumiputera.

Di tingkat individu, identitas hibrida Mandailing sering kali terlihat dalam cara orang Mandailing menjalani kehidupan sehari-hari. Generasi muda Mandailing yang lahir dan besar di Malaysia cenderung memiliki identitas yang lebih kompleks, di mana mereka mungkin mengidentifikasi diri sebagai Melayu tetapi tetap merayakan tradisi Mandailing di tingkat keluarga. Misalnya, mereka mungkin merayakan hari raya seperti Idul Fitri dengan cara yang menggabungkan tradisi Melayu dan Mandailing, seperti penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi, tetapi tetap mempertahankan praktik-praktik unik dari tradisi Mandailing dalam upacara keluarga .

Di tingkat komunitas, hibriditas identitas juga terlihat dalam bagaimana komunitas Mandailing berinteraksi dengan komunitas Melayu dan etnis lainnya. Dalam banyak kasus, komunitas Mandailing di Malaysia membentuk jaringan sosial yang mencakup individu dari berbagai latar belakang etnis. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkolaborasi, yang selanjutnya memperkuat proses hibridisasi identitas. Komunitas Mandailing sering kali terlibat dalam kegiatan lintas etnis, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi, yang mengarah pada penguatan identitas hibrida mereka .

Meskipun hibriditas identitas Mandailing dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi yang positif, proses ini juga menimbulkan tantangan. Beberapa orang Mandailing merasa terancam oleh hilangnya identitas budaya asli mereka. Mereka khawatir bahwa generasi muda, yang semakin terpapar pada budaya Melayu dan gaya hidup modern, mungkin akan melupakan tradisi dan bahasa Mandailing yang telah diwariskan. Dalam beberapa kasus, konflik antara generasi tua dan muda muncul karena perbedaan pandangan tentang pentingnya mempertahankan identitas tradisional versus adaptasi ke dalam budaya Melayu .

Respon terhadap hibriditas identitas Mandailing bervariasi di dalam komunitas. Beberapa individu dan kelompok berusaha untuk mempromosikan kebanggaan budaya dan menjaga tradisi Mandailing. Mereka mungkin mengadakan acara budaya, seperti festival, upacara adat, dan kegiatan kesenian yang menonjolkan warisan Mandailing, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap identitas mereka. Sementara itu, ada juga individu yang lebih cenderung menerima identitas Melayu sebagai bagian dari strategi sosial dan ekonomi untuk mendapatkan akses ke peluang yang lebih baik dalam masyarakat yang didominasi oleh Melayu .

Hibriditas identitas Mandailing juga memberikan kontribusi pada keragaman budaya di Malaysia. Identitas hibrida ini memperkaya budaya Malaysia secara keseluruhan, di mana elemen-elemen budaya Mandailing dapat ditemukan dalam seni, musik, makanan, dan praktik sosial di Malaysia. Misalnya, penampilan tarian dan musik Mandailing dalam acara lintas budaya menunjukkan bagaimana hibriditas dapat menciptakan interaksi positif antara berbagai kelompok etnis. Dalam hal ini, hibriditas identitas Mandailing tidak hanya mencerminkan adaptasi individu, tetapi juga menciptakan jembatan antara budaya yang berbeda dalam konteks Malaysia yang multikultural.

Kebijakan negara juga memainkan peran penting dalam proses hibriditas identitas. Dalam konteks Malaysia, pemerintah mendorong multikulturalisme dan kerjasama antar etnis melalui program-program yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial. Kebijakan ini memberikan ruang bagi komunitas Mandailing untuk mempertahankan unsur-unsur budaya mereka sambil tetap berintegrasi dengan budaya Melayu. Melalui kebijakan yang inklusif, negara menciptakan lingkungan yang mendukung hibriditas identitas, yang selanjutnya dapat mengurangi ketegangan etnis di dalam masyarakat .

Secara keseluruhan, identitas hibrida Mandailing di Malaysia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara budaya Mandailing dan Melayu, yang dipengaruhi oleh faktor sosial,

ekonomi, dan kebijakan negara. Hibriditas ini mencerminkan proses adaptasi yang dinamis, di mana individu dan komunitas Mandailing berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan warisan budaya mereka dan berintegrasi dengan budaya Melayu yang dominan. Di tengah tantangan yang dihadapi, identitas hibrida ini juga memberikan kontribusi pada keragaman budaya Malaysia dan menciptakan jembatan antara berbagai kelompok etnis. Oleh karena itu, memahami hibriditas identitas Mandailing adalah kunci untuk memahami dinamika sosial di Malaysia yang lebih luas .

Tidak semua bentuk transformasi identitas menghasilkan budaya hibrid.⁷⁰ Transformasi identitas bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya di mana transformasi tersebut berlangsung. Budaya hibrid adalah salah satu kemungkinan hasil dari proses transformasi identitas, tetapi itu bukanlah satu-satunya hasil. Budaya hibrid terjadi ketika elemen-elemen dari berbagai identitas atau budaya bercampur untuk menciptakan identitas baru yang mencerminkan perpaduan unsur-unsur tersebut. Hibriditas biasanya muncul dalam situasi di mana ada interaksi intens antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda, seperti dalam kasus migrasi, kolonialisme, atau globalisasi. Dalam konteks ini, individu atau kelompok sering kali menggabungkan elemen-elemen dari budaya asal mereka dengan budaya dominan atau budaya lain yang mereka temui. Contoh dari budaya hibrid adalah campuran praktik adat lokal dengan praktik modern dalam masyarakat multikultural.

Namun, dalam beberapa kasus, transformasi identitas dapat menghasilkan proses asimilasi alih-alih budaya hibrid. Asimilasi terjadi ketika individu atau kelompok minoritas mengadopsi sepenuhnya budaya atau identitas kelompok mayoritas, sehingga identitas asal mereka hilang atau sangat tereduksi. Proses asimilasi bisa didorong oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi, di mana kelompok minoritas merasa harus menyesuaikan diri dengan budaya

⁷⁰ Lubis, "Transformation of Mandailing Cultural Identity and Leadership."

dominan untuk mendapatkan keuntungan atau diakui secara sosial. Dalam kasus ini, transformasi identitas menghasilkan homogenisasi budaya, bukan hibriditas, karena elemen-elemen budaya minoritas cenderung ditinggalkan atau dihapus.⁷¹

Selain itu, transformasi identitas juga dapat terjadi dalam bentuk resistensi atau penegasan kembali identitas asli.⁷² Dalam situasi tertentu, tekanan untuk beradaptasi dengan budaya dominan justru dapat mendorong kelompok atau individu untuk memperkuat identitas etnis atau budaya mereka sebagai bentuk perlawanan. Hal ini dapat terjadi dalam konteks di mana kelompok minoritas merasa bahwa identitas mereka terancam, sehingga mereka secara aktif menjaga, mempromosikan, atau bahkan mempertegas unsur-unsur budaya yang membedakan mereka dari kelompok mayoritas. Dalam skenario ini, tidak terjadi hibriditas, tetapi lebih pada penguatan identitas asal sebagai bentuk pertahanan budaya.

Dengan demikian, meskipun transformasi identitas sering kali menghasilkan budaya hibrid dalam konteks interaksi lintas budaya, itu bukanlah satu-satunya hasil. Proses asimilasi atau resistensi identitas juga dapat muncul, tergantung pada kondisi sosial-politik dan dinamika kekuasaan yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam proses transformasi identitas tersebut.

C. Peran Ekonomi Sosial Orang Mandailing di Malaysia

Peran ekonomi dan sosial sangat penting dalam menjaga serta memperkuat identitas etnis Mandailing, terutama di kalangan diaspora Mandailing di Malaysia. Kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian, usaha kecil dan menengah (UKM), serta remitansi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk

⁷¹ Lubis, "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources.*"

⁷² Allen, Said, and Barsamian, "Culture and Resistance: Conversations with Edward W. Said"; Kevin Hewison, "Resisting Globalization: A Study of Localism in Thailand," *Pacific Review* 13, no. 2 (2000): 279–96, <https://doi.org/10.1080/095127400363596>.

menjaga ikatan sosial, budaya, dan solidaritas antaranggota etnis. Berikut ini adalah pembahasan mengenai peran ekonomi dan sosial melalui tiga sektor utama:

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi tradisional bagi masyarakat Mandailing, terutama di Sumatera Utara, namun peran ini juga terbawa ke diaspora Mandailing di Malaysia. Bagi sebagian besar Mandailing yang bermigrasi ke Malaysia, pertanian menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dipertahankan, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas seperti menanam padi, kelapa sawit, dan komoditas perkebunan lainnya menjadi sumber mata pencaharian yang penting bagi sebagian anggota komunitas. Selain sebagai sumber penghasilan, keterlibatan dalam sektor pertanian ini juga menjadi cara bagi komunitas Mandailing untuk menjaga keterikatan mereka dengan tanah dan alam, yang secara tradisional sangat dihargai dalam budaya mereka.

Di beberapa tempat di Malaysia, seperti di Perak dan Selangor, ada komunitas Mandailing yang masih mempertahankan praktik pertanian tradisional.⁷³ Meskipun teknologi modern telah merubah cara bertani, nilai-nilai gotong royong dan kerja kolektif tetap hidup dalam cara mereka mengelola lahan. Ini juga merupakan bentuk manifestasi dari etos kerja yang khas Mandailing, di mana prinsip-prinsip sosial seperti saling membantu dan berbagi hasil panen tetap dihormati. Keterlibatan dalam sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam mempertahankan beberapa aspek budaya Mandailing, seperti ritual syukuran hasil panen yang sering melibatkan elemen-elemen adat.

Namun, meskipun pertanian masih relevan bagi sebagian komunitas, banyak generasi muda Mandailing di Malaysia beralih ke sektor lain yang lebih modern atau urban, meninggalkan sektor pertanian yang semakin menurun. Ini menciptakan tantangan bagi

⁷³ Arifah, "Masyarakat Mandailing Di Mukim Papan, Perak, 1873-1909"; Usman. Pelly, *Urbanisasi Dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau Dan Mandailing* (LP3ES, 1994).

kelangsungan ekonomi berbasis pertanian dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, karena semakin banyak keluarga Mandailing yang berpindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih menguntungkan.

2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi salah satu pilar utama ekonomi bagi komunitas Mandailing di Malaysia. Banyak diaspora Mandailing yang terlibat dalam perdagangan, baik dalam bentuk warung kecil, restoran, maupun jasa. Keterlibatan mereka dalam UKM bukan hanya memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga, tetapi juga membantu mempertahankan dan menyebarkan budaya Mandailing melalui produk atau jasa yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, restoran yang dikelola oleh komunitas Mandailing mungkin menyajikan makanan khas Mandailing, seperti gulai ikan atau sambal tuktuk, yang tidak hanya menarik konsumen lokal tetapi juga menjadi cara untuk mempromosikan identitas budaya mereka.

Selain itu, usaha kecil yang dimiliki oleh orang Mandailing sering kali melibatkan anggota keluarga, menciptakan model ekonomi berbasis keluarga yang memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan komunitas. Ini adalah bentuk adaptasi ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai tradisional seperti kekeluargaan dan kerjasama dengan tuntutan modernisasi ekonomi. Usaha kecil juga sering menjadi pintu masuk bagi generasi muda Mandailing untuk memulai karir mereka, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pekerja dalam bisnis keluarga. Dalam konteks ini, UKM berperan sebagai salah satu motor penggerak utama mobilitas ekonomi dan sosial di kalangan diaspora Mandailing di Malaysia.

Peran UKM juga tidak terlepas dari jaringan sosial yang kuat di dalam komunitas Mandailing. Melalui jaringan ini, pelaku usaha kecil dapat berbagi informasi, sumber daya, dan bantuan dalam bentuk modal atau saran bisnis. Solidaritas komunitas ini memperkuat kemampuan UKM untuk bertahan dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif, dan sekaligus

menjadi mekanisme sosial untuk memperkuat ikatan etnis di antara anggota komunitas Mandailing. Jadi, UKM tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi individu, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat identitas kolektif di lingkungan diaspora.

3. Remitansi

Remitansi atau pengiriman uang dari anggota diaspora Mandailing yang bekerja di Malaysia ke kampung halaman mereka di Sumatera Utara memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi komunitas Mandailing, baik di tanah air maupun di perantauan. Bagi keluarga di Sumatera Utara, remitansi menjadi salah satu sumber penghasilan utama yang mendukung kesejahteraan keluarga, terutama di kalangan keluarga yang masih bergantung pada pertanian subsisten atau usaha kecil. Uang yang dikirim oleh anggota keluarga yang bekerja di Malaysia sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan rumah, serta investasi dalam usaha kecil.

Selain itu, remitansi juga menjadi cara bagi diaspora Mandailing untuk mempertahankan ikatan emosional dan sosial dengan kampung halaman mereka. Melalui remitansi, mereka dapat terlibat dalam pembangunan komunitas di kampung asal, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau infrastruktur desa lainnya. Ini memperkuat solidaritas etnis antara komunitas Mandailing di perantauan dan di tanah air, serta memberikan perasaan keterlibatan dalam perkembangan dan kesejahteraan komunitas mereka. Secara sosial, remitansi juga menjadi sarana untuk menjaga posisi dan status keluarga di dalam komunitas, karena keluarga yang menerima remitansi sering kali dianggap lebih sejahtera dan terhormat.

Namun, ada juga dimensi sosial lain dari remitansi, yaitu bagaimana pengiriman uang ini memengaruhi hubungan kekuasaan di dalam komunitas Mandailing. Dalam beberapa kasus, remitansi dapat memperlebar kesenjangan antara keluarga yang memiliki akses ke sumber daya dari diaspora dengan yang tidak. Keluarga yang menerima remitansi mungkin memiliki lebih banyak kekuatan dalam pengambilan keputusan komunitas, terutama dalam acara-acara adat

atau pertemuan masyarakat. Meskipun remitansi memiliki banyak manfaat ekonomi, juga penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap dinamika sosial di dalam komunitas Mandailing.

C. Peran Sosial dan Partisipasi Politik

Peran orang Mandailing, dalam masyarakat Malaysia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, baik dalam konteks interaksi sosial dengan etnis lain maupun dalam partisipasi politik lokal. Sebagai bagian dari diaspora Mandailing yang telah lama menetap di Malaysia, kelompok ini telah menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai interaksi mereka dengan etnis lain serta keterlibatan mereka dalam politik lokal:

1. Interaksi dengan Etnis Lain

Orang Mandailing di Malaysia, termasuk yang bermarga Nasution dan Lubis, telah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai kelompok etnis di Malaysia, seperti Melayu, Cina, dan India. Meskipun mereka adalah bagian dari komunitas diaspora, banyak orang Mandailing yang sudah diintegrasikan ke dalam identitas Melayu melalui proses asimilasi. Ini terutama berlaku bagi mereka yang beragama Islam, di mana agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Malaysia. Sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, orang Mandailing sering kali dianggap sebagai bagian dari masyarakat Melayu, terutama karena kesamaan agama, bahasa, dan beberapa aspek budaya yang telah berbaur dengan tradisi Melayu setempat.

Namun, meskipun telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu, orang Mandailing tetap mempertahankan identitas budaya mereka sendiri, terutama melalui adat istiadat dan bahasa mereka. Interaksi mereka dengan etnis lain juga sering kali diwarnai dengan rasa saling menghormati terhadap keberagaman budaya. Dalam konteks ini, banyak individu Mandailing

yang aktif dalam membangun jembatan antara komunitas mereka dengan kelompok etnis lain melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam sektor perdagangan dan bisnis, misalnya, orang Mandailing sering kali bekerja sama dengan pengusaha dari etnis Cina dan India, membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antara Mandailing dan kelompok etnis lain sering terlihat dalam konteks sehari-hari, seperti di pasar, lingkungan kerja, dan lembaga pendidikan. Orang Mandailing, terutama generasi muda, sering kali berbagi pengalaman budaya dengan teman-teman dari berbagai etnis, memperkaya keragaman budaya Malaysia. Meskipun telah berasimilasi dalam beberapa hal, banyak orang Mandailing masih mempertahankan tradisi pertemuan keluarga besar atau komunitas (punguan), yang tidak hanya memperkuat ikatan internal tetapi juga menciptakan ruang untuk interaksi lintas etnis melalui acara-acara publik.

2. Partisipasi dalam Politik Lokal

Partisipasi politik orang Mandailing di Malaysia telah meningkat seiring waktu, dengan beberapa individu dari komunitas ini memainkan peran penting dalam politik lokal. Orang-orang bermarga Nasution dan Lubis adalah di antara mereka yang aktif terlibat dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa individu Mandailing telah berhasil menduduki posisi penting di berbagai lembaga pemerintahan atau politik, dan keterlibatan mereka mencerminkan keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional Malaysia sambil tetap mempertahankan identitas etnis mereka.

Secara historis, orang Mandailing memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam sektor administrasi dan pemerintahan di Malaysia, sebagian karena banyak dari mereka memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pandangan politik yang progresif. Di beberapa wilayah, seperti Perak dan Selangor, di mana komunitas Mandailing cukup besar, mereka telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan lokal, terutama dalam hal

pembangunan komunitas dan ekonomi.⁷⁴ Keterlibatan mereka dalam partai politik seperti UMNO (United Malays National Organisation) atau partai politik lain yang mendukung kepentingan Melayu menunjukkan bahwa orang Mandailing juga terlibat dalam dinamika politik arus utama di Malaysia.

Selain berpartisipasi dalam politik formal, individu Mandailing juga terlibat dalam aktivitas advokasi sosial dan komunitas yang memiliki dampak politik. Mereka sering terlibat dalam isu-isu seperti pendidikan, hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan ekonomi daerah. Beberapa di antara mereka juga berperan sebagai mediator antara pemerintah lokal dan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik tanah atau masalah sosial lainnya. Pengaruh politik mereka di tingkat lokal membantu memperkuat posisi komunitas Mandailing dalam diskursus nasional, terutama dalam hal integrasi sosial dan budaya.

3. Dinamika Identitas Politik dan Budaya

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas Mandailing di Malaysia, termasuk mereka yang bermarga Nasution dan Lubis, adalah bagaimana mereka menavigasi identitas etnis dan politik di tengah identitas Melayu yang dominan. Sebagai kelompok yang secara historis bermigrasi dari Sumatera, orang Mandailing sering dihadapkan pada dilema antara mempertahankan warisan budaya mereka dan berintegrasi ke dalam identitas nasional Malaysia.⁷⁵ Keterlibatan mereka dalam politik sering kali mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kedua hal ini. Banyak di antara mereka yang menggunakan platform politik untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung pluralisme budaya dan pengakuan terhadap keberagaman dalam kerangka kebangsaan Malaysia.

⁷⁴ Arifah, "Masyarakat Mandailing Di Mukim Papan, Perak, 1873-1909"; Tugby, *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*.

⁷⁵ Lubis, "Mandailing Islam across Borders"; Lubis, "Transformation of Mandailing Cultural Identity and Leadership."

Identitas Mandailing juga memainkan peran dalam pembentukan solidaritas politik dengan kelompok etnis lain. Misalnya, mereka cenderung mendukung kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan kerukunan antar etnis, mengingat pengalaman mereka sendiri sebagai kelompok diaspora. Selain itu, orang Mandailing yang sukses dalam politik sering kali menjadi simbol bagi komunitas mereka, menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang minoritas, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, orang Mandailing, terutama yang bermarga Nasution dan Lubis, telah memainkan peran penting dalam memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan politik di Malaysia. Melalui interaksi yang harmonis dengan kelompok etnis lain dan keterlibatan dalam politik lokal, mereka membantu memajukan cita-cita pluralisme dan keragaman di negara ini. Tantangan bagi mereka adalah mempertahankan keseimbangan antara identitas etnis dan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang di Malaysia.

D. Diskriminasi dan Stereotip

Komunitas Mandailing di Malaysia, meskipun telah berasimilasi dalam beberapa hal dengan masyarakat Melayu, tetap menghadapi tantangan diskriminasi dan stereotip yang bisa berdampak pada posisi mereka di masyarakat.⁷⁶ Sebagai kelompok diaspora dari Indonesia, orang Mandailing terkadang dianggap "pendatang" dalam masyarakat, meskipun mereka telah lama tinggal dan berkontribusi di Malaysia. Stigma ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai peluang, termasuk pekerjaan dan layanan sosial. Meskipun secara kultural mereka berbagi banyak kesamaan dengan orang Melayu, identitas Mandailing yang unik sering

⁷⁶ Nor Haslinda Khoo, Abdul Halim, and Yunus Sauman, "Rumah Besar Penghulu Raja Bilah Di Papan Dan Hubungannya Dengan Masyarakat Mandailing Di Perak 1896-1940," *Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2023, 16–23; Lubis, "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources.*"

kali menjadi sasaran stereotip tertentu, seperti dianggap kurang "asli" atau tidak cukup mencerminkan nilai-nilai nasional Malaysia.

Diskriminasi ini seringkali bersifat implisit, seperti dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal atau dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Orang Mandailing yang tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian integral dari identitas Melayu terkadang dihadapkan pada kendala birokrasi dan sosial yang lebih besar. Misalnya, di beberapa daerah, ada kasus di mana individu dari komunitas Mandailing mungkin mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap hak-hak tanah atau kesempatan politik yang biasanya diberikan kepada kelompok Melayu yang lebih mapan.

Selain itu, stereotip yang melekat pada komunitas Mandailing bisa menciptakan ketegangan sosial. Di kalangan masyarakat yang lebih luas, orang Mandailing mungkin dianggap sebagai kelompok yang terpisah secara kultural, bahkan jika mereka telah lama beradaptasi dengan norma-norma Melayu. Hal ini bisa memicu perlakuan berbeda, baik dalam konteks profesional maupun sosial, di mana komunitas Mandailing tidak selalu mendapatkan pengakuan yang setara dengan kelompok etnis lain di Malaysia.

Tantangan lain terkait diskriminasi adalah ketika orang Mandailing mencoba untuk mempertahankan identitas etnis mereka dalam lingkungan yang menekankan homogenitas budaya. Ada tekanan sosial yang kuat bagi mereka untuk mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu secara penuh, yang dapat mempersulit upaya untuk melestarikan elemen-elemen budaya Mandailing, seperti bahasa dan adat-istiadat, yang mungkin dianggap sebagai penghalang integrasi. Tekanan ini dapat menciptakan ketegangan internal di antara anggota komunitas yang ingin mempertahankan warisan budaya mereka sembari menyesuaikan diri dengan tuntutan identitas nasional.

Namun, komunitas Mandailing juga telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi diskriminasi dan stereotip ini. Melalui keterlibatan yang lebih besar dalam politik, ekonomi,

dan pendidikan, mereka secara bertahap mengatasi hambatan-hambatan ini. Solidaritas internal di kalangan Mandailing juga membantu mengurangi dampak diskriminasi, karena mereka saling mendukung dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan tetap ada, ada juga strategi yang diterapkan oleh komunitas untuk mengatasinya.

1. Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan tantangan yang signifikan bagi komunitas Mandailing di Malaysia, terutama karena mereka berada dalam lingkungan yang sangat beragam secara budaya dan secara politis mendorong homogenisasi identitas Melayu.⁷⁷ Salah satu aspek utama dari budaya Mandailing yang terancam adalah bahasa. Bahasa Mandailing, yang menjadi inti dari identitas budaya mereka, semakin jarang digunakan di kalangan generasi muda yang lebih memilih bahasa Melayu atau bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Ini menjadi perhatian serius karena bahasa adalah salah satu elemen penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya.

Selain bahasa, adat-istiadat Mandailing juga menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Upacara adat, seperti pernikahan tradisional (*marbagas*) atau ritual kematian (*marpangir*), semakin jarang dipraktikkan di lingkungan urban dan modern. Banyak orang Mandailing yang tinggal di perkotaan atau daerah diaspora lainnya memilih upacara yang lebih sederhana dan tidak melibatkan tradisi adat sepenuhnya. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, atau tekanan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, tantangan pelestarian budaya sangat terkait dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi di Malaysia.

Namun, pelestarian budaya Mandailing tidak sepenuhnya terabaikan. Beberapa komunitas Mandailing, terutama yang berada di daerah yang lebih tradisional atau terorganisir,

⁷⁷ Lubis, "Transformation of Mandailing Cultural Identity and Leadership."

tetap berusaha melestarikan budaya mereka melalui kegiatan komunitas. Misalnya, ada organisasi budaya Mandailing yang aktif menyelenggarakan festival tahunan, acara budaya, serta pelatihan seni tradisional seperti tari Tor-Tor dan musik gondang. Upaya ini menjadi salah satu bentuk resistensi terhadap arus modernisasi yang dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya mereka.

Pelestarian budaya Mandailing juga terkait dengan transmisi pengetahuan antar generasi.⁷⁸ Orang tua dan sesepuh komunitas sering kali menjadi pelindung nilai-nilai dan tradisi yang penting, serta berusaha untuk menanamkan hal-hal tersebut kepada generasi muda. Meski demikian, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa generasi berikutnya tertarik dan bersedia untuk melanjutkan tradisi ini di tengah dinamika modernisasi yang kuat. Kesadaran generasi muda tentang pentingnya identitas budaya menjadi krusial dalam konteks ini.

Di sisi lain, pelestarian budaya juga menghadapi tantangan dari keterbatasan sumber daya. Tidak semua komunitas Mandailing di Malaysia memiliki akses yang cukup untuk mendukung kegiatan pelestarian budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk dukungan dari pemerintah atau pihak swasta dalam memberikan bantuan finansial atau fasilitas bagi kegiatan budaya ini. Jika tidak ada dukungan yang memadai, ada risiko bahwa budaya Mandailing akan semakin tergerus oleh modernitas dan homogenisasi budaya.

2. Peluang untuk Perkembangan Komunitas Mandailing

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Mandailing di Malaysia juga memiliki peluang yang signifikan untuk berkembang. Salah satu peluang utama adalah integrasi ekonomi. Dengan banyaknya orang Mandailing yang terlibat dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM), ada potensi bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

⁷⁸ Lubis.

komunitas mereka melalui pengembangan bisnis dan jaringan perdagangan yang lebih luas. Dalam konteks ini, diaspora Mandailing bisa memanfaatkan peluang di Malaysia untuk memperkuat sektor ekonomi mereka, baik melalui kerja sama dengan etnis lain maupun melalui inisiatif internal yang fokus pada pemberdayaan ekonomi komunitas.

Selain itu, pendidikan juga merupakan peluang besar bagi komunitas Mandailing untuk berkembang. Banyak orang Mandailing yang berhasil dalam pendidikan formal, dan ini membuka pintu bagi generasi muda mereka untuk mencapai posisi yang lebih strategis di berbagai bidang, termasuk politik, pemerintahan, dan sektor swasta. Dengan akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi, komunitas Mandailing dapat berperan lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Pendidikan juga memberikan alat bagi generasi muda untuk mempertahankan budaya mereka sambil beradaptasi dengan dunia modern.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah keterlibatan dalam politik lokal dan nasional. Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki sejarah panjang di Malaysia, orang Mandailing dapat menggunakan pengaruh politik mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta untuk memperkuat posisi komunitas di ranah publik. Keterlibatan dalam politik memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang relevan bagi perkembangan ekonomi, budaya, dan sosial komunitas mereka. Dengan semakin banyaknya individu Mandailing yang terlibat dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, ada harapan bahwa suara mereka akan semakin didengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan.

Selain peluang di bidang ekonomi dan politik, komunitas Mandailing juga dapat memanfaatkan tren global yang mendukung pluralisme budaya dan multikulturalisme. Dengan meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman budaya, komunitas Mandailing memiliki kesempatan untuk mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya mereka di tingkat yang lebih luas. Festival budaya, pertunjukan seni, serta kegiatan budaya lainnya dapat menjadi

platform untuk memperkenalkan budaya Mandailing kepada masyarakat Malaysia yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kebanggaan akan identitas etnis mereka.

Terakhir, teknologi digital dan media sosial memberikan peluang baru bagi komunitas Mandailing untuk mempertahankan dan menyebarkan identitas mereka. Melalui platform online, komunitas dapat mengorganisir dan mempromosikan kegiatan budaya, mendokumentasikan tradisi, serta memperkuat jaringan diaspora Mandailing di seluruh dunia. Teknologi ini memberikan alat yang lebih fleksibel bagi mereka untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih luas dalam upaya pelestarian budaya. Dengan memanfaatkan peluang ini, komunitas Mandailing di Malaysia dapat memperkuat identitas mereka sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kontestasi identitas di antara para migran di Malaysia merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan persaingan antar kelompok etnis dan migran yang beragam dalam hal identitas budaya, sosial, ekonomi, dan politik.⁷⁹ Dalam masyarakat multietnis seperti Malaysia, identitas menjadi faktor penting yang memengaruhi hubungan antar kelompok, di mana berbagai kelompok migran—Mandailing, Jawa, Bugis, Tionghoa, India, dan lainnya—berusaha menegosiasikan posisi mereka dalam hierarki sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, politik etnik, dan dinamika sosial.

3. Politik Etnik dan Identitas Nasional

Kontestasi identitas migran di Malaysia sering kali dipengaruhi oleh kebijakan negara yang memprioritaskan identitas etnis tertentu, terutama identitas Melayu melalui kebijakan Bumiputera. Kebijakan ini memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi kelompok Melayu dan kelompok yang diakui sebagai Bumiputera, termasuk beberapa kelompok migran

⁷⁹ Abbott and Gregorios-Pippas, "Islamization in Malaysia: Processes and Dynamics"; Silk, "Bangsa Malaysia": Global Sport, the City and the Mediated Refurbishment of Local Identities"; Shamsul, "Nations-of-Intent in Malaysia"; Azman et al., *Malaysian Youth in the Global World: Issues and Challenges*.

asal Nusantara seperti Mandailing, Bugis, dan Jawa, yang diidentifikasi lebih dekat dengan Melayu karena kesamaan agama Islam. Namun, kelompok migran lainnya, seperti Tionghoa dan India, yang secara historis memiliki peran ekonomi penting di Malaysia, sering kali merasa berada dalam posisi marjinal secara politik meskipun mereka memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks ini, kontestasi identitas muncul dalam bentuk upaya dari berbagai kelompok migran untuk mengklaim kedekatan dengan identitas Melayu atau untuk menegosiasikan status mereka dalam struktur sosial Malaysia yang dibentuk oleh politik etnik. Misalnya, beberapa kelompok migran seperti Mandailing dan Bugis berusaha menguatkan narasi kedekatan budaya dengan Melayu untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari "bangsa Melayu" dan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan Bumiputera. Pada saat yang sama, kelompok lain, seperti Tionghoa dan India, menegosiasikan identitas mereka melalui upaya mempertahankan budaya dan identitas etnis mereka, sambil tetap mencari cara untuk terintegrasi dalam struktur ekonomi dan sosial yang didominasi oleh etnis Melayu.

4. Kontestasi Ekonomi dan Sosial

Selain politik etnik, kontestasi identitas di antara para migran juga tercermin dalam persaingan ekonomi dan sosial. Kelompok-kelompok migran di Malaysia sering kali berkompetisi untuk mengakses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesempatan sosial yang terbatas. Kelompok Tionghoa, yang secara tradisional menguasai sektor ekonomi swasta, sering kali dipandang sebagai pesaing ekonomi oleh kelompok etnis Melayu dan beberapa kelompok migran asal Nusantara yang lebih terfokus pada sektor-sektor ekonomi informal atau pekerjaan pemerintah. Kontestasi ini bukan hanya tentang kekayaan material, tetapi juga tentang status sosial, di mana identitas etnis memainkan peran penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya ini.

Bagi kelompok-kelompok migran seperti Mandailing, Bugis, atau Jawa, yang sering kali diidentifikasi sebagai Bumiputera, integrasi ke dalam masyarakat Melayu memberikan keuntungan sosial tertentu, tetapi mereka tetap menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka dalam masyarakat yang menekankan asimilasi dengan budaya Melayu. Di sisi lain, bagi kelompok Tionghoa dan India, yang tidak diakui sebagai Bumiputera, mereka harus menavigasi struktur sosial yang menempatkan mereka dalam posisi marginal secara politik, meskipun dalam beberapa kasus mereka memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.

5. Resistensi dan Negosiasi Identitas

Kontestasi identitas juga melibatkan resistensi terhadap tekanan asimilasi dan upaya untuk mempertahankan identitas budaya yang khas. Beberapa kelompok migran memilih untuk memperkuat identitas etnis mereka, bukan sebagai bentuk perlawanan terbuka, tetapi sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan solidaritas komunitas mereka. Misalnya, komunitas Tionghoa dan India di Malaysia memiliki jaringan sekolah, organisasi sosial, dan ritual budaya yang memungkinkan mereka mempertahankan bahasa, agama, dan adat istiadat mereka di tengah tekanan untuk berintegrasi dengan identitas nasional yang didominasi oleh Melayu.

Negosiasi identitas ini sering kali bersifat fleksibel dan situasional, di mana kelompok-kelompok migran dapat menekankan atau mereduksi aspek tertentu dari identitas mereka tergantung pada konteks sosial-politik. Di satu sisi, mereka mungkin mengadopsi unsur-unsur identitas Melayu untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak sosial dan politik, tetapi di sisi lain mereka tetap mempertahankan identitas budaya asli mereka dalam ruang-ruang privat atau dalam komunitas mereka sendiri.

Bab V

Politik Etnik, Menjadi Melayu dan Budaya Hibrid

Bagian ini menjelaskan bagaimana politik etnik secara konseptual dan di level praktis, kemudian bagaimana proses orang Mandailing menjadi Melayu di Malaysia, dan pada akhirnya mengalami hibridasi budaya. Dalam konteks masyarakat multietnis di Malaysia, politik etnik memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan struktur sosial. Click or tap here to enter text. Identitas etnik tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai alat politik yang menentukan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan status sosial. Proses "menjadi Melayu," misalnya, melibatkan dinamika politik etnik di mana individu atau kelompok etnis minoritas beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan etnis Melayu, sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat kesatuan nasional. Kebijakan negara seperti Dasar Ekonomi Baru (NEP) telah memperkuat peran dominan Melayu, memengaruhi kelompok-kelompok etnis minoritas untuk menyesuaikan identitas mereka, baik secara formal maupun informal, guna memperoleh manfaat sosial, politik, dan ekonomi.

Namun, proses "menjadi Melayu" tidak selalu berlangsung secara linear atau total. Sebaliknya, dalam konteks interaksi antarbudaya, muncul fenomena budaya hibrid, di mana elemen-elemen dari berbagai identitas etnis, seperti Tionghoa, India, dan etnis minoritas lainnya, bercampur dan menciptakan identitas baru yang dinamis. Budaya hibrid ini mencerminkan kompleksitas hubungan sosial di Malaysia, di mana masyarakat tidak hanya mengasimilasi norma-norma dominan, tetapi juga mempertahankan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya asli mereka. Dalam proses ini, lahirlah bentuk-bentuk identitas baru yang melintasi batas-batas etnis tradisional, sekaligus mencerminkan keragaman dan fleksibilitas identitas dalam tatanan sosial-politik yang sangat dipengaruhi oleh politik etnik.

C. Konsep Etnisasi

Etnisasi merupakan konsep sosiologi untuk menjelaskan realitas social bagaimana identitas etnis diciptakan, dipertahankan, dan diubah dari waktu ke waktu. Teori ini menyatakan bahwa etnisitas bukanlah karakteristik tetap atau esensial dari suatu kelompok, melainkan konstruksi sosial yang muncul melalui berbagai proses dan interaksi. Fredrik Barth, salah satu tokoh penting dalam studi etnisitas, mengeksplorasi bagaimana kelompok etnis terbentuk dan dipertahankan, dan bagaimana perbedaan budaya menciptakan batasan social. Cara-cara di mana etnisitas memengaruhi identitas sosial, interaksi, dan struktur masyarakat dan dampak perbedaan budaya pada kohesi dan konflik sosial. Secara keseluruhan, Barth menekankan pentingnya memahami batasan etnis dalam konteks organisasi sosial dan keragaman budaya. Barth menekankan bahwa etnisitas bukanlah tentang isi budaya atau atribut tetap dari kelompok, melainkan tentang proses sosial yang membedakan kelompok-kelompok etnis melalui interaksi dan batas-batas yang mereka ciptakan.

Etnisasi adalah proses di mana identitas etnis sebuah kelompok menjadi lebih jelas atau terfokus, sering kali sebagai hasil dari interaksi sosial, politik, atau ekonomi dengan kelompok lain. Dalam konteks Malaysia, etnisasi telah dipengaruhi oleh kebijakan negara, kolonialisme, serta perubahan sosial dan politik pasca-kemerdekaan. Fredrik Barth, seorang sosiolog terkenal dalam studi etnisitas, menekankan bahwa etnisitas bukanlah kategori biologis atau kultural yang tetap, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk dan dikelola melalui interaksi antar kelompok. Menurut Barth, batas-batas etnis lebih penting daripada konten kultural di dalamnya, yang berarti bahwa identitas etnis dapat berubah tergantung pada konteks politik dan sosial. Hal ini relevan dalam kasus Mandailing di Malaysia, di mana proses pemelayuan (Melayunisasi) menjadi salah satu bentuk etnisasi yang terjadi di bawah pengaruh negara dan kebijakan afirmatif untuk bumiputera.

Dalam teori Barth, perbedaan etnisitas tidak semata-mata didasarkan pada faktor-faktor kultural yang mendasar seperti bahasa, agama, atau adat istiadat, tetapi pada batas-batas sosial yang memisahkan kelompok satu dari kelompok lainnya. Batas-batas ini bersifat cair dan terus dinegosiasikan dalam konteks interaksi antar kelompok. Misalnya, dalam konteks Malaysia, kelompok Mandailing, meskipun memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dari Melayu, seperti penggunaan bahasa Mandailing dan adat Gordang Sambilan, memilih untuk berintegrasi ke dalam identitas Melayu demi mendapatkan akses ke hak-hak istimewa bumiputera. Proses pemelayuan ini adalah bentuk penegosiasian batas etnis, di mana Mandailing beradaptasi dengan nilai-nilai dominan Melayu-Islam yang diakui oleh negara. Dengan kata lain, batas-batas etnisitas Mandailing menjadi lebih cair karena insentif politik dan ekonomi yang ditawarkan oleh negara kepada bumiputera.

Dalam proses etnisasi, ada perubahan dalam identitas kultural yang terjadi ketika kelompok-kelompok seperti Mandailing berinteraksi dengan kelompok etnis lain. Pada satu sisi, integrasi ke dalam identitas Melayu melalui pemelayuan memungkinkan mereka mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya sebagian dari identitas kultural Mandailing yang unik. Misalnya, penggunaan bahasa Mandailing semakin berkurang di kalangan generasi muda Mandailing di Malaysia, dan praktik-praktik adat tertentu mulai memudar di luar konteks perayaan resmi. Dalam hal ini, proses etnisasi juga mencakup aspek-aspek asimilasi di mana budaya yang lebih lemah secara bertahap diadopsi oleh kelompok dominan, dalam hal ini budaya Melayu yang dipromosikan oleh negara.

Namun, etnisasi tidak selalu menghasilkan asimilasi penuh. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada komunitas Mandailing di Malaysia, identitas etnis tetap dipertahankan pada tingkat tertentu meskipun ada proses integrasi ke dalam identitas Melayu. Misalnya,

banyak orang Mandailing masih merayakan upacara-upacara adat tertentu dan menjaga hubungan dengan komunitas Mandailing di Sumatra. Teori Barth menekankan bahwa identitas etnis adalah proses yang dinamis, dan kelompok-kelompok etnis sering kali terlibat dalam penciptaan ulang identitas mereka melalui interaksi dengan kelompok lain dan pengaruh eksternal. Dalam konteks ini, identitas Mandailing mungkin tetap ada meskipun sebagian besar elemen budaya mereka diintegrasikan ke dalam identitas Melayu.

Di sisi lain, teori Barth juga menyoroti bahwa etnisitas dapat menjadi alat politik dalam konteks negara yang memiliki kebijakan berbasis etnis. Di Malaysia, kebijakan afirmatif yang memberikan hak-hak istimewa kepada bumiputera telah menciptakan insentif bagi kelompok-kelompok seperti Mandailing untuk mengadopsi identitas Melayu. Hal ini mengubah dinamika batas etnis, di mana perbedaan kultural antara Mandailing dan Melayu semakin kabur karena keuntungan politik dan ekonomi yang terkait dengan pengidentifikasian diri sebagai bumiputera. Dengan demikian, teori Barth tentang konstruksi sosial etnisitas sangat relevan untuk memahami bagaimana perbedaan budaya antara kelompok Mandailing dan kelompok etnis lain di Malaysia dipertahankan, dinegosiasikan, atau diintegrasikan dalam konteks sosial-politik modern Malaysia.

Etnisasi menolak pandangan esensialis tentang etnisitas, yang mengasumsikan bahwa kelompok etnis memiliki karakteristik yang melekat dan tidak berubah. Sebaliknya, teori ini menekankan perspektif konstruksionis, yang melihat etnisitas sebagai konsep yang cair dan dinamis yang dibentuk oleh faktor sosial, politik, dan historis. Etnisasi melibatkan penciptaan dan pemeliharaan batas-batas antara kelompok etnis. Batas-batas ini dapat didasarkan pada bahasa, agama, budaya, atau karakteristik bersama lainnya. Batas-batas ini dapat diperkuat melalui ritual, simbol, dan narasi. Benedict Anderson dalam karyanya "imagined communities" (komunitas terbayang), berpendapat bahwa etnisitas dan nasionalisme adalah konstruksi sosial

yang terbentuk melalui media, sejarah, dan narasi bersama yang menghubungkan individu dengan komunitas yang lebih besar. Click or tap here to enter text.

Dalam proses pembentukan identitas etnis tersebut penting menggunakan simbol, mitos, ingatan kolektif, dan nilai-nilai budaya. Etnisitas sebagai sesuatu yang memiliki akar sejarah yang mendalam dan terus mempengaruhi politik dan identitas masa kini. Identitas etnis dibentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari, termasuk dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial yang lebih besar dan etnisitas digunakan dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari. etnisitas sebagai sebuah proses dinamis yang tidak selalu bergantung pada kelompok-kelompok yang didefinisikan dengan jelas. Di sini, pentingnya mempertimbangkan konteks dan interaksi sosial yang membentuk identitas etnis, yang menunjukkan bahwa etnisitas lebih banyak tentang praktik dan hubungan daripada tentang kategori-kategori yang stabil.

Para teoritis ini memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana etnisitas dibentuk, dipelihara, dan digunakan dalam masyarakat, baik sebagai alat identifikasi maupun sebagai instrumen politik dan sosial. Etnisasi sering kali melibatkan pengembangan rasa solidaritas "dalam kelompok" dan persepsi perbedaan "luar kelompok". Hal ini dapat menimbulkan perasaan memiliki dan dikucilkan, serta persaingan dan konflik. Etnisasi sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan ketimpangan. Kelompok dominan dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk mendefinisikan dan mengendalikan identitas etnis, sementara kelompok terpinggirkan dapat menolak definisi ini dan menciptakan narasi etnis mereka sendiri.

Pembentukan dan evolusi identitas etnis dibentuk oleh peristiwa dan proses sejarah, seperti migrasi, kolonisasi, dan konflik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi cara batas-batas etnis ditetapkan dan dipertahankan. Etnisasi berarti proses mereduksi perbedaan antara orang atau kelompok menjadi ciri atau penampilan yang dianggap "etnik". Meskipun orang dapat

mengidentifikasi dirinya dengan identitas kelompok, orang sering kali dijadikan etnik oleh orang lain yang menganggap karakteristik atau perilaku tertentu berasal dari mereka karena asumsi identitas etnis mereka.

Kesenjangan teoritis mengenai etnisitas mengacu pada area dan kompleksitas yang belum dieksplorasi dalam cara identitas etnis dibentuk, diekspresikan, dan dialami dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Etnisasi adalah proses di mana atribut, perilaku, atau praktik tertentu dikaitkan dengan kelompok etnis tertentu, yang sering kali menyederhanakan atau menggeneralisasi pengalaman individu berdasarkan etnisitas mereka. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kesenjangan teoritis ini. Sering kali terjadi kebingungan mengenai apa yang dimaksud dengan 'etnisitas' dibandingkan dengan identitas lain, seperti ras, kebangsaan, atau budaya. Para akademisi dapat menggunakan definisi atau kerangka kerja yang berbeda, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian dan aplikasi teoritis.

Kajian-kajian tersebut mungkin tidak sepenuhnya menangkap sifat identitas etnis yang cair dan kontroversial, terutama dalam konteks multikultural atau diaspora. Persinggungan etnisitas dengan kategori sosial lain (seperti kelas, gender, dan agama) perlu dieksplorasi lebih lanjut. Teori-teori terkini mungkin tidak secara memadai membahas bagaimana persimpangan ini membentuk pengalaman dan identitas individu. Dalam konteks Politik, etnisasi sering terjadi dalam konteks politik tertentu yang dapat memengaruhi pembentukan identitas dan dinamika kelompok. Ada kebutuhan untuk kerangka kerja teoritis yang sepenuhnya memperhitungkan pengaruh struktur politik, konflik, dan hubungan kekuasaan pada identitas etnis.

Ketika masyarakat menjadi lebih saling terhubung, dampak globalisasi pada identitas etnis dan ekspresinya menimbulkan tantangan teoritis. Bagaimana kekuatan global memengaruhi identitas etnis lokal? Bentuk-bentuk identitas etnis baru apa yang muncul di

dunia yang mengglobal? Terdapat kesenjangan penelitian empiris dengan nuansa etnisasi dalam konteks yang beragam. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana etnisasi memengaruhi hubungan sosial, pembangunan komunitas, dan agensi individu. Bagaimana etnisasi berkontribusi pada stereotip, prasangka, dan praktik diskriminatif, dan bagaimana hal-hal ini dapat ditentang atau diubah. Dengan mengatasi kesenjangan ini, para akademisi dapat mengembangkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang etnisitas dan cara kompleks di mana etnisitas membentuk perilaku manusia dan struktur sosial.

D. Proses Etnisasi di Malaysia

Proses etnisasi di Malaysia memiliki akar historis yang dalam, terutama terkait dengan kebijakan kolonial Inggris dan dinamika politik pasca-kemerdekaan. Etnisitas di Malaysia bukan hanya sekedar fenomena kebudayaan, melainkan juga menjadi alat politik yang kuat. Kebijakan kolonial yang memisahkan kelompok etnis berdasarkan peran ekonomi dan sosial, dikombinasikan dengan politik identitas yang dilanggengkan setelah kemerdekaan, telah mengukuhkan garis-garis etnis dalam masyarakat Malaysia .

Pada abad ke-19, kebijakan kolonial Inggris di Malaya secara eksplisit mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan etnisitas. Migrasi orang Tionghoa dan India ke Malaya sebagai tenaga kerja di sektor-sektor perkebunan dan tambang menciptakan stratifikasi sosial yang berdasarkan pada etnis . Orang Melayu ditempatkan di sektor pertanian tradisional, sementara orang Tionghoa mendominasi sektor perdagangan, dan orang India menjadi buruh di perkebunan . Kebijakan ini memisahkan kelompok-kelompok etnis berdasarkan sektor ekonomi, sehingga memperkuat identitas etnis sebagai ciri utama kehidupan sosial di Malaya. Kebijakan ini dikenal sebagai bentuk "pembagian kerja etnis", di mana etnisitas digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengontrol masyarakat . Pembagian ini tidak hanya membentuk struktur sosial, tetapi juga memperkuat identitas etnis masing-masing kelompok, memperkuat proses etnisasi di Malaysia.

Masyarakat Mandailing adalah para migran dan penduduk di setiap tempat di Semenanjung Malaya. Selain itu, kehadiran mereka tidak hanya untuk interaksi dan integrasi,

tetapi juga untuk konflik dan perlawanan. Topik-topik pembahasan di sini diantisipasi lebih jauh untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang masyarakat Mandailing di Semenanjung Malaya, khususnya, dan masyarakat Mandailing di Luar Negeri dan Asia Tenggara secara umum. Oleh karena itu, bagian kedua dari uraian ini mengeksplorasi proses migrasi orang Mandailing ke Malaysia. Lalu, di bagian ketiga penjelasan lebih dalam mengenai etnisasi atau politik etnik yang dijalankan pemerintah colonial Inggris dihadapi oleh orang mandailing, bagaimana mereka beradaptasi dalam naungan negara bangsa baru pasca-kolonial, dan bagaimana mereka berperan dalam globalisasi yang mengandaikan terjadinya hibridisasi dan kreolisasi di tanah Malaya. Bagian akhir dari pembahasan ini merupakan penjelasan mengenai aktivisme Islam orang Mandailing di Malaysia, bagaimana kegiatan keagamaan yang mereka selenggarakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, merawat tradisi keagamaan dalam proses kompleksitas globalisasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami kompleksitas sejarah dan dinamika sosial di Semenanjung Melayu, terutama dalam kaitannya dengan migrasi, perdagangan, dan interaksi budaya. Pendekatan yang digunakan sangat komprehensif, dengan referensi yang kaya dari berbagai sumber sejarah dan kajian sebelumnya, menjadikannya sebagai pendahuluan yang informatif dan relevan untuk studi tentang orang Mandailing di Malaysia.

Bagian ini merupakan penjelasan bagaimana proses etnisasi Mandailing menjadi Melayu sejak masa colonial Inggris dan sampai sekarang masih berlaku di Malaysia. Proses etnisasi di Malaysia telah berkembang seiring dengan perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang dialami oleh wilayah ini sejak era kolonial hingga masa pasca-kemerdekaan. Etnisitas di Malaysia tidak hanya menjadi faktor identitas budaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik negara. Proses ini telah didorong oleh dinamika yang

kompleks, melibatkan interaksi antara kekuatan eksternal seperti kolonialisme Inggris, serta faktor internal seperti migrasi dan kebijakan negara.

Pada abad ke-19, dengan masuknya Inggris ke wilayah Malaya, masyarakat yang terdiri dari orang-orang Melayu, Tionghoa, dan India mulai dikategorikan berdasarkan etnisitas. Inggris memperkenalkan kebijakan pemisahan ekonomi berdasarkan etnis yang memposisikan orang Melayu di sektor pertanian, orang Tionghoa di sektor perdagangan dan tambang, serta orang India di perkebunan karet. Pemisahan ini memperkuat identitas etnis sebagai komponen utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Malaya, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya stratifikasi sosial berdasarkan etnisitas.

Etnisisasi ini diperkuat melalui kebijakan-kebijakan negara pasca-kemerdekaan yang terus menekankan pentingnya identitas etnis dalam struktur sosial dan politik Malaysia. Perjanjian Sosial yang mengakui hak istimewa orang Melayu sebagai bumiputera setelah kemerdekaan pada tahun 1957, serta kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan pada tahun 1971, merupakan contoh kebijakan yang memperkuat pembagian berdasarkan etnisitas dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap eksklusivitas kelompok etnis tertentu, khususnya orang Melayu, dalam bidang ekonomi dan politik.

Di sisi lain, agama juga memainkan peran penting dalam proses etnisisasi di Malaysia. Identitas etnis Melayu secara konstitusional dihubungkan dengan agama Islam, yang menjadikannya elemen sentral dalam membentuk identitas politik dan sosial orang Melayu. Hal ini menambahkan dimensi baru dalam proses etnisisasi, di mana tidak hanya etnisitas, tetapi juga agama menjadi pendorong penting dalam membentuk dinamika hubungan antar kelompok etnis di Malaysia.

Dalam konteks politik modern, etnisisasi terus menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kebijakan negara. Sistem politik yang didominasi oleh partai-partai berbasis etnis

seperti UMNO (United Malays National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress), menegaskan bahwa etnisitas tetap menjadi komponen utama dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun ada upaya untuk membangun kohesi nasional, politik etnis tetap mendominasi struktur kekuasaan di Malaysia.

Proses etnisasi ini telah menghasilkan dinamika sosial-politik yang rumit, di mana etnisitas sering menjadi sumber ketegangan sosial dan politik. Meskipun Malaysia dikenal sebagai negara yang multikultural, identitas etnis yang kuat dan kebijakan berbasis etnis telah menimbulkan tantangan dalam upaya membangun persatuan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses etnisasi ini berkembang dan dampaknya terhadap hubungan antar kelompok etnis serta stabilitas politik di Malaysia.

Proses etnisasi selama masa kolonial Inggris di Malaysia pada abad ke-19 merujuk pada pembentukan identitas etnis yang dikelola, dikotakkan, dan diperkuat oleh kebijakan kolonial yang membagi peran sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan garis etnis. Proses ini secara signifikan membentuk struktur masyarakat Malaysia modern, di mana setiap kelompok etnis diberikan peran tertentu yang akhirnya memperkuat stereotip dan segregasi etnis.

Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, orang Melayu secara umum dianggap sebagai petani tradisional yang hidup di pedesaan. Mereka tetap terlibat dalam sektor agrikultur tradisional, terutama dalam pertanian padi di daerah-daerah pedesaan. Orang Melayu jarang terlibat dalam sektor industri atau perdagangan, sehingga ekonomi mereka relatif tertinggal dibandingkan dengan etnis lain. Sementara itu, Orang Cina dikategorikan sebagai Penambang dan Pedagang. Migrasi besar-besaran orang Cina ke Malaysia dimulai pada abad ke-19, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan timah yang sedang berkembang pesat. Orang Cina juga berkembang di sektor perdagangan dan menjadi kelas pedagang yang dominan di wilayah-wilayah perkotaan. Mereka membawa keahlian dan jaringan dagang yang luas, yang kemudian mengukuhkan posisi mereka dalam ekonomi

kolonial. Terakhir, Orang India yang diposisikan sebagai Pekerja Perkebunan. Pada akhir abad ke-19, Inggris mulai mendatangkan tenaga kerja dari India, khususnya dari bagian selatan India, untuk bekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit. Orang India ditempatkan di perkebunan di daerah pedesaan, jauh dari pusat-pusat perkotaan. Sistem kontrak *kangani* digunakan untuk merekrut dan mengelola tenaga kerja ini, yang sebagian besar hidup dalam kondisi sulit di perkebunan.

Inggris sengaja menciptakan sistem pemisahan geografis untuk setiap kelompok etnis. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung di pedesaan dan berfokus pada pertanian subsisten. Orang Cina cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Penang, Kuala Lumpur, dan Ipoh, di mana mereka terlibat dalam pertambangan dan perdagangan. Orang India terutama ditempatkan di perkebunan di daerah-daerah pedalaman. Pemisahan ini menciptakan perkampungan-perkampungan etnis yang terpisah secara fisik dan sosial. Setiap etnis memiliki kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dan jarang ada interaksi sosial antar kelompok, yang memperkuat jarak sosial dan memperdalam pemahaman etnis yang terkotak-kotak.

Selain itu, colonial juga menciptakan kebijakan Pendidikan yang Berbasis Etnis. Inggris mendirikan sistem pendidikan yang juga didasarkan pada garis etnis. Sekolah Melayu lebih berfokus pada pendidikan dasar yang diarahkan untuk mempertahankan keterampilan agrikultur, dengan sedikit perhatian pada pendidikan lanjutan. Sekolah Cina dan sekolah India memberikan pendidikan yang lebih berorientasi pada perdagangan dan pekerjaan di sektor industri. Sekolah-sekolah Cina menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah-sekolah Tamil menggunakan bahasa Tamil. Ini memperkuat identitas etnis dan menciptakan pemisahan lebih lanjut antar kelompok etnis, karena pendidikan yang mereka terima berbeda dalam hal konten dan kurikulum.

Kemudian, kekuasaan politik dikendalikan oleh Inggris melalui sistem Residen, di mana setiap sultan Melayu di Semenanjung Malaya diberi penasihat Inggris yang sebenarnya memiliki kontrol politik. Orang Melayu tetap memegang kekuasaan simbolis dalam urusan adat dan agama, tetapi kekuasaan ekonomi dan politik utama dikuasai oleh Inggris dan orang-orang Eropa. Pembatasan Partisipasi Politik untuk Etnis Lain: Etnis lain, seperti orang Cina dan India, tidak diberikan hak politik yang signifikan. Meskipun mereka memainkan peran penting dalam ekonomi, mereka tetap dijauhkan dari pengambilan keputusan politik, yang dikhususkan untuk orang Inggris dan elit Melayu. Ini memperkuat ketegangan etnis, karena ada kesenjangan antara dominasi ekonomi oleh orang Cina dan India dengan kurangnya representasi politik mereka.

Kebijakan Inggris memperkuat kesenjangan ekonomi berdasarkan etnis. Orang Cina, yang menguasai sektor perdagangan dan industri, cenderung lebih makmur daripada orang Melayu yang terkonsentrasi di sektor pertanian subsisten. Orang India yang bekerja di perkebunan juga sering kali hidup dalam kondisi yang sulit, dengan sedikit akses ke layanan sosial dan pendidikan yang baik. Ekonomi kolonial Malaysia sangat tergantung pada kerja keras dan keterampilan orang Cina dan India di sektor-sektor strategis seperti pertambangan timah dan perkebunan karet. Namun, orang-orang ini tetap dianggap sebagai "pendatang" dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem sosial-politik Malaysia, memperdalam perasaan marginalisasi.

Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, proses etnisasi yang dikembangkan oleh Inggris terus berlanjut. Warisan pemisahan etnis dalam hal ekonomi, pendidikan, dan sosial masih bertahan. Meskipun pemerintah Malaysia modern berusaha untuk menciptakan persatuan nasional, ketegangan etnis yang ditinggalkan oleh sistem kolonial masih memengaruhi politik dan hubungan antar-etnis di negara tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan yang dihasilkan oleh kebijakan kolonial, pemerintah Malaysia pasca-kolonial

memperkenalkan kebijakan afirmatif untuk membantu Bumiputera (terutama orang Melayu) dalam mengakses peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga memperdalam perasaan tidak puas di kalangan etnis Cina dan India yang merasa terpinggirkan oleh sistem tersebut. Proses etnisasi ini terus berdampak pada masyarakat Malaysia hingga hari ini, dengan isu-isu ketidaksetaraan antar-etnis yang masih menjadi tantangan dalam politik dan ekonomi negara tersebut.

C. Menjadi Melayu: Pembentukan identitas etnis

Suku Mandailing, yang berasal dari kawasan Mandailing di Sumatera Utara, Indonesia, sering diidentifikasi sebagai Melayu dari Sumatera, Melayu-Mandailing Malaysia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor historis, sosial, dan kultural yang membentuk identitas mereka di Malaysia, antara lain; pertama, banyak suku Mandailing yang menetap di daerah-daerah seperti Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Mereka datang sebagai pedagang, pekerja, dan petani, berbaur dengan masyarakat lokal yang sudah ada, termasuk komunitas Melayu.

Kedua, budaya serumpun. Suku Mandailing berbagi banyak elemen budaya dan tradisi dengan masyarakat Melayu, karena mereka juga berasal dari wilayah yang memiliki akar budaya Melayu. Misalnya, bahasa Mandailing memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu, terutama dalam hal kosakata dan struktur. Selain itu, mereka mempraktikkan Islam, yang juga merupakan agama mayoritas di kalangan orang Melayu. Di Malaysia, suku Mandailing secara bertahap mengadopsi aspek-aspek budaya Melayu, termasuk bahasa dan adat istiadat. Perbedaan antara Mandailing dan Melayu menjadi kabur, terutama karena mereka beragama Islam dan mengikuti banyak norma budaya Melayu, seperti sistem kekerabatan patrilineal, penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, dan penerimaan adat Melayu.

Di Malaysia, identitas etnis sering kali terkait erat dengan agama dan bahasa. Oleh karena itu, banyak Mandailing yang diidentifikasi sebagai Melayu karena mereka berbagi agama Islam dan menggunakan bahasa Melayu. Identifikasi ini diperkuat oleh kebijakan

pemerintah Malaysia yang mendefinisikan orang Melayu sebagai mereka yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu, dan mempraktikkan adat Melayu. Karena Mandailing memenuhi kriteria ini, mereka sering diakui sebagai bagian dari kelompok etnis Melayu.

Merujuk Konstitusi Malaysia Pasal 160 mendefinisikan orang Melayu sebagai seseorang yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu, dan mempraktikkan adat Melayu. Banyak suku Mandailing yang telah lama menetap di Malaysia memenuhi ketiga kriteria ini, sehingga mereka sering diklasifikasikan sebagai Melayu. Di Malaysia, status sebagai Melayu memberikan keuntungan dalam hal hak istimewa Bumiputera, yang memberikan akses lebih besar ke pendidikan, pekerjaan di sektor publik, serta kepemilikan tanah. Oleh karena itu, banyak komunitas Mandailing yang secara sukarela mengidentifikasi diri mereka sebagai Melayu untuk memperoleh manfaat dari kebijakan afirmatif yang ditujukan kepada Bumiputera. Suku Mandailing juga diakui secara resmi sebagai Melayu oleh otoritas Malaysia, baik dalam konteks politik maupun administratif, sebagai bagian dari proses asimilasi dan integrasi mereka ke dalam masyarakat Malaysia yang lebih luas.

Identitas etnis bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Bagi suku Mandailing di Malaysia, identitas sebagai Melayu telah berkembang secara bertahap melalui asimilasi budaya dan adopsi bahasa serta norma-norma Melayu. Dengan begitu, banyak generasi muda Mandailing di Malaysia yang mungkin tidak lagi melihat diri mereka berbeda secara signifikan dari etnis Melayu. Suku Mandailing di Malaysia telah mengalami proses perubahan identitas yang bersifat dinamis, di mana mereka terus mempertahankan beberapa elemen budaya Mandailing sambil secara bersamaan diakui sebagai Melayu. Hal ini menunjukkan bagaimana etnisitas bisa bersifat cair dan berubah sesuai dengan konteks sosial di mana suatu kelompok berada.

Di Malaysia, ada keuntungan politik dan sosial tertentu yang terkait dengan menjadi bagian dari identitas Melayu. Dalam konteks kebijakan afirmatif dan status Bumiputera, orang

yang diidentifikasi sebagai Melayu sering kali menerima lebih banyak keuntungan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, proses identifikasi sebagai Melayu mungkin juga dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis, di mana suku Mandailing lebih memilih untuk diakui sebagai Melayu. Pemerintah Malaysia sejak kemerdekaan juga mendorong narasi nasionalis Melayu, di mana kelompok-kelompok Muslim serumpun, seperti Mandailing, dilihat sebagai bagian dari kebesaran dan kesatuan Melayu. Ini membantu memperkuat identifikasi suku Mandailing dengan Melayu.

Proses asimilasi ini telah menciptakan kondisi di mana identitas etnis Mandailing sering kali dilihat sebagai bagian dari kelompok Melayu yang lebih luas. Identifikasi ini memperkuat integrasi sosial dan budaya mereka di Malaysia, meskipun beberapa elemen budaya Mandailing masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Mandailing Hibrid

Identitas Mandailing berubah melalui proses panjang yang melibatkan migrasi, asimilasi dengan budaya Melayu, pengaruh kebijakan kolonial dan pasca-kolonial, serta faktor sosial ekonomi. Meskipun suku Mandailing masih mempertahankan beberapa elemen budaya mereka, terutama dalam konteks keluarga dan komunitas, di ranah publik dan administratif, mereka sering diidentifikasi sebagai Melayu. Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas etnis dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Islam memainkan peran sentral dalam menyatukan suku Mandailing dengan komunitas Melayu. Karena Islam juga merupakan agama yang dianut oleh orang Mandailing dan Melayu, agama ini menjadi dasar utama integrasi budaya. Praktik keagamaan yang serupa mempercepat proses asimilasi, sehingga Mandailing secara bertahap diterima sebagai bagian dari komunitas Muslim Melayu. Seiring waktu, suku Mandailing mulai menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari dan mengadopsi adat-istiadat Melayu. Meskipun mereka masih mempertahankan beberapa tradisi lokal, seperti upacara adat Mandailing, banyak dari mereka

yang telah menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial Melayu. Proses ini memperlihatkan bagaimana identitas Mandailing semakin terintegrasi ke dalam budaya Melayu. Pernikahan antara orang Mandailing dan orang Melayu juga mempercepat proses asimilasi. Generasi yang lahir dari pernikahan campuran ini sering kali lebih cenderung mengidentifikasi diri sebagai Melayu, terutama karena bahasa dan lingkungan budaya mereka lebih dekat dengan budaya Melayu.

Generasi muda Mandailing yang lahir di Malaysia sering kali lebih mengenal bahasa dan budaya Melayu dibandingkan dengan budaya Mandailing tradisional. Meskipun beberapa keluarga masih mempertahankan tradisi Mandailing seperti adat perkawinan dan upacara adat lainnya, generasi muda umumnya mengidentifikasi diri mereka sebagai Melayu karena mereka tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma Melayu. Di banyak kasus, orang Mandailing di Malaysia memiliki identitas hibrida yang mencampurkan elemen-elemen budaya Mandailing dan Melayu. Mereka mungkin masih mempertahankan beberapa tradisi Mandailing dalam konteks keluarga atau komunitas kecil, tetapi dalam ranah publik, mereka lebih sering diidentifikasi sebagai Melayu karena lebih dekat dengan budaya dominan.

Proses di mana suku Mandailing di Malaysia diidentifikasi atau diintegrasikan sebagai Melayu memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dampak ini mencerminkan bagaimana perubahan identitas etnis mempengaruhi posisi mereka dalam masyarakat serta hubungan mereka dengan komunitas lain; pertama, Peningkatan Integrasi Sosial. Dengan diidentifikasi sebagai Melayu, orang Mandailing lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Malaysia yang mayoritas Melayu. Mereka lebih diterima dalam struktur sosial yang berbasis pada identitas Melayu-Muslim. Hal

ini memperkuat hubungan mereka dengan komunitas Melayu lainnya dan mengurangi potensi marginalisasi sebagai kelompok etnis minoritas.

Kedua, penghapusan perbedaan Etnis Internal. Karena proses asimilasi budaya, perbedaan yang dulunya menandai identitas Mandailing sebagai entitas terpisah dari Melayu mulai kabur. Generasi Mandailing di Malaysia cenderung melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas Melayu yang lebih besar, sehingga perbedaan etnis dalam identitas internal berkurang. Namun, ini juga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran akan identitas Mandailing yang lebih spesifik di kalangan generasi muda.

Ketiga, erosi Identitas Budaya Mandailing. Sebagai bagian dari proses asimilasi, banyak aspek budaya Mandailing yang khas, seperti bahasa Mandailing, adat istiadat, dan tradisi kekerabatan, mengalami penurunan atau penghilangan. Bahasa Mandailing jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena generasi muda lebih banyak berbicara bahasa Melayu. Beberapa tradisi dan ritual adat Mandailing mungkin masih dipraktikkan dalam konteks komunitas kecil, tetapi semakin jarang terlihat dalam konteks yang lebih luas.

Keempat, pelestarian Tradisi Tertentu. Meskipun ada erosi budaya, beberapa tradisi Mandailing masih dipertahankan oleh komunitas-komunitas kecil yang memiliki kesadaran akan warisan budaya mereka. Upacara adat seperti Gordang Sambilan (musik tradisional Mandailing) atau Markaroan (ritual sosial) mungkin masih dipraktikkan di komunitas tertentu. Namun, pelestarian ini biasanya terbatas pada kegiatan-kegiatan kebudayaan dan upacara tradisional yang dilakukan di kalangan komunitas Mandailing sendiri.

Kelima, mobilitas sosial yang Lebih Baik. Dengan hak-hak istimewa yang diperoleh sebagai Bumiputera, orang Mandailing di Malaysia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan mobilitas sosial. Ini mencakup akses yang lebih luas ke pekerjaan di sektor publik, pendidikan tinggi, dan perumahan yang disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya, mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan status ekonomi mereka secara keseluruhan.

Keenam, partisipasi dalam Politik Melayu. Dengan diidentifikasi sebagai Melayu, orang Mandailing juga memiliki akses lebih besar ke politik Malaysia, yang didominasi oleh kelompok Melayu. Mereka dapat berpartisipasi dalam politik partai, terutama dalam partai yang memperjuangkan kepentingan Melayu, seperti UMNO (United Malays National Organisation). Ini memberi mereka kesempatan untuk memengaruhi kebijakan yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan komunitas Melayu. Dalam konteks politik, identifikasi sebagai Melayu memperkuat identitas kolektif mereka sebagai bagian dari kelompok etnis mayoritas yang berpengaruh di Malaysia. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas dengan kelompok Melayu yang lebih luas, yang memungkinkan mereka untuk menavigasi lanskap politik dengan lebih baik.

Namun, Seiring waktu, banyak orang Mandailing di Malaysia yang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai Mandailing, melainkan sepenuhnya sebagai Melayu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya kesadaran akan identitas Mandailing sebagai entitas etnis yang terpisah. Di kalangan generasi muda, identitas Mandailing mungkin tidak lagi dianggap relevan, karena mereka lebih dekat dengan budaya Melayu yang dominan. Beberapa individu atau komunitas Mandailing mungkin mengembangkan identitas hibrida, di mana mereka merasa terhubung dengan budaya Melayu, namun tetap mempertahankan beberapa elemen warisan Mandailing. Ini memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan dalam dua dunia budaya, meskipun hal ini sering kali sulit dijaga di lingkungan perkotaan yang lebih terintegrasi.

Dapat dilihat dari aspek integrative bahwa Proses pengidentifikasian Mandailing sebagai Melayu juga memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok etnis Melayu-Muslim di Malaysia. Ini memperkuat konsep Melayu-Islam sebagai identitas dominan di negara tersebut, yang sering kali menjadi landasan bagi hubungan sosial antar kelompok etnis Muslim. Perubahan identitas Mandailing menjadi Melayu membawa berbagai dampak yang signifikan.

Di satu sisi, mereka mendapat manfaat dari integrasi sosial, politik, dan ekonomi sebagai bagian dari kelompok mayoritas Melayu. Akses ke hak istimewa Bumiputera dan partisipasi dalam politik Melayu memperkuat status mereka di masyarakat. Namun, di sisi lain, proses ini juga menyebabkan erosi budaya Mandailing, dengan banyak aspek identitas etnis mereka yang terpinggirkan atau hilang. Di masa depan, tantangan utama bagi komunitas Mandailing mungkin adalah bagaimana mereka menyeimbangkan warisan budaya mereka dengan identitas Melayu yang lebih luas.

Secara Bahasa, banyak orang Mandailing di Malaysia berbicara dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka, terutama dalam konteks publik. Namun, di beberapa komunitas, terutama yang lebih tua, bahasa Mandailing masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, ada penggunaan bilingual antara bahasa Mandailing dan Melayu, yang menunjukkan hibriditas dalam cara komunikasi. Selain itu, beberapa adat dan tradisi Mandailing masih dipraktikkan, meskipun sering kali dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan konteks Melayu. Misalnya, upacara pernikahan atau kematian mungkin mengikuti adat Mandailing tetapi juga mengintegrasikan elemen adat Melayu. Upacara musik tradisional Mandailing, seperti Gordang Sambilan, masih dimainkan dalam beberapa kesempatan, tetapi tidak lagi menjadi bagian sentral dalam kehidupan sehari-hari, lebih cenderung sebagai simbol identitas kultural.

Suku Mandailing di Malaysia, seperti halnya orang Melayu, mayoritas beragama Islam. Agama Islam menjadi elemen penting dalam proses asimilasi dan hibriditas identitas. Meskipun beberapa aspek adat Mandailing mungkin masih dipertahankan, terutama dalam ritual tradisional, semua praktik tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang umum di kalangan Melayu. Dengan kata lain, elemen Islam dalam budaya Melayu memperkuat kesamaan antara kedua kelompok, sehingga identitas Mandailing yang hibrid juga memiliki dasar yang kuat dalam agama yang sama. Mandailing di Malaysia sering kali aktif dalam

institusi keagamaan yang lebih luas di Malaysia, seperti masjid atau organisasi Islam. Mereka berbagi platform yang sama dengan komunitas Melayu-Muslim, yang memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari kelompok Islam yang lebih besar, meskipun mereka tetap mempertahankan akar etnisitas mereka sebagai Mandailing.

Dalam banyak kasus, orang Mandailing mungkin memiliki nama depan yang mencerminkan identitas Melayu, tetapi marga Mandailing tetap dipertahankan. Nama-nama marga seperti Nasution, Lubis, Harahap, dan Batubara masih menjadi identitas yang membedakan orang Mandailing dari kelompok Melayu lainnya. Penggunaan nama ini menunjukkan keberlanjutan elemen identitas Mandailing, meskipun mereka secara sosial dan politik diakui sebagai Melayu. Beberapa simbol budaya Mandailing masih dipertahankan dalam bentuk-bentuk yang lebih simbolis. Misalnya, desain pakaian tradisional Mandailing mungkin diintegrasikan ke dalam pakaian adat Melayu di beberapa kesempatan, atau lambang-lambang keluarga Mandailing dipajang di rumah atau komunitas mereka sebagai tanda identitas etnis yang lebih dalam.

Hibriditas identitas Mandailing di Malaysia ditandai oleh penggabungan elemen-elemen budaya asli Mandailing dengan elemen-elemen budaya Melayu yang dominan, serta pengaruh dari identitas nasional Malaysia. Proses ini menciptakan identitas ganda yang memungkinkan orang Mandailing untuk mempertahankan warisan etnis mereka sambil beradaptasi dengan konteks sosial yang lebih luas. Identitas hibrid ini juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti bahasa, adat istiadat, praktik agama, seni, dan partisipasi politik, yang menunjukkan bagaimana identitas Mandailing terus berkembang seiring dengan waktu dan perubahan lingkungan sosial. Mempertahankan identitas, terutama dalam konteks komunitas yang menghadapi asimilasi budaya, globalisasi, atau tekanan sosial, memerlukan upaya yang berkelanjutan. Identitas, baik individu maupun kelompok, dapat

mencakup aspek budaya, bahasa, agama, sejarah, dan nilai-nilai yang diwarisi dari generasi ke generasi.

D. Proses Etnisisasi Mandailing dalam Konteks Kebijakan Bumiputera

Salah satu aspek penting yang belum dibahas dalam artikel adalah bagaimana kebijakan Bumiputera di Malaysia berperan dalam proses etnisisasi Mandailing. Setelah kemerdekaan, pemerintah Malaysia memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971, dengan tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi antara bumiputera dan non-bumiputera. Orang Melayu diakui sebagai bumiputera, dan mereka mendapatkan hak-hak istimewa dalam pendidikan, ekonomi, dan akses ke posisi di sektor publik. Namun, ada diskusi yang lebih luas mengenai apakah orang Mandailing di Malaysia, yang sebagian besar beragama Islam dan telah berasimilasi dengan budaya Melayu, juga dianggap sebagai bumiputera secara resmi .

Bagi sebagian orang Mandailing, mengadopsi identitas Melayu menawarkan akses ke hak-hak istimewa yang ditawarkan oleh kebijakan bumiputera. Ini termasuk kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, akses ke perumahan bersubsidi, serta keuntungan dalam tender bisnis pemerintah. Proses "pemelayuan" atau Melayunisasi terjadi di kalangan Mandailing, yang secara bertahap mengadopsi bahasa, budaya, dan praktik Islam yang lebih dekat dengan identitas Melayu untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat Malaysia yang didominasi oleh orang Melayu . Oleh karena itu, etnisisasi Mandailing berhubungan erat dengan kebijakan negara yang mendorong integrasi etnis tertentu melalui insentif ekonomi dan sosial.

Meskipun begitu, proses etnisisasi ini tidak berjalan mulus untuk semua anggota komunitas Mandailing. Beberapa di antara mereka masih mempertahankan identitas Mandailing mereka dengan kuat, terutama dalam konteks keluarga dan upacara adat. Ada juga kekhawatiran bahwa proses Melayunisasi ini dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya dan bahasa Mandailing di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, penggunaan bahasa

Mandailing di kalangan generasi yang lebih muda terus menurun, dan tradisi seperti Gordang Sambilan mulai jarang dipraktikkan di luar konteks perayaan budaya formal .

Kebijakan bumiputera juga menciptakan garis batas yang lebih tegas antara kelompok bumiputera dan non-bumiputera, yang mencerminkan stratifikasi sosial berbasis etnis. Meskipun kelompok Mandailing diuntungkan dari pengakuan sebagai bumiputera, ketegangan antar kelompok etnis seperti Tionghoa dan India yang tidak memiliki akses ke hak-hak ini terus berlanjut. Dalam hal ini, proses etnisasi bukan hanya sekedar adopsi budaya Melayu, tetapi juga berhubungan dengan dinamika politik ekonomi di Malaysia yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan rasial.

Dengan demikian, kebijakan bumiputera memainkan peran penting dalam mempercepat proses etnisasi Mandailing menjadi Melayu, tetapi juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan identitas kultural Mandailing yang lebih spesifik. Proses ini menunjukkan kompleksitas etnisitas di Malaysia, di mana identitas etnis tidak hanya dibentuk oleh warisan budaya, tetapi juga oleh kebijakan negara yang mendorong asimilasi melalui manfaat ekonomi .

E. Hubungan Antara Migrasi Mandailing dan Politik Identitas di Malaysia

Meskipun artikel membahas sejarah migrasi Mandailing dari Sumatra ke Malaysia, pembahasan mengenai politik identitas dan bagaimana migrasi tersebut mempengaruhi pembentukan identitas Mandailing di Malaysia perlu lebih didalami. Migrasi Mandailing pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terutama dipicu oleh faktor ekonomi dan sosial, termasuk pekerjaan di sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan. Namun, setelah mereka menetap di Malaysia, identitas Mandailing mengalami perubahan signifikan di bawah pengaruh politik identitas etnis di Malaysia yang sangat tersegmentasi .

Di Malaysia, politik identitas etnis didominasi oleh garis-garis etnis yang jelas, terutama setelah kemerdekaan. Partai-partai politik utama seperti UMNO (United Malays

National Organisation), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) dibentuk berdasarkan kelompok etnis tertentu. Dalam konteks ini, migrasi Mandailing ke Malaysia tidak hanya membawa mereka ke lingkungan baru secara geografis, tetapi juga membawa mereka ke dalam arena politik yang terstruktur berdasarkan etnisitas. Sebagai minoritas yang berasal dari Sumatra, Mandailing harus memutuskan bagaimana mereka akan menavigasi sistem politik berbasis etnis yang ada.

Proses Melayunisasi yang dialami oleh Mandailing juga terkait erat dengan politik identitas ini. Orang Mandailing yang memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai Melayu, dengan demikian, masuk ke dalam kerangka politik yang memberikan mereka keuntungan sosial dan ekonomi. Namun, hal ini juga mengorbankan beberapa aspek dari identitas Mandailing mereka. Seiring dengan generasi baru yang lahir di Malaysia, semakin banyak orang Mandailing yang lebih memilih identitas Melayu untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem sosial-politik yang didominasi oleh bumiputera. Proses ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politis.

Namun, tidak semua orang Mandailing sepenuhnya melebur ke dalam identitas Melayu. Ada kelompok-kelompok Mandailing di Malaysia yang tetap mempertahankan identitas mereka dan menolak asimilasi penuh. Politik identitas di Malaysia menawarkan sedikit ruang bagi kelompok-kelompok minoritas seperti Mandailing untuk mempertahankan eksistensi budaya mereka tanpa harus beradaptasi dengan identitas yang lebih besar. Konflik antara keinginan untuk mempertahankan identitas etnis yang spesifik dan tuntutan untuk berasimilasi dalam politik nasional Malaysia terus menjadi isu yang relevan dalam pembahasan mengenai migrasi dan identitas.

Oleh karena itu, migrasi Mandailing ke Malaysia membawa dampak signifikan terhadap politik identitas mereka, di mana mereka dipaksa untuk menavigasi sistem politik berbasis etnis yang mengharuskan adaptasi dan kadang-kadang pengorbanan identitas kultural.

Proses ini memperlihatkan bagaimana migrasi tidak hanya mempengaruhi mobilitas fisik, tetapi juga mobilitas identitas dalam konteks sosial-politik yang lebih luas .

Pengaruh Globalisasi dan Urbanisasi terhadap Komunitas Mandailing

Selain dari faktor-faktor lokal, pengaruh globalisasi dan urbanisasi juga mempengaruhi dinamika identitas Mandailing di Malaysia. Globalisasi telah mempercepat proses pertukaran budaya, ide, dan informasi lintas batas negara, yang membawa dampak signifikan bagi komunitas-komunitas minoritas seperti Mandailing. Salah satu dampak utama dari globalisasi adalah bagaimana komunitas-komunitas ini mulai berinteraksi dengan dunia luar dan mengadopsi nilai-nilai baru yang mungkin berbeda dari nilai-nilai tradisional yang selama ini mereka pegang .

Di Malaysia, globalisasi membawa perubahan besar dalam cara komunitas-komunitas seperti Mandailing mengelola identitas mereka. Dalam masyarakat yang semakin urban dan terhubung secara global, generasi muda Mandailing lebih banyak terpapar pada budaya global melalui media, pendidikan, dan teknologi. Hal ini sering kali mengakibatkan mereka mengalami "krisis identitas", di mana mereka harus menyeimbangkan antara mempertahankan warisan budaya Mandailing dengan keinginan untuk berpartisipasi dalam dunia modern yang lebih luas. Misalnya, banyak generasi muda Mandailing yang lebih memilih untuk mengidentifikasi diri sebagai Melayu, karena identitas ini lebih relevan dalam konteks sosial-politik dan ekonomi modern Malaysia.

Selain itu, proses urbanisasi di Malaysia, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang, telah mendorong perubahan dalam struktur komunitas Mandailing. Di desa-desa, identitas Mandailing sering kali dipertahankan melalui praktik-praktik adat dan hubungan sosial yang lebih dekat. Namun, ketika orang Mandailing pindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, mereka mulai kehilangan ikatan dengan tradisi-tradisi tersebut. Urbanisasi juga mempercepat proses asimilasi, karena orang Mandailing yang

tinggal di kota-kota besar sering kali berinteraksi lebih intens dengan kelompok etnis lain, terutama Melayu .

Globalisasi juga memfasilitasi migrasi balik (reverse migration), di mana orang Mandailing yang tinggal di Malaysia mulai kembali menjalin hubungan dengan kerabat mereka di Sumatra melalui teknologi seperti internet dan media sosial. Hal ini menciptakan dinamika identitas yang lebih kompleks, di mana orang Mandailing di Malaysia tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan budaya Melayu, tetapi juga harus menavigasi identitas mereka dalam konteks hubungan transnasional dengan komunitas Mandailing di Indonesia . Dengan demikian, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran identitas lintas batas, yang menambah lapisan kompleksitas dalam pembentukan identitas Mandailing di Malaysia.

Secara keseluruhan, globalisasi dan urbanisasi memberikan tantangan baru bagi komunitas Mandailing di Malaysia dalam hal bagaimana mereka mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat. Generasi muda Mandailing, khususnya, harus beradaptasi dengan nilai-nilai modern sambil tetap mempertahankan akar kultural mereka, yang sering kali menjadi sumber ketegangan identitas .

H. Mobilitas Sosial diaspora Mandailing Malaysia

Pembahasan tentang mobilitas sosial dalam konteks migrasi Mandailing ke Malaysia sangat penting untuk memahami bagaimana kelompok etnis ini berinteraksi dengan struktur sosial dan ekonomi di negara tujuan migrasi. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang dapat bersifat vertikal (naik atau turun kelas sosial) atau horizontal (berpindah posisi dalam kelas sosial yang sama). Dalam kasus Mandailing, mobilitas sosial dapat dianalisis melalui berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan akses ke jaringan sosial yang lebih luas. Berikut adalah uraian mengenai mobilitas sosial Mandailing di Malaysia, khususnya terkait dengan peluang mereka untuk naik kelas sosial.

Migrasi orang Mandailing ke Malaysia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Sumatra, serta peluang ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaya. Orang Mandailing, seperti kelompok migran lainnya, tiba di Malaysia untuk mencari pekerjaan di sektor-sektor tertentu, terutama dalam pertambangan dan perkebunan. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran yang memulai dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah, dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan modal .

Pekerjaan dalam sektor pertambangan dan perkebunan, meskipun memberikan penghidupan, tidak memberikan banyak kesempatan untuk mobilitas sosial vertikal. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya diupah rendah, berisiko tinggi, dan tidak menawarkan kesempatan signifikan untuk naik kelas. Oleh karena itu, pada tahap awal migrasi, sebagian besar orang Mandailing berada dalam kelas sosial bawah di Malaysia, mirip dengan posisi etnis India yang dipekerjakan di perkebunan karet dan Tionghoa di tambang timah.

4. Pendidikan sebagai Faktor Mobilitas

Salah satu cara penting untuk memahami mobilitas sosial Mandailing di Malaysia adalah melalui akses mereka terhadap pendidikan. Setelah Malaysia merdeka dan sistem pendidikan nasional dikembangkan, pendidikan menjadi faktor utama yang dapat mendorong migran dan keturunan mereka untuk naik kelas sosial. Melalui kebijakan negara seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB), orang-orang Melayu, termasuk orang Mandailing yang mulai diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok bumiputera, mendapatkan akses lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik .

Bagi generasi Mandailing berikutnya, pendidikan formal di Malaysia membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik di sektor-sektor pemerintahan, pendidikan, dan profesional. Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak dari pekerjaan manual atau buruh ke pekerjaan dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan

afirmatif yang mendukung bumiputera dalam hal pendidikan dan ekonomi juga memfasilitasi mobilitas sosial vertikal bagi orang Mandailing yang berintegrasi ke dalam identitas Melayu.

Namun, akses pendidikan ini tidak merata. Bagi sebagian besar orang Mandailing di daerah pedesaan, akses ke pendidikan berkualitas tetap menjadi tantangan. Mereka yang tinggal di daerah perkotaan atau memiliki koneksi sosial yang lebih baik cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, sedangkan mereka yang tinggal di pedesaan sering kali terperangkap dalam siklus kemiskinan dan sulit untuk mencapai mobilitas sosial vertikal.

5. Pekerjaan dan Ekonomi

Setelah mendapatkan akses ke pendidikan, orang Mandailing yang telah mengadopsi identitas Melayu memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor publik, yang sering kali disubsidi oleh negara. Hal ini sangat penting mengingat kebijakan afirmatif Malaysia, di mana posisi-posisi dalam birokrasi pemerintahan lebih banyak diperuntukkan bagi bumiputera, termasuk orang Melayu dan mereka yang diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok ini, seperti Mandailing.

Dalam konteks ini, mobilitas sosial bagi orang Mandailing di Malaysia dapat dikaitkan dengan keberhasilan mereka dalam bertransisi dari kelas buruh ke kelas menengah, terutama melalui pekerjaan di sektor pemerintahan dan sektor swasta yang memanfaatkan kebijakan-kebijakan afirmatif. UMNO (United Malays National Organisation), sebagai partai politik dominan yang mewakili kepentingan orang Melayu, juga memberikan dukungan politik bagi kelompok bumiputera, sehingga orang Mandailing yang mengidentifikasi diri sebagai bumiputera dapat meraih kesempatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok non-bumiputera.

Namun, tidak semua orang Mandailing berhasil mencapai mobilitas sosial yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti keterbatasan modal sosial dan ekonomi tetap menjadi

hambatan bagi beberapa komunitas Mandailing untuk mencapai status ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun ada sebagian dari mereka yang berhasil naik kelas sosial melalui pekerjaan di sektor pemerintahan atau pendidikan, ada pula yang tetap berada di kelas bawah karena keterbatasan akses terhadap peluang-peluang tersebut.

6. Peran Jaringan Sosial

Jaringan sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial. Bagi komunitas Mandailing, jaringan sosial di antara sesama migran, serta hubungan mereka dengan komunitas Melayu yang lebih besar, memberikan mereka akses ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, orang Mandailing yang memiliki koneksi baik dengan elit politik atau bisnis di Malaysia berhasil mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai mobilitas sosial vertikal.

Dalam komunitas Mandailing, solidaritas etnis sering kali menjadi modal sosial yang berharga, terutama dalam konteks bisnis dan perdagangan. Di beberapa sektor, seperti usaha kecil menengah, komunitas Mandailing membangun jaringan bisnis yang didukung oleh modal sosial ini. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu mereka mendapatkan akses ke kredit, informasi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk memulai usaha, yang kemudian memungkinkan mereka untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

Namun, hubungan dengan komunitas Melayu yang lebih besar juga menjadi penentu dalam mobilitas sosial orang Mandailing. Identifikasi mereka sebagai Melayu memberikan akses kepada peluang yang ditawarkan kepada bumiputera, tetapi ini sering kali berarti mereka harus melebur ke dalam identitas Melayu yang lebih luas, meninggalkan identitas Mandailing yang lebih spesifik. Jaringan sosial yang dibentuk di luar komunitas Mandailing tradisional dapat mempercepat mobilitas sosial, tetapi juga mengurangi keterikatan dengan budaya asli mereka.

H. Peran Keluarga, Komunitas, dan Organisasi

Keluarga sebagai unit sosial dasar memiliki peran fundamental dalam proses pembentukan identitas etnis. Dalam keluarga Mandailing, pengajaran bahasa lokal menjadi salah satu cara utama untuk memastikan kesinambungan identitas budaya. Bahasa adalah alat utama komunikasi yang menghubungkan generasi muda dengan sejarah, nilai-nilai, dan warisan leluhur. Penggunaan bahasa Mandailing dalam komunikasi sehari-hari di dalam rumah memperkuat keterikatan emosional dengan identitas etnis, karena bahasa adalah cerminan dari cara pandang dan tradisi lokal. Lebih dari itu, dalam keluarga juga diajarkan tentang asal-usul genealogis, yang mencakup pengetahuan mengenai marga dan silsilah, serta peran penting leluhur dalam komunitas.

Selain bahasa, keluarga juga berfungsi sebagai wadah untuk mempelajari adat-istiadat, norma, dan etika yang terkait dengan etnisitas. Misalnya, di dalam budaya Mandailing, pengenalan terhadap sistem kekerabatan, aturan pernikahan, serta ritual-ritual adat seperti "Horja Godang" atau upacara-upacara besar lainnya, sering kali dipelajari sejak kecil. Pemahaman ini memberikan anggota keluarga, khususnya generasi muda, landasan untuk menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai etnis. Keluarga dengan demikian menjadi sarana pendidikan sosial yang pertama, tempat di mana etnisitas dihayati bukan hanya sebagai identitas abstrak, tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari.

Keluarga juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas etnis di tengah masyarakat modern yang sering kali homogen secara budaya. Ketika anggota keluarga, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan atau di luar daerah asal (seperti diaspora Mandailing di Malaysia), berhadapan dengan tekanan untuk berasimilasi, keluarga berfungsi sebagai "benteng" pelindung dari pengaruh luar. Melalui perayaan hari besar keagamaan, kegiatan keluarga yang melibatkan adat Mandailing, serta upaya mempertahankan pola pengasuhan tradisional, keluarga menjadi aktor utama dalam memitigasi proses asimilasi yang dapat mengikis identitas etnis.

Kedua, Komunitas, sebagai agregasi dari beberapa keluarga, memperkuat identitas etnis dengan menciptakan ruang sosial di mana interaksi antaranggota etnis lebih intensif. Di kalangan Mandailing, ikatan komunitas berbasis marga atau "punguan" sangat kuat. Ini adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan garis keturunan yang berperan dalam menjaga solidaritas sosial, ekonomi, dan budaya. Punguan menjadi tempat di mana norma-norma budaya ditransmisikan melalui interaksi sosial antaranggota. Dalam komunitas ini, nilai-nilai seperti gotong royong (marsialap ari) dan dukungan kolektif menjadi manifestasi konkret dari identitas etnis yang terjaga.

Selain berfungsi sebagai wadah interaksi sosial, komunitas juga berperan dalam melestarikan adat-istiadat melalui pelaksanaan ritual-ritual kolektif. Upacara adat, seperti pernikahan (marbagas) dan kematian (marpangir), yang melibatkan banyak anggota komunitas, menjadi momen penting dalam penguatan identitas etnis. Acara-acara ini tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga bersifat simbolis, karena melibatkan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui partisipasi dalam kegiatan komunitas, setiap individu memperdalam keterikatan mereka dengan etnisitas mereka dan memperkuat rasa memiliki terhadap identitas Mandailing.

Di era modern, komunitas Mandailing juga telah berkembang menjadi jaringan yang lebih kompleks dengan adanya diaspora di perkotaan besar atau di luar negeri. Komunitas-komunitas Mandailing di daerah perantauan tetap menjaga hubungan erat dengan komunitas asal melalui berbagai bentuk komunikasi dan pertemuan reguler. Mereka mengadakan kegiatan bersama seperti pertemuan adat, perayaan keagamaan, dan diskusi budaya yang membantu menjaga ikatan dan memperkuat etnisitas di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, komunitas tidak hanya bertindak sebagai ruang sosial tetapi juga sebagai alat strategis untuk mempertahankan etnisitas dalam konteks migrasi dan perubahan sosial yang cepat.

Ketiga, Organisasi formal dan informal yang berbasis etnisitas memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan etnisasi, terutama di luar lingkungan lokal atau keluarga. Dalam konteks Mandailing, organisasi-organisasi berbasis marga atau daerah asal, seperti "Punguan Mandailing" atau "Persatuan Mandailing," berfungsi sebagai alat untuk melindungi dan mempromosikan identitas budaya. Organisasi ini sering kali mengadakan acara budaya, seperti festival, seminar, atau pelatihan yang terkait dengan seni, musik, dan tari Mandailing. Dengan cara ini, organisasi etnis bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya individu-individu dengan latar belakang yang sama, tetapi juga menjadi agen aktif dalam pelestarian budaya.

Organisasi etnis juga memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok etnis tertentu. Di banyak tempat, organisasi Mandailing terlibat dalam advokasi kebijakan yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat Mandailing di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, mereka dapat berperan dalam memperjuangkan pengakuan formal terhadap adat Mandailing atau dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat di daerah asal. Selain itu, organisasi-organisasi ini sering berperan dalam menyalurkan bantuan sosial atau ekonomi kepada anggotanya, baik melalui pemberian beasiswa, pelatihan kerja, atau bentuk dukungan lainnya yang membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas Mandailing.

Dalam konteks diaspora, organisasi Mandailing juga berfungsi sebagai penghubung antara komunitas di perantauan dan kampung halaman. Mereka mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat sosial dan budaya, tetapi juga ekonomi, seperti program-program pengembangan kampung halaman (community development). Dengan memobilisasi sumber daya dari anggota diaspora, organisasi ini mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kegiatan ekonomi di daerah asal. Hal ini memperkuat keterikatan etnis antaranggota komunitas, sekaligus menunjukkan bahwa etnisitas dapat menjadi basis solidaritas yang produktif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

Keempat, pendidikan formal sering menjadi medium penting dalam proses etnisasi, terutama ketika kurikulum mencakup pengetahuan tentang sejarah lokal dan identitas etnis. Di kalangan Mandailing, meskipun sistem pendidikan modern tidak selalu memasukkan pelajaran khusus tentang budaya lokal, banyak sekolah atau institusi pendidikan berbasis komunitas yang memasukkan unsur-unsur budaya Mandailing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan seperti seni tari, musik gondang, dan bahasa Mandailing sering kali diajarkan di luar kurikulum formal, membantu generasi muda memahami dan merangkul identitas etnis mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga budaya.

Agama juga memiliki peran sentral dalam proses etnisasi, terutama di kalangan masyarakat yang sangat religius seperti Mandailing, yang mayoritas beragama Islam. Masjid dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi komunitas, di mana identitas etnis dan keagamaan sering kali saling terkait. Dalam banyak upacara adat, unsur-unsur Islam turut hadir, menunjukkan bagaimana etnisitas dan agama terjalin erat. Pendidikan agama juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai yang relevan dengan adat Mandailing, seperti rasa hormat terhadap leluhur, pentingnya keluarga, dan gotong royong.

Selain itu, lembaga agama sering kali menjadi tempat di mana masyarakat Mandailing berinteraksi dan memperkuat solidaritas mereka. Misalnya, dalam konteks diaspora, masjid-masjid atau komunitas Muslim Mandailing di luar negeri sering kali mengadakan pengajian atau pertemuan yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga mencakup diskusi budaya. Ini memungkinkan anggota komunitas mempertahankan identitas etnis mereka sambil menavigasi identitas religius dalam lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, agama dan pendidikan menjadi dua institusi yang saling melengkapi dalam memperkuat proses etnisasi di tengah perubahan sosial yang cepat.

Bab IV Transformasi Identitas: Tantangan dan Peluang Diaspora Mandailing

Bagian ini merupakan uraian seputar Transformasi identitas yang telah menjadi isu sentral bagi diaspora Mandailing di era modern, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Diaspora Mandailing di Malaysia, yang awalnya berakar kuat pada tradisi dan adat istiadat Sumatera Utara, kini berada di persimpangan antara mempertahankan warisan budaya mereka dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang muncul di masyarakat modern. Dalam konteks ini, proses transformasi identitas tidak hanya melibatkan aspek kultural semata, tetapi juga mencakup negosiasi identitas di ranah sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global.

Tantangan utama yang dihadapi oleh diaspora Mandailing adalah bagaimana mereka dapat mempertahankan identitas etnis dan budaya mereka di tengah tekanan asimilasi dan modernisasi. Generasi muda Mandailing sering kali dihadapkan pada dilema antara mengadopsi identitas Melayu yang dominan di Malaysia atau terus mempertahankan tradisi Mandailing yang khas. Selain itu, globalisasi dan urbanisasi mempercepat perubahan dalam cara komunitas Mandailing memandang diri mereka sendiri, di mana nilai-nilai tradisional dan ikatan komunitas menghadapi tantangan dari gaya hidup modern dan teknologi yang semakin mendunia.

Di sisi lain, era modern juga membawa peluang bagi diaspora Mandailing untuk memperkaya identitas mereka. Penggunaan teknologi dan media sosial memungkinkan komunitas Mandailing untuk terhubung dengan jaringan diaspora global, berbagi pengetahuan tentang warisan budaya, dan memperkuat solidaritas etnis. Selain itu, transformasi identitas ini juga membuka ruang bagi kreativitas dalam menavigasi antara tradisi dan modernitas, menciptakan bentuk-bentuk baru identitas hibrid yang tetap menghormati akar budaya Mandailing sambil merespons tuntutan dunia yang semakin kosmopolitan.

A. Tantangan Mobilitas Sosial di Era Modern

Meski terdapat peluang untuk mobilitas sosial, orang Mandailing di Malaysia masih menghadapi tantangan dalam mencapai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, terutama dalam era modern di mana kompetisi ekonomi semakin ketat. Sektor-sektor pekerjaan yang dulu didominasi oleh bumiputera kini semakin terbuka bagi non-bumiputera, dan globalisasi menambah dimensi baru dalam persaingan pekerjaan di pasar kerja . Di sisi lain, orang Mandailing yang tinggal di daerah perkotaan lebih cenderung menghadapi tantangan yang terkait dengan urbanisasi dan perubahan sosial, yang dapat menghalangi mereka dari mobilitas sosial vertikal.

Generasi muda Mandailing juga dihadapkan pada pilihan identitas yang kompleks, di mana mereka harus menavigasi antara tuntutan untuk mengadopsi identitas Melayu yang lebih dominan atau mempertahankan warisan budaya Mandailing mereka. Proses ini berdampak langsung pada kesempatan mereka untuk bergerak dalam struktur sosial ekonomi Malaysia. Mereka yang memilih untuk berintegrasi ke dalam komunitas Melayu yang lebih besar mungkin memiliki akses yang lebih baik ke peluang ekonomi, tetapi ini bisa mengorbankan warisan budaya mereka .

Dengan demikian, mobilitas sosial orang Mandailing di Malaysia adalah proses yang kompleks, dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, jaringan sosial, serta kebijakan afirmatif negara. Meski ada peluang untuk naik kelas sosial, tantangan tetap ada, terutama bagi mereka yang masih terperangkap dalam keterbatasan ekonomi atau kurang terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, analisis tentang mobilitas sosial Mandailing harus mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik identitas, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik .

D. Identitas Hibrida: Perubahan Identitas Mandailing di Malaysia

Konsep transformasi identitas mengacu pada proses di mana identitas individu atau kelompok berubah seiring waktu akibat interaksi dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Menurut Stuart Hall, identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sebuah proses yang selalu dibentuk dan diubah melalui diskursus dan praktik sosial. Dalam pandangan Hall, identitas adalah hasil dari representasi sosial yang terus menerus, di mana individu atau kelompok berinteraksi dengan kekuatan sosial-politik yang ada, seperti migrasi, kolonialisme, dan globalisasi. Oleh karena itu, identitas bersifat dinamis dan berubah seiring dengan perubahan konteks sejarah dan sosial yang mengitarinya.

Sementara itu, Anthony Giddens melihat transformasi identitas sebagai bagian dari modernitas dan globalisasi. Menurut Giddens, individu di era modern memiliki lebih banyak pilihan dan fleksibilitas dalam membentuk identitas mereka karena peningkatan interaksi lintas budaya dan arus informasi. Dalam situasi seperti ini, identitas bukan lagi ditentukan oleh tradisi atau kelompok asal semata, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman baru dan eksposur terhadap dunia yang lebih luas. Giddens menekankan bahwa identitas di era modern bersifat refleksif, di mana individu secara terus-menerus menyesuaikan dan meredefinisi diri mereka sesuai dengan kondisi lingkungan dan interaksi yang mereka alami.

Edward Said, melalui konsep "Orientalism," juga memberikan pandangan mengenai transformasi identitas, terutama dalam konteks kekuasaan dan representasi. Said menyoroti bagaimana identitas kelompok, khususnya identitas kolonial dan pascakolonial, sering kali dibentuk oleh pandangan atau stereotip yang diberikan oleh kelompok dominan. Identitas, menurut Said, tidak terbentuk dalam ruang kosong tetapi dalam relasi kekuasaan, di mana kelompok minoritas atau terpinggirkan sering kali mengalami perubahan identitas sebagai respons terhadap narasi yang diciptakan oleh kelompok mayoritas atau penjajah. Dalam konteks ini, transformasi identitas bisa menjadi cara bagi kelompok terpinggirkan untuk melawan atau menegosiasikan ulang posisi mereka dalam masyarakat yang lebih luas.

Identitas hibrid adalah konsep yang merujuk pada perpaduan atau campuran elemen-elemen budaya yang berbeda, menghasilkan identitas baru yang dinamis dan fleksibel. Dalam masyarakat multietnis seperti Malaysia, identitas hibrid muncul dari interaksi yang terus-menerus antara berbagai kelompok etnis, terutama dalam konteks di mana identitas etnis menjadi bagian dari negosiasi politik dan sosial. Alih-alih mempertahankan identitas tunggal atau statis, individu atau kelompok sering kali memadukan elemen dari identitas budaya yang berbeda untuk membentuk identitas baru yang lebih kompleks. Misalnya, seseorang bisa mengadopsi nilai-nilai Melayu dalam kehidupan publik dan sosial untuk memperoleh akses politik dan ekonomi, sementara tetap mempertahankan aspek-aspek budaya asli seperti bahasa, adat, atau agama dalam kehidupan pribadi mereka.

Proses pembentukan identitas hibrid juga sering kali merupakan respons terhadap tekanan eksternal, seperti kebijakan asimilasi atau marginalisasi kelompok etnis minoritas. Namun, hibriditas tidak selalu merupakan hasil dari paksaan, tetapi juga bisa menjadi cara kreatif bagi individu atau kelompok untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, identitas hibrid mencerminkan kenyataan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang seiring dengan interaksi lintas budaya. Hasilnya, identitas hibrid tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya, tetapi juga memperkaya dinamika sosial dengan menciptakan ruang bagi ekspresi identitas yang lebih beragam dan cair.

Konsep Identitas Hibrida Identitas hibrida merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok mengintegrasikan elemen-elemen dari dua atau lebih identitas kultural yang berbeda, menghasilkan bentuk identitas yang baru. Dalam konteks Mandailing di Malaysia, hibriditas identitas terjadi sebagai respons terhadap interaksi dengan budaya Melayu, dan sering kali melibatkan adopsi elemen-elemen budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari orang Mandailing. Proses ini bukanlah hal yang sederhana; melainkan, ia mencakup

penyesuaian, negosiasi, dan kadang-kadang konflik antara identitas Mandailing yang lebih tradisional dan identitas Melayu yang lebih dominan .

Identitas Mandailing awalnya kuat dan terikat erat dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan bahasa yang unik. Sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia, orang Mandailing memiliki kebudayaan yang kaya, termasuk bahasa Mandailing dan adat istiadat yang khas, seperti upacara pernikahan, perayaan panen, dan tradisi Gordang Sambilan . Ketika orang Mandailing bermigrasi ke Malaysia, mereka membawa serta warisan budaya ini, yang menjadi bagian penting dari identitas mereka di negara baru. Namun, ketika mereka berinteraksi dengan kelompok etnis lain, terutama Melayu, proses hibridisasi mulai terjadi.

Proses Melayunisasi Proses Melayunisasi adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap hibriditas identitas Mandailing. Melayunisasi mengacu pada adopsi unsur-unsur budaya Melayu, baik dalam aspek bahasa, perilaku, dan praktik keagamaan. Sebagai contoh, banyak orang Mandailing yang mulai menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari, mengadopsi tradisi keagamaan dan kultural Melayu, serta terlibat dalam praktik sosial yang berkaitan dengan komunitas Melayu . Proses ini sering kali dipicu oleh kebijakan negara yang mendorong integrasi dan harmoni antar etnis, terutama di kalangan bumiputera.

Di tingkat individu, identitas hibrida Mandailing sering kali terlihat dalam cara orang Mandailing menjalani kehidupan sehari-hari. Generasi muda Mandailing yang lahir dan besar di Malaysia cenderung memiliki identitas yang lebih kompleks, di mana mereka mungkin mengidentifikasi diri sebagai Melayu tetapi tetap merayakan tradisi Mandailing di tingkat keluarga. Misalnya, mereka mungkin merayakan hari raya seperti Idul Fitri dengan cara yang menggabungkan tradisi Melayu dan Mandailing, seperti penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi, tetapi tetap mempertahankan praktik-praktik unik dari tradisi Mandailing dalam upacara keluarga .

Di tingkat komunitas, hibriditas identitas juga terlihat dalam bagaimana komunitas Mandailing berinteraksi dengan komunitas Melayu dan etnis lainnya. Dalam banyak kasus, komunitas Mandailing di Malaysia membentuk jaringan sosial yang mencakup individu dari berbagai latar belakang etnis. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkolaborasi, yang selanjutnya memperkuat proses hibridisasi identitas. Komunitas Mandailing sering kali terlibat dalam kegiatan lintas etnis, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi, yang mengarah pada penguatan identitas hibrida mereka .

Meskipun hibriditas identitas Mandailing dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi yang positif, proses ini juga menimbulkan tantangan. Beberapa orang Mandailing merasa terancam oleh hilangnya identitas budaya asli mereka. Mereka khawatir bahwa generasi muda, yang semakin terpapar pada budaya Melayu dan gaya hidup modern, mungkin akan melupakan tradisi dan bahasa Mandailing yang telah diwariskan. Dalam beberapa kasus, konflik antara generasi tua dan muda muncul karena perbedaan pandangan tentang pentingnya mempertahankan identitas tradisional versus adaptasi ke dalam budaya Melayu .

Respon terhadap hibriditas identitas Mandailing bervariasi di dalam komunitas. Beberapa individu dan kelompok berusaha untuk mempromosikan kebanggaan budaya dan menjaga tradisi Mandailing. Mereka mungkin mengadakan acara budaya, seperti festival, upacara adat, dan kegiatan kesenian yang menonjolkan warisan Mandailing, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap identitas mereka. Sementara itu, ada juga individu yang lebih cenderung menerima identitas Melayu sebagai bagian dari strategi sosial dan ekonomi untuk mendapatkan akses ke peluang yang lebih baik dalam masyarakat yang didominasi oleh Melayu .

Hibriditas identitas Mandailing juga memberikan kontribusi pada keragaman budaya di Malaysia. Identitas hibrida ini memperkaya budaya Malaysia secara keseluruhan, di mana elemen-elemen budaya Mandailing dapat ditemukan dalam seni, musik, makanan, dan praktik

sosial di Malaysia. Misalnya, penampilan tarian dan musik Mandailing dalam acara lintas budaya menunjukkan bagaimana hibriditas dapat menciptakan interaksi positif antara berbagai kelompok etnis. Dalam hal ini, hibriditas identitas Mandailing tidak hanya mencerminkan adaptasi individu, tetapi juga menciptakan jembatan antara budaya yang berbeda dalam konteks Malaysia yang multikultural.

Kebijakan negara juga memainkan peran penting dalam proses hibriditas identitas. Dalam konteks Malaysia, pemerintah mendorong multikulturalisme dan kerjasama antar etnis melalui program-program yang bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial. Kebijakan ini memberikan ruang bagi komunitas Mandailing untuk mempertahankan unsur-unsur budaya mereka sambil tetap berintegrasi dengan budaya Melayu. Melalui kebijakan yang inklusif, negara menciptakan lingkungan yang mendukung hibriditas identitas, yang selanjutnya dapat mengurangi ketegangan etnis di dalam masyarakat .

Secara keseluruhan, identitas hibrida Mandailing di Malaysia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara budaya Mandailing dan Melayu, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan negara. Hibriditas ini mencerminkan proses adaptasi yang dinamis, di mana individu dan komunitas Mandailing berusaha menyeimbangkan antara mempertahankan warisan budaya mereka dan berintegrasi dengan budaya Melayu yang dominan. Di tengah tantangan yang dihadapi, identitas hibrida ini juga memberikan kontribusi pada keragaman budaya Malaysia dan menciptakan jembatan antara berbagai kelompok etnis. Oleh karena itu, memahami hibriditas identitas Mandailing adalah kunci untuk memahami dinamika sosial di Malaysia yang lebih luas .

Tidak semua bentuk transformasi identitas menghasilkan budaya hibrid. Transformasi identitas bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya di mana transformasi tersebut berlangsung. Budaya hibrid adalah salah satu kemungkinan hasil dari proses transformasi identitas, tetapi itu bukanlah satu-satunya hasil.

Budaya hibrid terjadi ketika elemen-elemen dari berbagai identitas atau budaya bercampur untuk menciptakan identitas baru yang mencerminkan perpaduan unsur-unsur tersebut. Hibriditas biasanya muncul dalam situasi di mana ada interaksi intens antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda, seperti dalam kasus migrasi, kolonialisme, atau globalisasi. Dalam konteks ini, individu atau kelompok sering kali menggabungkan elemen-elemen dari budaya asal mereka dengan budaya dominan atau budaya lain yang mereka temui. Contoh dari budaya hibrid adalah campuran praktik adat lokal dengan praktik modern dalam masyarakat multikultural.

Namun, dalam beberapa kasus, transformasi identitas dapat menghasilkan proses asimilasi alih-alih budaya hibrid. Asimilasi terjadi ketika individu atau kelompok minoritas mengadopsi sepenuhnya budaya atau identitas kelompok mayoritas, sehingga identitas asal mereka hilang atau sangat tereduksi. Proses asimilasi bisa didorong oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi, di mana kelompok minoritas merasa harus menyesuaikan diri dengan budaya dominan untuk mendapatkan keuntungan atau diakui secara sosial. Dalam kasus ini, transformasi identitas menghasilkan homogenisasi budaya, bukan hibriditas, karena elemen-elemen budaya minoritas cenderung ditinggalkan atau dihapus.

Selain itu, transformasi identitas juga dapat terjadi dalam bentuk resistensi atau penegasan kembali identitas asli. Dalam situasi tertentu, tekanan untuk beradaptasi dengan budaya dominan justru dapat mendorong kelompok atau individu untuk memperkuat identitas etnis atau budaya mereka sebagai bentuk perlawanan. Hal ini dapat terjadi dalam konteks di mana kelompok minoritas merasa bahwa identitas mereka terancam, sehingga mereka secara aktif menjaga, mempromosikan, atau bahkan mempertegas unsur-unsur budaya yang membedakan mereka dari kelompok mayoritas. Dalam skenario ini, tidak terjadi hibriditas, tetapi lebih pada penguatan identitas asal sebagai bentuk pertahanan budaya.

Dengan demikian, meskipun transformasi identitas sering kali menghasilkan budaya hibrid dalam konteks interaksi lintas budaya, itu bukanlah satu-satunya hasil. Proses asimilasi atau resistensi identitas juga dapat muncul, tergantung pada kondisi sosial-politik dan dinamika kekuasaan yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam proses transformasi identitas tersebut.

E. Peran Ekonomi Sosial Orang Mandailing di Malaysia

Peran ekonomi dan sosial sangat penting dalam menjaga serta memperkuat identitas etnis Mandailing, terutama di kalangan diaspora Mandailing di Malaysia. Kegiatan ekonomi seperti sektor pertanian, usaha kecil dan menengah (UKM), serta remitansi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan material komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga ikatan sosial, budaya, dan solidaritas antaranggota etnis. Berikut ini adalah pembahasan mengenai peran ekonomi dan sosial melalui tiga sektor utama:

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi tradisional bagi masyarakat Mandailing, terutama di Sumatera Utara, namun peran ini juga terbawa ke diaspora Mandailing di Malaysia. Bagi sebagian besar Mandailing yang bermigrasi ke Malaysia, pertanian menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dipertahankan, terutama di wilayah pedesaan. Aktivitas seperti menanam padi, kelapa sawit, dan komoditas perkebunan lainnya menjadi sumber mata pencaharian yang penting bagi sebagian anggota komunitas. Selain sebagai sumber penghasilan, keterlibatan dalam sektor pertanian ini juga menjadi cara bagi komunitas Mandailing untuk menjaga keterikatan mereka dengan tanah dan alam, yang secara tradisional sangat dihargai dalam budaya mereka.

Di beberapa tempat di Malaysia, seperti di Perak dan Selangor, ada komunitas Mandailing yang masih mempertahankan praktik pertanian tradisional. Meskipun teknologi modern telah merubah cara bertani, nilai-nilai gotong royong dan kerja kolektif tetap hidup

dalam cara mereka mengelola lahan. Ini juga merupakan bentuk manifestasi dari etos kerja yang khas Mandailing, di mana prinsip-prinsip sosial seperti saling membantu dan berbagi hasil panen tetap dihormati. Keterlibatan dalam sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam mempertahankan beberapa aspek budaya Mandailing, seperti ritual syukuran hasil panen yang sering melibatkan elemen-elemen adat.

Namun, meskipun pertanian masih relevan bagi sebagian komunitas, banyak generasi muda Mandailing di Malaysia beralih ke sektor lain yang lebih modern atau urban, meninggalkan sektor pertanian yang semakin menurun. Ini menciptakan tantangan bagi kelangsungan ekonomi berbasis pertanian dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional, karena semakin banyak keluarga Mandailing yang berpindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang ekonomi yang lebih menguntungkan.

2. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi salah satu pilar utama ekonomi bagi komunitas Mandailing di Malaysia. Banyak diaspora Mandailing yang terlibat dalam perdagangan, baik dalam bentuk warung kecil, restoran, maupun jasa. Keterlibatan mereka dalam UKM bukan hanya memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga, tetapi juga membantu mempertahankan dan menyebarkan budaya Mandailing melalui produk atau jasa yang mereka tawarkan. Sebagai contoh, restoran yang dikelola oleh komunitas Mandailing mungkin menyajikan makanan khas Mandailing, seperti gulai ikan atau sambal tuktuk, yang tidak hanya menarik konsumen lokal tetapi juga menjadi cara untuk mempromosikan identitas budaya mereka.

Selain itu, usaha kecil yang dimiliki oleh orang Mandailing sering kali melibatkan anggota keluarga, menciptakan model ekonomi berbasis keluarga yang memperkuat ikatan sosial di antara anggota keluarga dan komunitas. Ini adalah bentuk adaptasi ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai tradisional seperti kekeluargaan dan kerjasama dengan tuntutan

modernisasi ekonomi. Usaha kecil juga sering menjadi pintu masuk bagi generasi muda Mandailing untuk memulai karir mereka, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pekerja dalam bisnis keluarga. Dalam konteks ini, UKM berperan sebagai salah satu motor penggerak utama mobilitas ekonomi dan sosial di kalangan diaspora Mandailing di Malaysia.

Peran UKM juga tidak terlepas dari jaringan sosial yang kuat di dalam komunitas Mandailing. Melalui jaringan ini, pelaku usaha kecil dapat berbagi informasi, sumber daya, dan bantuan dalam bentuk modal atau saran bisnis. Solidaritas komunitas ini memperkuat kemampuan UKM untuk bertahan dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif, dan sekaligus menjadi mekanisme sosial untuk memperkuat ikatan etnis di antara anggota komunitas Mandailing. Jadi, UKM tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi individu, tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk memperkuat identitas kolektif di lingkungan diaspora.

3. Remitansi

Remitansi atau pengiriman uang dari anggota diaspora Mandailing yang bekerja di Malaysia ke kampung halaman mereka di Sumatera Utara memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi komunitas Mandailing, baik di tanah air maupun di perantauan. Bagi keluarga di Sumatera Utara, remitansi menjadi salah satu sumber penghasilan utama yang mendukung kesejahteraan keluarga, terutama di kalangan keluarga yang masih bergantung pada pertanian subsisten atau usaha kecil. Uang yang dikirim oleh anggota keluarga yang bekerja di Malaysia sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan rumah, serta investasi dalam usaha kecil.

Selain itu, remitansi juga menjadi cara bagi diaspora Mandailing untuk mempertahankan ikatan emosional dan sosial dengan kampung halaman mereka. Melalui remitansi, mereka dapat terlibat dalam pembangunan komunitas di kampung asal, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau infrastruktur desa lainnya. Ini memperkuat solidaritas etnis antara komunitas Mandailing di perantauan dan di tanah air, serta memberikan perasaan

keterlibatan dalam perkembangan dan kesejahteraan komunitas mereka. Secara sosial, remitansi juga menjadi sarana untuk menjaga posisi dan status keluarga di dalam komunitas, karena keluarga yang menerima remitansi sering kali dianggap lebih sejahtera dan terhormat.

Namun, ada juga dimensi sosial lain dari remitansi, yaitu bagaimana pengiriman uang ini memengaruhi hubungan kekuasaan di dalam komunitas Mandailing. Dalam beberapa kasus, remitansi dapat memperlebar kesenjangan antara keluarga yang memiliki akses ke sumber daya dari diaspora dengan yang tidak. Keluarga yang menerima remitansi mungkin memiliki lebih banyak kekuatan dalam pengambilan keputusan komunitas, terutama dalam acara-acara adat atau pertemuan masyarakat. Meskipun remitansi memiliki banyak manfaat ekonomi, juga penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap dinamika sosial di dalam komunitas Mandailing.

C. Peran Sosial dan Partisipasi Politik

Peran orang Mandailing, dalam masyarakat Malaysia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, baik dalam konteks interaksi sosial dengan etnis lain maupun dalam partisipasi politik lokal. Sebagai bagian dari diaspora Mandailing yang telah lama menetap di Malaysia, kelompok ini telah menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai interaksi mereka dengan etnis lain serta keterlibatan mereka dalam politik lokal:

1. Interaksi dengan Etnis Lain

Orang Mandailing di Malaysia, termasuk yang bermarga Nasution dan Lubis, telah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai kelompok etnis di Malaysia, seperti Melayu, Cina, dan India. Meskipun mereka adalah bagian dari komunitas diaspora, banyak orang Mandailing yang sudah diintegrasikan ke dalam identitas Melayu melalui proses asimilasi. Ini terutama berlaku bagi mereka yang beragama Islam, di mana agama memainkan peran penting

dalam membentuk identitas nasional Malaysia. Sebagai bagian dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam, orang Mandailing sering kali dianggap sebagai bagian dari masyarakat Melayu, terutama karena kesamaan agama, bahasa, dan beberapa aspek budaya yang telah berbaur dengan tradisi Melayu setempat.

Namun, meskipun telah berasimilasi dengan masyarakat Melayu, orang Mandailing tetap mempertahankan identitas budaya mereka sendiri, terutama melalui adat istiadat dan bahasa mereka. Interaksi mereka dengan etnis lain juga sering kali diwarnai dengan rasa saling menghormati terhadap keberagaman budaya. Dalam konteks ini, banyak individu Mandailing yang aktif dalam membangun jembatan antara komunitas mereka dengan kelompok etnis lain melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam sektor perdagangan dan bisnis, misalnya, orang Mandailing sering kali bekerja sama dengan pengusaha dari etnis Cina dan India, membentuk jaringan ekonomi yang lebih luas.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antara Mandailing dan kelompok etnis lain sering terlihat dalam konteks sehari-hari, seperti di pasar, lingkungan kerja, dan lembaga pendidikan. Orang Mandailing, terutama generasi muda, sering kali berbagi pengalaman budaya dengan teman-teman dari berbagai etnis, memperkaya keragaman budaya Malaysia. Meskipun telah berasimilasi dalam beberapa hal, banyak orang Mandailing masih mempertahankan tradisi pertemuan keluarga besar atau komunitas (punguan), yang tidak hanya memperkuat ikatan internal tetapi juga menciptakan ruang untuk interaksi lintas etnis melalui acara-acara publik.

2. Partisipasi dalam Politik Lokal

Partisipasi politik orang Mandailing di Malaysia telah meningkat seiring waktu, dengan beberapa individu dari komunitas ini memainkan peran penting dalam politik lokal. Orang-orang bermarga Nasution dan Lubis adalah di antara mereka yang aktif terlibat dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa individu Mandailing telah berhasil menduduki posisi penting di berbagai lembaga pemerintahan atau politik, dan keterlibatan mereka

mencerminkan keinginan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional Malaysia sambil tetap mempertahankan identitas etnis mereka.

Secara historis, orang Mandailing memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam sektor administrasi dan pemerintahan di Malaysia, sebagian karena banyak dari mereka memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pandangan politik yang progresif. Di beberapa wilayah, seperti Perak dan Selangor, di mana komunitas Mandailing cukup besar, mereka telah memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan lokal, terutama dalam hal pembangunan komunitas dan ekonomi. Keterlibatan mereka dalam partai politik seperti UMNO (United Malays National Organisation) atau partai politik lain yang mendukung kepentingan Melayu menunjukkan bahwa orang Mandailing juga terlibat dalam dinamika politik arus utama di Malaysia.

Selain berpartisipasi dalam politik formal, individu Mandailing juga terlibat dalam aktivitas advokasi sosial dan komunitas yang memiliki dampak politik. Mereka sering terlibat dalam isu-isu seperti pendidikan, hak-hak masyarakat adat, serta pembangunan ekonomi daerah. Beberapa di antara mereka juga berperan sebagai mediator antara pemerintah lokal dan masyarakat adat dalam penyelesaian konflik tanah atau masalah sosial lainnya. Pengaruh politik mereka di tingkat lokal membantu memperkuat posisi komunitas Mandailing dalam diskursus nasional, terutama dalam hal integrasi sosial dan budaya.

3. Dinamika Identitas Politik dan Budaya

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas Mandailing di Malaysia, termasuk mereka yang bermarga Nasution dan Lubis, adalah bagaimana mereka menavigasi identitas etnis dan politik di tengah identitas Melayu yang dominan. Sebagai kelompok yang secara historis bermigrasi dari Sumatera, orang Mandailing sering dihadapkan pada dilema antara mempertahankan warisan budaya mereka dan berintegrasi ke dalam identitas nasional Malaysia. Keterlibatan mereka dalam politik sering kali mencerminkan upaya untuk

menyeimbangkan kedua hal ini. Banyak di antara mereka yang menggunakan platform politik untuk memperjuangkan kebijakan yang mendukung pluralisme budaya dan pengakuan terhadap keberagaman dalam kerangka kebangsaan Malaysia.

Identitas Mandailing juga memainkan peran dalam pembentukan solidaritas politik dengan kelompok etnis lain. Misalnya, mereka cenderung mendukung kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan kerukunan antar etnis, mengingat pengalaman mereka sendiri sebagai kelompok diaspora. Selain itu, orang Mandailing yang sukses dalam politik sering kali menjadi simbol bagi komunitas mereka, menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang minoritas, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, orang Mandailing, terutama yang bermarga Nasution dan Lubis, telah memainkan peran penting dalam memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan politik di Malaysia. Melalui interaksi yang harmonis dengan kelompok etnis lain dan keterlibatan dalam politik lokal, mereka membantu memajukan cita-cita pluralisme dan keragaman di negara ini. Tantangan bagi mereka adalah mempertahankan keseimbangan antara identitas etnis dan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang di Malaysia.

D. Diskriminasi dan Stereotip

Komunitas Mandailing di Malaysia, meskipun telah berasimilasi dalam beberapa hal dengan masyarakat Melayu, tetap menghadapi tantangan diskriminasi dan stereotip yang bisa berdampak pada posisi mereka di masyarakat. Sebagai kelompok diaspora dari Indonesia, orang Mandailing terkadang dianggap "pendatang" dalam masyarakat, meskipun mereka telah lama tinggal dan berkontribusi di Malaysia. Stigma ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap berbagai peluang, termasuk pekerjaan dan layanan sosial. Meskipun secara kultural mereka berbagi banyak kesamaan dengan orang Melayu, identitas Mandailing yang unik sering

kali menjadi sasaran stereotip tertentu, seperti dianggap kurang "asli" atau tidak cukup mencerminkan nilai-nilai nasional Malaysia.

Diskriminasi ini seringkali bersifat implisit, seperti dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal atau dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Orang Mandailing yang tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian integral dari identitas Melayu terkadang dihadapkan pada kendala birokrasi dan sosial yang lebih besar. Misalnya, di beberapa daerah, ada kasus di mana individu dari komunitas Mandailing mungkin mengalami hambatan dalam memperoleh akses terhadap hak-hak tanah atau kesempatan politik yang biasanya diberikan kepada kelompok Melayu yang lebih mapan.

Selain itu, stereotip yang melekat pada komunitas Mandailing bisa menciptakan ketegangan sosial. Di kalangan masyarakat yang lebih luas, orang Mandailing mungkin dianggap sebagai kelompok yang terpisah secara kultural, bahkan jika mereka telah lama beradaptasi dengan norma-norma Melayu. Hal ini bisa memicu perlakuan berbeda, baik dalam konteks profesional maupun sosial, di mana komunitas Mandailing tidak selalu mendapatkan pengakuan yang setara dengan kelompok etnis lain di Malaysia.

Tantangan lain terkait diskriminasi adalah ketika orang Mandailing mencoba untuk mempertahankan identitas etnis mereka dalam lingkungan yang menekankan homogenitas budaya. Ada tekanan sosial yang kuat bagi mereka untuk mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu secara penuh, yang dapat mempersulit upaya untuk melestarikan elemen-elemen budaya Mandailing, seperti bahasa dan adat-istiadat, yang mungkin dianggap sebagai penghalang integrasi. Tekanan ini dapat menciptakan ketegangan internal di antara anggota komunitas yang ingin mempertahankan warisan budaya mereka sembari menyesuaikan diri dengan tuntutan identitas nasional.

Namun, komunitas Mandailing juga telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi diskriminasi dan stereotip ini. Melalui keterlibatan yang lebih besar dalam politik, ekonomi,

dan pendidikan, mereka secara bertahap mengatasi hambatan-hambatan ini. Solidaritas internal di kalangan Mandailing juga membantu mengurangi dampak diskriminasi, karena mereka saling mendukung dan memperjuangkan hak-hak mereka di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan tetap ada, ada juga strategi yang diterapkan oleh komunitas untuk mengatasinya.

1. Pelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan tantangan yang signifikan bagi komunitas Mandailing di Malaysia, terutama karena mereka berada dalam lingkungan yang sangat beragam secara budaya dan secara politis mendorong homogenisasi identitas Melayu. Salah satu aspek utama dari budaya Mandailing yang terancam adalah bahasa. Bahasa Mandailing, yang menjadi inti dari identitas budaya mereka, semakin jarang digunakan di kalangan generasi muda yang lebih memilih bahasa Melayu atau bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Ini menjadi perhatian serius karena bahasa adalah salah satu elemen penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya.

Selain bahasa, adat-istiadat Mandailing juga menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Upacara adat, seperti pernikahan tradisional (marbagas) atau ritual kematian (marpangir), semakin jarang dipraktikkan di lingkungan urban dan modern. Banyak orang Mandailing yang tinggal di perkotaan atau daerah diaspora lainnya memilih upacara yang lebih sederhana dan tidak melibatkan tradisi adat sepenuhnya. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, atau tekanan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, tantangan pelestarian budaya sangat terkait dengan dinamika perubahan sosial dan ekonomi di Malaysia.

Namun, pelestarian budaya Mandailing tidak sepenuhnya terabaikan. Beberapa komunitas Mandailing, terutama yang berada di daerah yang lebih tradisional atau terorganisir, tetap berusaha melestarikan budaya mereka melalui kegiatan komunitas. Misalnya, ada

organisasi budaya Mandailing yang aktif menyelenggarakan festival tahunan, acara budaya, serta pelatihan seni tradisional seperti tari Tor-Tor dan musik gondang. Upaya ini menjadi salah satu bentuk resistensi terhadap arus modernisasi yang dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya mereka.

Pelestarian budaya Mandailing juga terkait dengan transmisi pengetahuan antar generasi. Orang tua dan sesepuh komunitas sering kali menjadi pelindung nilai-nilai dan tradisi yang penting, serta berusaha untuk menanamkan hal-hal tersebut kepada generasi muda. Meski demikian, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa generasi berikutnya tertarik dan bersedia untuk melanjutkan tradisi ini di tengah dinamika modernisasi yang kuat. Kesadaran generasi muda tentang pentingnya identitas budaya menjadi krusial dalam konteks ini.

Di sisi lain, pelestarian budaya juga menghadapi tantangan dari keterbatasan sumber daya. Tidak semua komunitas Mandailing di Malaysia memiliki akses yang cukup untuk mendukung kegiatan pelestarian budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk dukungan dari pemerintah atau pihak swasta dalam memberikan bantuan finansial atau fasilitas bagi kegiatan budaya ini. Jika tidak ada dukungan yang memadai, ada risiko bahwa budaya Mandailing akan semakin tergerus oleh modernitas dan homogenisasi budaya.

2. Peluang untuk Perkembangan Komunitas Mandailing

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Mandailing di Malaysia juga memiliki peluang yang signifikan untuk berkembang. Salah satu peluang utama adalah integrasi ekonomi. Dengan banyaknya orang Mandailing yang terlibat dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM), ada potensi bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas mereka melalui pengembangan bisnis dan jaringan perdagangan yang lebih luas. Dalam konteks ini, diaspora Mandailing bisa memanfaatkan peluang di Malaysia untuk

memperkuat sektor ekonomi mereka, baik melalui kerja sama dengan etnis lain maupun melalui inisiatif internal yang fokus pada pemberdayaan ekonomi komunitas.

Selain itu, pendidikan juga merupakan peluang besar bagi komunitas Mandailing untuk berkembang. Banyak orang Mandailing yang berhasil dalam pendidikan formal, dan ini membuka pintu bagi generasi muda mereka untuk mencapai posisi yang lebih strategis di berbagai bidang, termasuk politik, pemerintahan, dan sektor swasta. Dengan akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi, komunitas Mandailing dapat berperan lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Pendidikan juga memberikan alat bagi generasi muda untuk mempertahankan budaya mereka sambil beradaptasi dengan dunia modern.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah keterlibatan dalam politik lokal dan nasional. Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki sejarah panjang di Malaysia, orang Mandailing dapat menggunakan pengaruh politik mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta untuk memperkuat posisi komunitas di ranah publik. Keterlibatan dalam politik memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang relevan bagi perkembangan ekonomi, budaya, dan sosial komunitas mereka. Dengan semakin banyaknya individu Mandailing yang terlibat dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, ada harapan bahwa suara mereka akan semakin didengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan.

Selain peluang di bidang ekonomi dan politik, komunitas Mandailing juga dapat memanfaatkan tren global yang mendukung pluralisme budaya dan multikulturalisme. Dengan meningkatnya apresiasi terhadap keberagaman budaya, komunitas Mandailing memiliki kesempatan untuk mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya mereka di tingkat yang lebih luas. Festival budaya, pertunjukan seni, serta kegiatan budaya lainnya dapat menjadi platform untuk memperkenalkan budaya Mandailing kepada masyarakat Malaysia yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kebanggaan akan identitas etnis mereka.

Terakhir, teknologi digital dan media sosial memberikan peluang baru bagi komunitas Mandailing untuk mempertahankan dan menyebarluaskan identitas mereka. Melalui platform online, komunitas dapat mengorganisir dan mempromosikan kegiatan budaya, mendokumentasikan tradisi, serta memperkuat jaringan diaspora Mandailing di seluruh dunia. Teknologi ini memberikan alat yang lebih fleksibel bagi mereka untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih luas dalam upaya pelestarian budaya. Dengan memanfaatkan peluang ini, komunitas Mandailing di Malaysia dapat memperkuat identitas mereka sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kontestasi identitas di antara para migran di Malaysia merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan persaingan antar kelompok etnis dan migran yang beragam dalam hal identitas budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam masyarakat multietnis seperti Malaysia, identitas menjadi faktor penting yang memengaruhi hubungan antar kelompok, di mana berbagai kelompok migran—Mandailing, Jawa, Bugis, Tionghoa, India, dan lainnya—berusaha menegosiasikan posisi mereka dalam hierarki sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, politik etnik, dan dinamika sosial.

3. Politik Etnik dan Identitas Nasional

Kontestasi identitas migran di Malaysia sering kali dipengaruhi oleh kebijakan negara yang memprioritaskan identitas etnis tertentu, terutama identitas Melayu melalui kebijakan Bumiputera. Kebijakan ini memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi kelompok Melayu dan kelompok yang diakui sebagai Bumiputera, termasuk beberapa kelompok migran asal Nusantara seperti Mandailing, Bugis, dan Jawa, yang diidentifikasi lebih dekat dengan Melayu karena kesamaan agama Islam. Namun, kelompok migran lainnya, seperti Tionghoa dan India, yang secara historis memiliki peran ekonomi penting di Malaysia, sering kali merasa berada dalam posisi marginal secara politik meskipun mereka memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks ini, kontestasi identitas muncul dalam bentuk upaya dari berbagai kelompok migran untuk mengklaim kedekatan dengan identitas Melayu atau untuk menegosiasikan status mereka dalam struktur sosial Malaysia yang dibentuk oleh politik etnik. Misalnya, beberapa kelompok migran seperti Mandailing dan Bugis berusaha menguatkan narasi kedekatan budaya dengan Melayu untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari "bangsa Melayu" dan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan Bumiputera. Pada saat yang sama, kelompok lain, seperti Tionghoa dan India, menegosiasikan identitas mereka melalui upaya mempertahankan budaya dan identitas etnis mereka, sambil tetap mencari cara untuk terintegrasi dalam struktur ekonomi dan sosial yang didominasi oleh etnis Melayu.

4. Kontestasi Ekonomi dan Sosial

Selain politik etnik, kontestasi identitas di antara para migran juga tercermin dalam persaingan ekonomi dan sosial. Kelompok-kelompok migran di Malaysia sering kali berkompetisi untuk mengakses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesempatan sosial yang terbatas. Kelompok Tionghoa, yang secara tradisional menguasai sektor ekonomi swasta, sering kali dipandang sebagai pesaing ekonomi oleh kelompok etnis Melayu dan beberapa kelompok migran asal Nusantara yang lebih terfokus pada sektor-sektor ekonomi informal atau pekerjaan pemerintah. Kontestasi ini bukan hanya tentang kekayaan material, tetapi juga tentang status sosial, di mana identitas etnis memainkan peran penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya ini.

Bagi kelompok-kelompok migran seperti Mandailing, Bugis, atau Jawa, yang sering kali diidentifikasi sebagai Bumiputera, integrasi ke dalam masyarakat Melayu memberikan keuntungan sosial tertentu, tetapi mereka tetap menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka dalam masyarakat yang menekankan asimilasi dengan budaya Melayu. Di sisi lain, bagi kelompok Tionghoa dan India, yang tidak diakui sebagai Bumiputera, mereka harus menavigasi struktur sosial yang menempatkan mereka dalam posisi marginal

secara politik, meskipun dalam beberapa kasus mereka memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.

5. Resistensi dan Negosiasi Identitas

Kontestasi identitas juga melibatkan resistensi terhadap tekanan asimilasi dan upaya untuk mempertahankan identitas budaya yang khas. Beberapa kelompok migran memilih untuk memperkuat identitas etnis mereka, bukan sebagai bentuk perlawanan terbuka, tetapi sebagai cara untuk menjaga warisan budaya dan solidaritas komunitas mereka. Misalnya, komunitas Tionghoa dan India di Malaysia memiliki jaringan sekolah, organisasi sosial, dan ritual budaya yang memungkinkan mereka mempertahankan bahasa, agama, dan adat istiadat mereka di tengah tekanan untuk berintegrasi dengan identitas nasional yang didominasi oleh Melayu.

Negosiasi identitas ini sering kali bersifat fleksibel dan situasional, di mana kelompok-kelompok migran dapat menekankan atau mereduksi aspek tertentu dari identitas mereka tergantung pada konteks sosial-politik. Di satu sisi, mereka mungkin mengadopsi unsur-unsur identitas Melayu untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak sosial dan politik, tetapi di sisi lain mereka tetap mempertahankan identitas budaya asli mereka dalam ruang-ruang privat atau dalam komunitas mereka sendiri.

Bab VI Penutup

Kesimpulan

Migrasi merupakan fenomena sosial dalam masyarakat manusia, dan telah dipraktikkan sepanjang sejarah. Fenomena ini juga diamati di Dunia Melayu secara umum yang mencakup masyarakat kepulauan yang melakukan mobilisasi atas dasar kebutuhan budaya dan politik dari satu tempat ke tempat lain dan berbagi ruang dengan orang lain dan pada tingkat tertentu atau lebih besar, pengalaman yang sama dalam proses migrasi mereka. Mandailing, antara lain, sebagai kelompok etnis, yang juga dianggap sebagai sub-kelompok bangsa Batak, memiliki reputasi yang melampaui pengenalan diri sendiri. Salah satu alasannya adalah berdasarkan perkembangan sejarah yang dianggap sebagai penghalang untuk mengungkap identitas migran Mandailing yang sebenarnya dalam konteks Malaysia. Migrasi kelompok ini dari tanah air asli mereka di Sumatera Barat ke berbagai tempat di Malaya diketahui, meskipun pengetahuan dan karya yang terkumpul dalam konteks akademis lebih sedikit. Pada tahun 1860-an, di antara kelompok Mandailing yang bermigrasi ke wilayah pesisir barat Semenanjung Malaya, Sutan Puasa, seorang anggota marga Lubis, memperoleh ketenaran sebagai pedagang timah, dan bekerja erat dengan istana Selangor dan pedagang Cina seperti Yap Ah Loy. Dapat dipahami bahwa kelompok Mandailing bermigrasi ke Semenanjung Malaya selama periode ini. Melalui data etnografi yang kami kumpulkan sebagai peneliti pada tahap awal, kami mencoba memahami penyebab proses migrasi dan beberapa unsur budaya (adat) yang masih tersimpan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lokasi di Kampung Kerangai, Jelebu, dan Negeri Sembilan. Pertama, masyarakat bangga memiliki dokumen tertulis yang muncul dalam bentuk Tarombo (mencatat silsilah) tentang hubungan leluhur. Jelas terlihat bahwa topografi pemukiman mirip dengan kampung halaman asli Mandailing di wilayah Sumatera Barat. Jumlah penduduk masyarakat Mandailing di Kampung Kerangai sekitar seratus orang. Meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit, mereka tetap merasakan aspek budaya

Mandailing. Dan, seperti yang dikatakan oleh pemimpin masyarakat, “Kerangai agak lambat menerima orang luar...”. Media komunikasi di antara para anggotanya adalah Mandailing dan mereka bangga melestarikan Mandailing asli di antara mereka sendiri.

Posisi migran Mandailing di antara para migran lain di Malaysia bisa dilihat dari perspektif sejarah, sosial, dan politik, yang menunjukkan interaksi dan integrasi unik dibandingkan dengan kelompok migran lainnya. Secara historis, migrasi Mandailing ke Malaysia dimulai pada abad ke-19, didorong oleh tekanan politik dan ekonomi di tanah asal mereka di Sumatera Utara. Mereka tiba di Malaysia bersamaan dengan gelombang migrasi lain dari Nusantara, seperti orang Minangkabau, Bugis, dan Jawa, yang juga mencari peluang ekonomi di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Namun, dibandingkan dengan beberapa kelompok migran lain, Mandailing dikenal memiliki hubungan yang lebih erat dengan etnis Melayu karena kesamaan agama Islam dan beberapa aspek budaya, sehingga memudahkan integrasi awal mereka.

Dalam konteks politik etnik Malaysia, orang Mandailing umumnya dianggap sebagai bagian dari komunitas "Melayu" yang lebih luas, terutama setelah banyak dari mereka mengasimilasi ke dalam kebudayaan Melayu seiring dengan kebijakan Bumiputera yang menguntungkan etnis Melayu dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki identitas Mandailing yang berbeda, dengan bahasa dan adat istiadat yang khas. Di antara para migran lain seperti Tionghoa dan India, posisi Mandailing relatif lebih menguntungkan karena status mereka yang lebih dekat dengan etnis dominan, yaitu Melayu. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya mereka di tengah tekanan asimilasi, serta dalam bersaing dengan kelompok migran lain yang memiliki posisi ekonomi dan sosial yang berbeda dalam struktur masyarakat Malaysia.

References

- Andaya, Barbara Watson, and Leonard Y Andaya. *A History of Malaysia*. London: MacMillan Press Ltd., 1982.
- Andaya, L. Y. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. University of Hawaii Press., 2017.
- Andaya, Leonard Y. "The Trans-Sumatra Trade and the Ethnicization of the 'Batak'" *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 158, no. 3 (2002): 367–409.
- Anderson, Benedict. "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism." In *The New Social Theory Reader*, 282–88. Routledge, 2020.
- Anthony, Reid. "Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia." *The Journal of Asian Studies* 26, no. 2 (1967): 267–83.
- Barth, Fredrik. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Waveland Pres, 1998.
- Becker, Gary S. *The Economic Way of Looking at Life*, 1993.
- Belle, Carl Vadivella. "The Malay Peninsula: Early History, Melaka and the Colonial Setting." In *Tragic Orphans: Indians in Malaysia.*, 1–15. Books and Monographs ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2014.
- Bemmelen, Sita T. van. "The Encroachment on the Batak World (1830–1883)." In *Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra*, 179–226. BRILL, 2017. https://doi.org/10.1163/9789004345751_007.
- Fee, Lian Kwen. "The Construction of Malay Identity across Nations: Malaysia, Singapore, and Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 157, no. 4 (2001): 861–79.
- Funston, J. "The Politics of Ethnicity in Malaysia." *Pacific Affairs* 53, no. 3 (1980): 376–77.
- Harahap, Basyral Hamidy. *Derap Langkah Mandailing-Natal. Himpunan Keluarga Mandailing*. Himpunan Keluarga Mandailing, 1997.
- Harapan, Basyral Hamidy. *Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk*, 2002.
- Harper, T. N. *The End of Empire and the Making of Malaya*. Cambridge University Press, 1999.
- Hasselgren, Johan. *Rural Batak, Kings in Medan The Development of Toba Batak Ethno-Religious Identity in Medan, Indonesia, 1912-1965*. Sweden: Elanders Gotab, 2000.
- Holst, Frederik. *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia*. Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203121955>.
- Khoo, Nor Haslinda, Abdul Halim, and Yunus Sauman. "Rumah Besar Penghulu Raja Bilah Di Papan Dan Hubungannya Dengan Masyarakat Mandailing Di Perak 1896-1940." *Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2023, 16–23.
- Lee, Sae-Jae. *Immigrant Occupational Choice: An Economic Model of Korean and Other Asian Immigration to the United States*. University of Washington, 1995.
- Lubis, Abdul Razak. "The Indian Diaspora, Absences, Silences and the Margin: Restructuring Indian Diaspora Studies." Kanyakumari Tamil Nadu-India, 2016.
- Lubis, Abdur-Razzaq. *Sutan Puasa: Founder of Kuala Lumpur*, 2018.
- . *Tarikh Raja Asal: Derap Perantauan Kaum Mandailing Dari Sumatra Ke Tanah Semenanjung*. Areca Books, 2021.
- Massey, Douglas S., and Felipe García España. "The Social Process of International Migration." *Science* 237, no. 4816 (1987): 733–38.

- Middlebrook, Stanley Musgrave, John Michael Gullick, and C.A Gibson-Hill. "Yap Ah Loy (1837-1885)." *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 24, no. 2 (1951): 1–127.
- Milner, A. *The Invention of Politics in Colonial Malaya*. Cambridge University Press., 1995.
- Nasution, Pandapotan. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. FORKALA Prov. Sum. Utara, 2005.
- Pelly, Usman. *Urbanisasi Dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau Dan Mandailing*. LP3ES, 1994.
- Perret, Daniel. *Kolonialisme Dan Etnisitas Batak Dan Melayu Di Sumatra Timur Laut*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Ravenstein, Ernest George. "The Laws of Migration." *Journal of the Royal Statistical Society* 52, no. 2 (1889): 241–305.
- Reid, A. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680: Volume 2: Expansion and Crisis*. New Haven and London, 1993.
- Reid, Anthony. *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. Cambridge University Press, 2010.
- Sadka, Emily. *The Protected Malay States: 1874-1895*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press., 1968.
- Sam, Hashim. *The Royal Commoner: The Life and Times of Imam Perang Jabor 1858-1921*. Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 2002.
- Shamsul, Amri Baharuddin. "Nations-of-Intent in Malaysia." In *In Asian Forms of the Nation*, 323–47. Routledge, 2013.
- Sunarti, Linda, Raisye Soleh Haghia, and Noor Fatia Lastika Sari. "The Bugis Diaspora in Malaysia: A Quest for Cultural Identity on Collective Memories through Social Media." *Cogent Arts & Humanities* 9, no. 1 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2066765>.
- Turnbull, Mary. "Malaysia: The Nineteenth Century." In *South East Asia Colonial History V2*, 242–52. Routledge, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003101673>.
- Wallerstein, Immanuel Maurice. *Historical Capitalism with Capitalist Civilization*. Verso, 1995.
- Zelinsky, Wilbur. "The Hypothesis of the Mobility Transition." *Geographical Review*, 1971, 219–49.

"3 MALAYSIA AS AN ISLAMIC STATE." *Islamization and Activism in Malaysia*. ISEAS Publishing, 2010. <https://doi.org/10.1355/9789814279031-006>.

Abbott, J. P, and S Gregorios-Pippas. "Islamization in Malaysia: Processes and Dynamics." *Contemporary Politics* 16, no. 2 (2010): 135–51.

Allen, Roger, Edward W. Said, and David Barsamian. "Culture and Resistance: Conversations with Edward W. Said." *World Literature Today*, 2005. <https://doi.org/10.2307/40158854>.

Andaya, Barbara Watson, and Leonard Y Andaya. *A History of Malaysia*. London: MacMillan Press Ltd., 1982.

Andaya, L. Y. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*. University of Hawaii Press., 2017.

Anderson, Benedict. "Imagined Communities." *Nationalism*, 1991. <https://doi.org/10.1080/1382557042000294701>.

- . “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.” In *The New Social Theory Reader*, 282–88. Routledge, 2020.
- . “Under Three Flags Anarchism and the Anti Colonial Imagination.Pdf,” n.d.
- Arifah, Hafizah binti Mokhtaruddin. “Masyarakat Mandailing Di Mukim Papan, Perak, 1873-1909.” Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2018.
- Azman, Hazita, Bahiyah Abdul Hamid, and Zarina Othman, eds. *Malaysian Youth in the Global World: Issues and Challenges*. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011.
- Barth, Fredrik. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Waveland Pres, 1998.
- Beck, Ulrich. *What Is Globalization?* Jhon Wiley & Sons, 2018.
- Belle, Carl Vadivella. “The Malay Peninsula: Early History, Melaka and the Colonial Setting.” In *Tragic Orphans: Indians in Malaysia.*, 1–15. Books and Monographs ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2014.
- Brubaker, Rogers. “Ethnicity without Groups.” *European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie* 43, no. 2 (2002): 163–89.
- Carrquiriborde, Ignacio Rubio. “The Sociology of Anthony Giddens.” *Revista Mexicana de Sociologia* 67, no. 1 (2003): 207–10. <https://doi.org/1.>
- Chong, Henry Ren Jie. “Introduction: The Chinese in the Malay Peninsula.” *Translocal Chinese: East Asian Perspectives* 16, no. 2 (October 21, 2022): 123–25. <https://doi.org/10.1163/24522015-16020001>.
- “Conclusion ISLAM, DEMOCRACY, AND ACTIVISM IN MALAYSIA.” *Islamization and Activism in Malaysia*. ISEAS Publishing, 2010. <https://doi.org/10.1355/9789814279031-012>.
- “Diaspora Activism and the Dynamics of Voice.” *The Arab Spring Abroad*. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108980036.002>.
- Drakeley, Steven. “Drawing or Waving? Citizenship, Multiculturalism, and Islam in Malaysia.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 46, no. 2 (2008): 325–51.
- Durand, Frederic, and Richard Curtis. *Maps of Malaya and Borneo: Discovery, Statehood and Progress, The Collections of H.R.H. Sultan Sharafuddin Idris Shah and Dato’ Richard Curtis*Kuala Lumpur Jugra Publications. Kuala Lumpur: Jugra Publications, 2013.
- Esman, Milton J. *Ethnic Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1994.
- Fee, Lian Kwen. “The Construction of Malay Identity across Nations: Malaysia, Singapore, and Indonesia.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 157, no. 4 (2001): 861–79.
- Funston, J. “The Politics of Ethnicity in Malaysia.” *Pacific Affairs* 53, no. 3 (1980): 376–77.
- Gabriel, Sharmani Patricia. “Nation and Contestation in Malaysia: Diaspora and Myths of Belonging in the Narratives of K. S. Maniam.” *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 2 (June 18, 2005): 235–48. <https://doi.org/10.1017/S0022463405000159>.
- Gabriel, Sharmani Patricia. “Translating Bangsa Malaysia: Toward a New Cultural Politics of Malaysian-Ness.” *Critical Asian Studies* 43, no. 3 (2011): 349–72.
- Gellner, Ernest. “Culture, Identity and Politics.” *Cambridge: Cambridge University Press*, 1995.
- Hall, Stuart. “The West and the Rest: Discourse and Power.” *Race and Racialization, 2E: Essential Readings*, 1992, 85–95.
- Hewison, Kevin. “Resisting Globalization: A Study of Localism in Thailand.” *Pacific Review* 13, no. 2 (2000): 279–96. <https://doi.org/10.1080/095127400363596>.
- Holst, Frederik. *Ethnicization and Identity Construction in Malaysia*. Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9780203121955>.

- HWANG, JULIE CHERNOV. *Umat Bergerak Mobilisasi Damai Kaum Islamis Di Indonesia, Malaysia, Dan Turki*, 2011.
- Kahn, Joel S. "Explaining Ethnicity: A Review Article." *Critique of Anthropology* 4, no. 16 (January 24, 1981): 43–52. <https://doi.org/10.1177/0308275X8100401603>.
- Karner, Christian. *Ethnicity and Everyday Life. Ethnicity and Everyday Life*, 2007. <https://doi.org/10.4324/9780203030479>.
- Khoo, Nor Haslinda, Abdul Halim, and Yunus Sauman. "Rumah Besar Penghulu Raja Bilah Di Papan Dan Hubungannya Dengan Masyarakat Mandailing Di Perak 1896-1940." *Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2023, 16–23.
- Lee, Hwok-Aun. "Affirmative Action in Malaysia: Education and Employment Outcomes since the 1990s." *Journal of Contemporary Asia* 42, no. 2 (May 2012): 230–54. <https://doi.org/10.1080/09500782.2012.668350>.
- Lim, Mah Hui. "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*." *Ethnic and Racial Studies* 8, no. 2 (April 13, 1985): 250–76. <https://doi.org/10.1080/01419870.1985.9993485>.
- . "Affirmative Action, Ethnicity and Integration: The Case of Malaysia*." *Ethnic and Racial Studies* 8, no. 2 (April 13, 1985): 250–76. <https://doi.org/10.1080/01419870.1985.9993485>.
- Lubis, Abdul Razak. "The Indian Diaspora, Absences, Silences and the Margin: Restructuring Indian Diaspora Studies." *Kanyakumari Tamil Nadu-India*, 2016.
- Lubis, Abdur-Razzaq. "Janus-Faced Politics: The State and Academe Collusion in the Perpetuation of Racial Ideologies in West Malaysia*." In *In Asia-Pacific Sociological Association (APSA) Conference: "Transforming Societies: Contestations and Convergences in Asia and the Pacific"*, 7–35, 2014.
- . "Mainstreaming the Minorities: The Case of the Mandailings in Malaysia and Indonesia." In *Promoting Culture of Peace, SIGNIS Asia*, 42–48. Kuala Lumpur: Cahayasuara Communications Centre, 2005.
- . "Mandailing Islam across Borders." *Taiwan Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 2 (2005): 55–98.
- . *Tarikh Raja Asal: Derap Perantauan Kaum Mandailing Dari Sumatra Ke Tanah Semenanjung*. Areca Books, 2021.
- . "The Politics of Identity Construction: The Case of the Mandailing People." *The Asian Face of Globalisation: Reconstructing Identities, Institutions, and Resources*, 2004.
- Lubis, Abdur-Razzaq. "Transformation of Mandailing Cultural Identity and Leadership." *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 76, no. 1 (284) (2003): 55–79. <http://www.jstor.org/stable/41493487>.
- "Malaysia: Women, Labour Activism and Unions." *Women and Labour Organizing in Asia*. Routledge, 2007. <https://doi.org/10.4324/9780203938225-12>.
- Mandaville, Peter. "Reimagining Islam in Diaspora: The Politics of Mediated Community." *Gazette* 63, no. 2–3 (2001): 169–86. <https://doi.org/10.1177/0016549201063002005>.
- Middlebrook, Stanley Musgrave, John Michael Gullick, and C.A Gibson-Hill. "Yap Ah Loy (1837-1885)." *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society* 24, no. 2 (1951): 1–127.
- Mun, Ang Siew, Phaik Fern Chiok, and Choo Chin Low. "Between Ethnicization and Globalisation: Mediating Contesting Cultural Identities of Malaysian Youths 11, No. 3 (2015): 73-82." *Geografia-Malaysian Journal of Society and Space* 11, no. 3 (2015): 73–82.

- Pelly, Usman. *Urbanisasi Dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau Dan Mandailing*. LP3ES, 1994.
- Pieterse, Nederveen Jan. "Globalization as Hybridization." In *Sociology of Globalization*, edited by Keri E. Iyall Smith. Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429493089>.
- Ramli, Kautsar, and Nick Williams. "The Interplay of Affirmative Action and Entrepreneurial Culture: Understanding Institutional Privilege and Exclusion in Malaysia." *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, February 11, 2024. <https://doi.org/10.1177/14657503241229689>.
- Sadka, Emily. *The Protected Malay States: 1874-1895*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press., 1968.
- Shamsul, A. B. "A History of an Identity, an Identity of a History: The Idea and Practice of 'Malayness' in Malaysia Reconsidered." *Journal of Southeast Asian Studies*, 2, no. 3 (2001): 355–366.
- Shamsul, Amri Baharuddin. "A History of an Identity, an Identity of a History: The Idea and Practice of 'Malayness' in Malaysia Reconsidered." *Journal of Southeast Asian Studies* 2, no. 3 (2001): 355–66.
- Shamsul, Amri Baharuddin. "Nations-of-Intent in Malaysia." In *In Asian Forms of the Nation*, 323–47. Routledge, 2013.
- Silk, Michael. "Bangsa Malaysia': Global Sport, the City and the Mediated Refurbishment of Local Identities." *Media, Culture & Society* 24, no. 6 (2002): 775–94.
- Sinatora, Francesco L. "Hybridity, Secular Identities and Radical Islamic Discourse." *Language, Identity, and Syrian Political Activism on Social Media*. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429443527-6>.
- Smith, Anthony D. "Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism." *International Affairs* 72, no. 3 (July 1996): 445–58. <https://doi.org/10.2307/2625550>.
- Sunarti, Linda, Raisye Soleh Haghia, and Noor Fatia Lastika Sari. "The Bugis Diaspora in Malaysia: A Quest for Cultural Identity on Collective Memories through Social Media." *Cogent Arts & Humanities* 9, no. 1 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2066765>.
- Tarling, Nicholas, and Edmund Terence Gomez. *The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation. The State, Development and Identity in Multi-Ethnic Societies: Ethnicity, Equity and the Nation*, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203932162>.
- Toğuşlu, Erkan, and Johan Leman. "Translocality and Hybridization in Current Modern Islamic Activism." *Modern Islamic Thinking and Activism*. Universitaire Pers Leuven, 2014. <https://doi.org/10.2307/j.ctt13x0mrn.13>.
- Tugby, Donald. *Cultural Change and Identity: Mandailing Immigrants in West Malaysia*. Queensland: University of Queensland Press, 1977.
- Turnbull, Mary. "Malaysia: The Nineteenth Century." In *South East Asia Colonial History V2*, 242–52. Routledge, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003101673>.
- Yee Mun, Chin, Lee Yok Fee, Jayum Jawan, and Sarjit Singh Darshan. "From Individual Choice to Collective Actions: Ethnic Consciousness in Malaysia Reconsidered." *Ethnic and Racial Studies* 38, no. 2 (January 26, 2015): 259–74. <https://doi.org/10.1080/01419870.2013.863958>.

Newspapers

“Bengal”, *The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1835-1869)*, 20 November 1862.

“Methodist Work in Malaya: Conference Reports”, *The Straits Budget*, 9 January 1930.

“The Councils’ Annual Report For 1878. The Hon. Treasurer’s Report”, *Singapore Daily Times*, 18 January 1879.